



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS

Untuk Periode Yang Berakhir/
For The Periods Ended
**31 Desember 2017 dan 2016/
December 31, 2017 and 2016**

Disertai/*With*
**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report**

JL. Gatot Subroto Kav.31 Jakarta
Telp (021) 25549000 ext. 3183 Fax (021) 5731627

**DAFTAR ISI/
*TABLE OF CONTENTS***

**DAFTAR ISI/
TABLE OF CONTENTS**

**Halaman/
Page**

Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal		<i>The Secretary Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Ringkasan	1-5	<i>Summary</i>
Laporan Realisasi Anggaran	6	<i>Independent Auditor's Report</i>
Neraca	7-8	<i>Balance Sheet</i>
Laporan Operasional	9-10	<i>Statements of Operation</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	11	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	12-87	<i>Notes to Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL/
*BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT***



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

**SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD
ENDED DECEMBER 31, 2017
THE AUDIT BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahtiar Arif
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Kav.31
Jakarta Pusat 10210
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

We, the undersigned:

Name : Bahtiar Arif
Office Address : Jl. Gatot Subroto Kav.31
Jakarta Pusat 10210
Title : Secretary General
The Audit Board of
The Republic of Indonesia

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material terhadap laporan keuangan;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia;*
2. *The financial statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the financial statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia has been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The financial statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia do not contain misleading information or material facts, and we have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;*
4. *We are responsible for internal control system of The Audit Board of The Republic of Indonesia.*

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 18 Mei 2018/Jakarta, May 18, 2018

Atas nama dan mewakili Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/
For and on behalf of The Audit Board of The Republic of Indonesia



Bahtiar Arif
NIP 19700505199003100

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***



No.LAI/GA/HA/18018

No.LAI/GA/HA/18018

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia**

***Chairman of The House of Representative
of The Republic Indonesia And
Chairman of The Audit Board of The
Republic of Indonesia***

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA/
THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2017, serta laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying the financial statements of the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI), which comprise the balance sheet as of December 31, 2017, and statements of budget realization, statement of operation and statement changes in equity for the period than ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in Government Accounting Standards in Indonesia, and for the such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and the Government Auditing Standards established by the Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tanggal 31 Desember 2017, realisasi anggaran serta kinerja keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal kami sampaikan secara terpisah dengan laporan No. LAI/UU/HA/18018 dan LAI/IC/HA/18018.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, balance sheet of the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI) as of December 31, 2017, budget realization and the financial performance for the period then ended in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report of compliance with laws and regulations and internal control we submit separately to the report No. LAI/UU/HA/18018 and LAI/IC/HA/18018.

Hal Lain

Laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain dengan laporannya No. 022A/GA-BPKRI/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

Other Matter

The financial statements of the Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI) as of December 31, 2016 and for the year then ended, which are presented as corresponding figures to the financial statements as of December 31, 2017 and for the period then ended, were audited by other independent auditors whose report No. 022A/GA-BPKRI/V/2017 dated May 17, 2017 expressed an unmodified opinion those the financial statements.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*

Husni, Mucharam & Rasidi



Drs. Husni Arvan, CA., CPA.

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0071/ Public Accountant Register No AP.0071

Izin KAP No. KEP-662/KM.17/1998/Firm License No. KEP-662/KM.17/1998

18 Mei 2018/May 18, 2018

**RINGKASAN/
*SUMMARY***

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No.213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi/Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2017 *audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja BPK Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.645.975.000,00 dan Rp2.806.880.353.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2017 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp20.126.781.218,00 atau mencapai 552,03% dari Estimasi Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.670.558.146.116,00 atau mencapai 95,14% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut berasal dari Belanja Rupiah Murni sebesar Rp2.667.390.442.508,00 dan Belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3.167.703.608,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 and TA 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

	TA 2017/ FY 2017			TA 2016/ FY 2016	
	Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	Realisasi/ Realization	
Pendapatan Negara dan Hibah	3.645.975.000	20.126.781.218	552,03%	28.548.288.613	State Revenues and Grants
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	3.645.975.000	20.126.781.218	552,03%	28.548.288.613	Total State Revenues and Grants

Based on Article 55 Section (2) of Law Number 1 year 2004 concerning State Treasury and Regulation of the Minister of Finance Number 215/PMK.05/2016 concerning Amendment to PMK No.213/PMK.05/2013 on Central Government Accounting and Reporting System, Minister/Head of Institution as User of Budget/User of Goods shall prepare and submit Financial Statements of State Ministry/Institution covering Statements of Budget Realization, Balance Sheet, Statements of Operational, Statements of Changes in Equity, and Notes to Financial Statements to the Minister of Finance as fiscal manager, in the context of the preparation of Central Government Financial Statements.

Financial of Statements The Audit Board (BPK) Year 2017 audited has been prepared and presented in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 on Government Accounting Standards (GAS) and based on sound financial management principles in the government.

1. Statements of Budget Realization

Statements of Budget Realization for the period ended December 31, 2017 describe the comparison between the budget and its realization, which includes elements of revenues, grants and expenditures during the period January 1 until December 31, 2017.

Estimation Revenue and Expenditure Budget BPK Fiscal Year 2017 are amounting to Rp3,645,975,000.00 and amounting to Rp2,806,880,353,000.00.

The realization of the State Revenues and Grants of Fiscal Year 2017 comes entirely from Non-Tax State Revenue of Rp20,126,781,218.00 or 552.03% of the Revenue Estimation.

Realization of State Expenditure Fiscal Year 2017 is Rp2,670,558,146,116.00 or 95.14% of its budget. Total realization of the expenditure are derived from Pure Rupiah Expenditure of Rp2,667,390,442,508.00 and Non-Tax State Revenue (PNBP) Expenditures of Rp3,167,703,608.00.

Summary of Budget Realization Report of FY 2017 and FY 2016 can be presented as follows:

1. Laporan Realisasi Anggaran (Lanjutan)

1. Statements of Budget Realization (Continued)

	TA 2017/ FY 2017			TA 2016/ FY 2016	
	Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	Realisasi/ Realization	
Belanja Negara					State Expenditure
Belanja Rupiah					<i>Expenditure Pure</i>
Murni	2.803.655.856.000	2.667.390.442.508	95,14%	3.097.047.302.916	<i>Rupiah</i>
Belanja Penerimaan					<i>Expenditure Loan</i>
Negara Bukan Pajak	3.224.497.000	3.167.703.608	98,24%	3.013.428.315	<i>and Grants</i>
Total					Total
Belanja	2.806.880.353.000	2.670.558.146.116	95,14%	3.100.060.731.231	Expenditure

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2017 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.687.810.249.262,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp24.072.911.819,00, Aset tetap sebesar Rp4.568.525.966.643,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp384.939.481,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp94.826.431.319,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp62.155.774.730,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.625.654.474.532,00

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

2. Balance Sheet

The Balance sheet describes the entity's financial position on assets, liabilities and equity as of December 31, 2017 and compared to the entity's financial position as December 31, 2016.

Balance of Asset as of December 31, 2017 was recorded and presented amounting to Rp4,687,810,249,262.00 which consist of: Current Asset amounting to Rp24,072,911,819.00, Fixed Assets amounting to Rp4,568,525,966,643.00, Long Term Receivables amounting to Rp384,939,481.00, and Other Assets amounting to Rp94,826,431,319.00.

Balance of Liabilities as of December 31, 2017 amounting to Rp62,155,774,730.00, which are all short-term liabilities.

Balance of Equity as of December 31, 2017 amounting to Rp4,625,654,474,532.00

Summaries of Balance Sheet as of December 31, 2017 and 2016 can be presented as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	Nilai Kenaikan (Penurunan)/ Value Increase (Decrease)	%	
Aset					Assets
Aset Lancar	24.072.911.819	31.330.860.143	(7.257.948.324)	-23,17%	<i>Current Assets</i>
Aset Tetap	4.568.525.966.643	4.642.866.745.272	(74.340.778.629)	-1,60%	<i>Fixed Assets</i>
Piutang Jangka Panjang	384.939.481	399.267.481	(14.328.000)	-3,59%	<i>Long Term</i>
Aset Lainnya	94.826.431.319	99.520.497.839	(4.694.066.520)	-4,72%	<i>Receivable</i>
Jumlah Aset	4.687.810.249.262	4.774.117.370.735	(86.307.121.473)	-1,81%	Total Assets
Kewajiban					Liabilities
Kewajiban Jangka Pendek	62.155.774.730	126.230.311.149	(64.074.536.419)	-50,76%	<i>Short Term</i>
Jumlah Kewajiban	62.155.774.730	126.230.311.149	(64.074.536.419)	-50,76%	Total Liabilities
Ekuitas					Equity
Ekuitas	4.625.654.474.532	4.647.887.059.586	(22.232.585.054)	-0,48%	<i>Equity</i>
Jumlah Ekuitas	4.625.654.474.532	4.647.887.059.586	(22.232.585.054)	-0,48%	Total Equity
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4.687.810.249.262	4.774.117.370.735	(86.307.121.473)	-51,24%	Total Liabilities and Equity

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Kegiatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp9.601.183.174,00 sedangkan jumlah Beban Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp2.822.489.148.546,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp2.812.887.965.372,00.

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp1.382.893.359,00 dan Rp0,00 Sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.811.505.072.013,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

3. Statements of Operational

Statements of Operational presents various elements of income-SO, expenses, surplus/deficit from operating activities, surplus/deficit from non-operating activities, surplus/deficit from before extraordinary items, extraordinary items, and surplus/deficit-SO, required for fair presentation.

Operational Activities Revenue for the period of December 31, 2017 amounting to Rp9,601,183,174.00, while the total Expenses Operational activities amounting to Rp2,822,489,148,546.00 resulting there in Deficit of Operating Activities amounting to Rp2,812,887,965,372.00.

Non-Operational Activities and Extraordinary Items surplus amounting to Rp1,382,893,359.00 and Rp0.00 Resulting in the Deficit-SO entity amounting to Rp2,811,505,072,013.00.

Summaries Statements of Operational for the periods ended December 31, 2017 and 2016 can be presented as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	%	
Kegiatan Operasional					Operation Activities
Pendapatan	9.601.183.174	6.649.556.688	2.951.626.486	44,39%	Revenues
Beban	2.822.489.148.546	2.856.350.230.041	(33.861.081.495)	-1,19%	Expenses
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional	(2.812.887.965.372)	(2.849.700.673.353)	36.812.707.981	-1,29%	Surplus (Deficit) of Operation Activites
Kegiatan Non Operasional					Non Operation Activities
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	166.730.126	2.536.682.075	(2.369.951.949)	-93,43%	Surplus (Deficit) Disposal Non Current Asset
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	Surplus (Deficit) Disposal Long Term Liabilities
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.216.163.233	2.508.046.841	(1.291.883.608)	-51,51%	Surplus (Deficit) From Other Non Operation Activities
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	1.382.893.359	5.044.728.916	(3.661.835.557)	-72,59%	Surplus (Deficit) From Non Operation Activities

3. Laporan Operasional (Lanjutan)

3. Statements of Operational (Continued)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	%	
Pos Luar Biasa					Extraordinary Items
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-	Extraordinary Revenues
Beban Luar Biasa	-	-	-	-	Extraordinary Expenses
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	-	-	-	-	Surplus (Deficit) Before Extraordinary Items
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa	-	-	-	-	Surplus (Deficit) From Extraordinary Items
Surplus (Defisit) LO	(2.811.505.072.013)	(2.844.655.944.437)	33.150.872.424	-1,17%	Surplus (Deficit) SO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp4.647.059.586,00 dikurangi selisih Defisit-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.811.505.072.013,00 Kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar senilai Rp0,00 dan ditambah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas senilai Rp126.563.338.008,00 serta ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.662.709.148.951,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp4.625.654.474.532,00 terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp22.232.585.054,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

4. Statements of Changes in Equity

Statements of Changes in Equity presents information on the increase or decrease in the equity of the reporting year compared to the previous year.

The Beginning balance of equity as of January 1, 2017 amounting to Rp4,647,059,586.00 minus Deficit-SO as of December 31, 2017 amounting to Rp2,811,505,072,013.00 plus the Cumulative Impact of Changes in Accounting Policies/Fundamental Errors Rp0.00 and plus Corrections Added/Reduced Equity Rp126,563,338,008.00 and added Inter-Entity Transactions amounting to Rp2,662,709,148,951.00 so that the Equity of the entity as of December 31, 2017 is Rp4,625,654,474,532.00 there was a decrease in equity of Rp22,232,585,054.00.

Summaries Statements of Changes in Equity for the periods ended December 31, 2017 and 2016 can be presented as follows:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	%	
Ekuitas Awal	4.647.887.059.586	4.430.334.477.617	217.552.581.969	4,91%	Beginning Balance Equity
Surplus (Defisit) LO	(2.811.505.072.013)	(2.844.655.944.437)	33.150.872.424	-1,17%	Surplus (Deficit) SO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar					Cumulative Impact of Changes in Policy/ Fundamental Errors
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi	126.563.338.008	(28.913.327.178)	155.476.665.186	-537,73%	Correction of the Increase/ Decrease

4. Laporan Perubahan Ekuitas (Lanjutan)

4. Statements of Changes in Equity (Continued)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	%	
Ekuitas					Equity
Penyesuaian					Asset Value
Nilai Aset	-	-	-	-	- Adjustment
Penyesuaian Nilai					Inventory Value
Persediaan	-	1.545.500	(1.545.500)	-100,00%	- Adjustment
Selisih					Difference of
Revaluasi					Fixed Asset
Aset Tetap	-	-	-	-	- Revaluation
Penyesuaian Nilai					Fixed Asset
Aset Tetap					Non
Non					Revaluation
Revaluasi	66.961.056.291	(32.207.576.314)	99.168.632.605	-307,90%	- Adjustment
Lain-Lain	59.602.281.717	3.292.703.636	56.309.578.081	1710,13%	
Transaksi					Transaction
Antar					Between
Entitas	2.662.709.148.951	3.091.121.853.584	(428.412.704.633)	-13,86%	Entity
Kenaikan/ Penurunan					Increase/ Decrease
Ekuitas	(22.232.585.054)	217.552.581.969	(239.785.167.023)	-110,22%	Equity
Ekuitas					Ending Balance
Akhir	4.625.654.474.532	4.647.887.059.586	(22.232.585.054)	-0,48%	Equity

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara diakui berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2017 diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

5. Notes to the Financial Statement

Notes to the Financial Statement (NtFS) provide information on detailed explanations or lists or an analysis of the value of a post presented in the Budget Realization Statements, Balance Sheet, Statements of Operation and Statement of Changes in Equity. Included also in NtFS is the presentation of information required and recommended by Government Accounting Standards and other disclosures necessary for a fair presentation of financial statements.

In the presentation of the Statements of Budget Realization for the period ending December 31, 2017, Stated Income and Grants and State Expenditures are recognized on a cash basis, which is recognized when cash is received or excluded from the state treasury account.

In the presentation of Balance Sheet, Statements of Operation and Statements of Changes in Equity as of December 31, 2017 are recognized on an accrual basis, which is recognized upon obtaining rights to and incurrence of liabilities regardless of when cash or cash equivalents are received or excluded from the state treasury account.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN/
*STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION***

Uraian	Catatan/ Notes	TA 2017/FY 2017		% thd Angg/ % to Budget	TA 2016/FY 2016	Descriptions
		Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization		Realisasi/ Realization	
PENDAPATAN	B.2.1					REVENUES
Penerimaan						Non-
Negara						Tax
Bukan Pajak		3.645.975.000	20.126.781.218	552,03%	28.548.288.613	Income
Jumlah						Total
Pendapatan		3.645.975.000	20.126.781.218	552,03%	28.548.288.613	Income
BELANJA						EXPENDITURE
Belanja						Operation
Operasi						Expenditures
Belanja						Employee
Pegawai		1.199.201.134.000	1.135.348.569.875	94,68%	1.062.986.731.819	Expenditures
Belanja						Goods
Barang		1.459.072.200.000	1.387.394.996.562	95,09%	1.406.583.077.734	Expenditures
Jumlah						Total
Belanja		2.658.273.334.000	2.522.743.566.437	94,90%	2.469.569.809.553	Operation
Operasi					Expenditures	
Belanja					Capital	
Modal					Expenditure	
Belanja					Land	
Tanah	-	-	-	78.289.325.000	Expenditures	
Belanja					Equipment &	
Peralatan &					Machine	
Mesin	97.575.783.000	97.211.346.745	99,63%	369.799.641.994	Expenditures	
Belanja					Building &	
Gedung &					Properties	
Bangunan	41.805.878.000	41.483.835.707	99,23%	139.014.131.751	Expenditures	
Belanja					Road, Irrigation,	
Jalan, Irigasi,					& Network	
& Jaringan	-	-	-	323.730.100	Expenditures	
Belanja					Others	
Modal					Equity	
Lainnya	9.225.358.000	9.119.397.227	98,85%	43.064.092.833	Expenditures	
Jumlah Belanja					Total Capital	
Operasi	148.607.019.000	147.814.579.679	99,47%	630.490.921.678	Expenditures	
Jumlah					Total	
Belanja	2.806.880.353.000	2.670.558.146.116	95,14%	3.100.060.731.231	Expenditures	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of the financial statements taken as a whole

**NERACA/
*BALANCE SHEET***

Uraian	Catatan/ Notes	31 Desember, 2017/ December 31, 2017	31 Desember, 2016/ December 31, 2016	Description
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas di Bendahara				Cash in Disbursing
Pengeluaran	C.2.1.1	-	9.134.522.524	Treasurer
Kas Lainnya dan				Other Cash and Cash
Setara Kas	C.2.1.2	4.198.123.779	5.135.328.301	Equivalent
Belanja Dibayar Dimuka	C.2.1.3	357.453.807	361.852.280	Prepaid Expenditure
Piutang				Non Taxable
Bukan Pajak	C.2.1.4	3.626.968.686	1.394.900.083	Receivable
Penyisihan Piutang				Allowance for
Tak Tertagih-				doubtful-Non
Piutang Bukan				Taxable
Pajak	C.2.1.5	(25.439.867)	(6.974.501)	Receivable
Bagian Lancar				Current Position of
Tuntutan Ganti				Indemnification
Rugi		41.446.296	66.446.296	Claims-Net
Penyisihan Piutang				Allowance for
Tidak Tertagih-				doubtful-Current
Bagian Lancar				Position of
Tuntutan Ganti				Indemnification
Rugi		(13.595.148)	(2.901.630)	Claims-Net
Persediaan		15.887.954.266	15.247.686.790	Inventories
Jumlah Aset Lancar		24.072.911.819	31.330.860.143	Total Current Assets
Aset Tetap				Fixed Assets
Tanah		1.857.964.547.083	1.771.760.496.768	Land
Peralatan dan				Equipment and
Mesin		1.961.947.628.280	1.870.744.454.733	Machine
Gedung dan				Building and
Bangunan		2.325.635.127.982	2.268.269.681.712	Properties
Jalan, Irigasi dan				Roads, Irrigation, and
Jaringan		352.210.045.652	341.620.494.978	Network
Aset Tetap Lainnya		23.870.580.607	82.079.788.844	Other Fixed Assets
Konstruksi dalam				Construction in
Pengerjaan		17.328.422.600	19.506.469.353	Progress
Akumulasi				Accumulated
Penyusutan				Depreciation
Aset Tetap		(1.970.430.385.561)	(1.711.114.641.116)	Fixed Assets
Jumlah Aset Tetap		4.568.525.966.643	4.642.866.745.272	Total Fixed Assets
Piutang Jangka Panjang				Long-Term Receivables
Piutang Tagihan				Indemnification
Ganti Rugi		2.908.215.990	2.901.929.813	Claim
Penyisihan Piutang				Allowance for
Tidak Tertagih-				doubtful-
Tuntutan				Receivables
Ganti				Indemnification
Rugi		(2.523.276.509)	(2.502.662.332)	Claim
Jumlah Piutang Jangka Panjang		384.939.481	399.267.481	Total Long-Term Receivables

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of the financial statements taken as a whole

Uraian	Catatan/ Notes	31 Desember, 2017/ December 31, 2017	31 Desember, 2016/ December 31, 2016	Description
Aset Lainnya				Other Assets
Aset Tak Berwujud		186.848.003.424	180.714.189.782	Intangible Assets
Aset Lain-Lain		21.421.653.287	16.081.207.880	Other Assets
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya		(113.443.225.392)	(97.274.899.823)	Accumulated Depreciation/ Amortization of Other Assets
Jumlah Aset Lainnya		94.826.431.319	99.520.497.839	Total Other Assets
Jumlah Aset		4.687.810.249.262	4.774.117.370.735	Total Assets
KEWAJIBAN				LIABILITIES
Kewajiban Jangka Pendek				Short-Term Liabilities
Utang Kepada Pihak Ketiga		60.986.545.027	115.460.146.102	Account Payable- Third Parties
Hibah yang Belum Disahkan		-	-	Unapproved Grant
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan		50.000.000	-	
Pendapatan Diterima Dimuka		1.075.292.762	1.467.375.123	Unearned Income
Uang Muka dari KPPN		-	9.134.522.524	Advance Payment from KPPN
Utang Jangka Pendek Lainnya		43.936.941	168.267.400	Other Short-Term Payable
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		62.155.774.730	126.230.311.149	Total Short-Term Liabilities
Jumlah Kewajiban		62.155.774.730	126.230.311.149	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas		4.625.654.474.532	4.647.887.059.586	Equity
Jumlah Ekuitas		4.625.654.474.532	4.647.887.059.586	Total Equity
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		4.687.810.249.262	4.774.117.370.735	Total Liabilities and Equity

**LAPORAN OPERASIONAL/
*STATEMENTS OF OPERATION***

Uraian	Catatan/ Notes	31 Desember, 2017/ December 31, 2017	31 Desember, 2016/ December 31, 2016	Description
KEGIATAN OPERASIONAL				OPERATION ACTIVITIES
Pendapatan				Revenue
Penerimaan Negara				Non-Tax State
Bukan Pajak		9.601.183.174	6.649.556.688	Revenue
Jumlah Pendapatan		9.601.183.174	6.649.556.688	Total Revenues
Beban				Expenditure
Beban Pegawai		1.135.903.888.607	1.121.435.370.348	Employee Expenses
Beban Persediaan		44.885.161.713	47.112.707.700	Supply Expenses
Beban Barang dan Jasa		524.631.025.527	525.438.000.501	Goods and Services Expenses
Beban Pemeliharaan		115.905.136.665	109.325.103.286	Maintenance Expenses
Beban Perjalanan Dinas		707.025.084.677	737.109.201.489	Official Travel Expenses
Beban Penyusutan dan Amortisasi		294.089.078.296	316.017.374.057	Depreciation and Amortization Expenses
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		49.773.061	(87.527.340)	Allowance for Doubtful Expenses
Jumlah Beban		2.822.489.148.546	2.856.350.230.041	Total Expenses
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional				Surplus (Deficit) from Operation Activities
		(2.812.887.965.372)	(2.849.700.673.353)	
Kegiatan Non Operasional				Non Operation Activities
Surplus (Defisit)				Surplus (Deficit)
Pelepasan Aset Non Lancar		166.730.126	2.536.682.075	Disposal Non Current Assets
Surplus (Defisit)				Surplus (Deficit)
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	Disposal Non Short Term Liabilities
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				Surplus (Deficit) from Other Non Operational Activities
		1.216.163.233	2.508.046.841	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		1.382.893.359	5.044.728.916	Surplus (Deficit) from Non Operation Activities
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa				Surplus (Deficit) Before Extradinary Items
		(2.811.505.072.013)	(2.844.655.944.437)	

Uraian	Catatan/ Notes	31 Desember, 2017/ December 31, 2017	31 Desember, 2016/ December 31, 2016	Description
Pos Luar Biasa				Extradinary Items
Pendapatan Luar Biasa		-	-	Extradinary Revenues
Beban Luar Biasa		-	-	Extradinary Expenses
Surplus (Defisit) LO		(2.811.505.072.013)	(2.844.655.944.437)	Surplus (Deficit) SO

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS/
*STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY***

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE PERIOD ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian	Catatan/ Notes	31 Desember, 2017/ December 31, 2017	31 Desember, 2016/ December 31, 2016	Description
EKUITAS AWAL		4.647.887.059.586	4.430.334.477.617	OPERATION ACTIVITIES
Surplus (Defisit) LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		(2.811.505.072.013)	(2.844.655.944.437)	Surplus (Deficit) SO Cumulative Impact of Changes in Policy Fundamental Error
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas				Correction Increase/ Decrease in Equity
Penyesuaian Nilai Assets		-	-	Assets Balance Adjustment
Koreksi Nilai Persediaan		-	1.545.500	Inventory Balance Correction
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	Correction on Fixed Assets Revaluation
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		66.961.056.291	(32.207.576.314)	Correction on Fixed Assets Non Revaluation
Lain-Lain		59.602.281.717	3.292.703.636	Other Correction
Transaksi Antar Entitas		2.662.709.148.951	3.091.121.853.584	Transaction Between Entities
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(22.232.585.054)	217.552.581.969	Increase/Decrease Equity
Ekuitas Akhir		4.625.654.474.532	4.647.887.059.586	Ending Balance Equity

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of the financial statements taken as a whole

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/
*NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS***

A. UMUM	A. GENERAL
1. DASAR HUKUM	1. REGULATION
1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	1. <i>Law No.17 Year 2003 regarding State Financial.</i>
2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	2. <i>Law No.17 Year 2004 regarding State Treasury.</i>
3. Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	3. <i>Law No.15 Year 2006 regarding The Audit Board of The Republic of Indonesia.</i>
4. Undang-Undang No.18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.	4. <i>Law No.18 Year 2006 on Budget of State Revenues and Expenditures Budget Year 2017 as amended by Law No.8 Year 2017 concerning Amendment of Law No.18 Year 2016 on Budget and Income and Expenditure of State Budget Year 2017.</i>
5. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.	5. <i>Government Regulation No.8 Year 2006 regarding Financial Reporting and Performance of Government Agencies.</i>
6. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.	6. <i>Government Regulation No.71 Year 2010 regarding Government Accounting Standards.</i>
7. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	7. <i>Government Regulation No.27 Year 2014 regarding Management of State/Local Property.</i>
8. Peraturan Presiden No.75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.	8. <i>Presidential Regulation No.75 Year 2017 concerning Re-Assessment of State/Local Property.</i>
9. Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.	9. <i>Regulation of the Minister of Finance No.238/PMK.05/2011 on General Guidelines of Government Accounting System.</i>
10. Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.	<i>Regulation of the Minister of Finance No.213/PMK.05/2013 as amended by Regulation of the Minister of Finance No.215/PMK.05/2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Finance No.213/PMK.05/2013 on Central Government Accounting and Reporting System.</i>
11. Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.	11. <i>Regulation of the Minister of Finance No.214/PMK.05/2013 regarding Chart of Account Standard.</i>
12. Peraturan Menteri Keuangan No.215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.	12. <i>Regulation of the Minister of Finance No.215/PMK.05/2013 regarding Government Accounting at the Central Government Journal.</i>
13. Peraturan Menteri Keuangan No.219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.	13. <i>Regulation of the Minister of Finance No.219/PMK.05/2013 as amended with Regulation of the Minister of Finance No.224/PMK.05/2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Finance No.219/PMK.05/2013 on Central Government Accounting Policies</i>
14. Peraturan Menteri Keuangan No.69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.	14. <i>Regulation of the Minister of Finance No.69/PMK.06/2014 regarding the Quality Determination of Receivables and the Establishment of Doubtful Allowance at State Ministries/Agencies and State Treasurers.</i>

A. UMUM-LANJUTAN	A. GENERAL-CONTINUED
1. DASAR HUKUM-LANJUTAN	1. REGULATION-CONTINUED
15. Peraturan Menteri Keuangan No.177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.	15. <i>Regulation of the Minister of Finance No.177/PMK.05/2015 as amended with Regulation of the Minister of Finance No.222/PMK.05/2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Finance No.177/PMK.05/2015 regarding Guidelines for the Preparation and Submission of Financial Statements of State Ministries/Agencies.</i>
16. Peraturan Menteri Keuangan No.251/PMK.06/2016 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.	16. <i>Regulation of the Minister of Finance No.251/PMK.06/2015 regarding Amortization Procedures of State Property in the form of Intangible Assets in Central Government Entities.</i>
17. Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.	17. <i>Regulation of the Minister of Finance No.181/PMK.06/2016 regarding Administration of State Property.</i>
18. Peraturan Menteri Keuangan No.225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat.	18. <i>Regulation of the Minister of Finance No.225/PMK.06/2016 regarding Accrual Based Government Accounting Standards at The Central Government.</i>
19. Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.	19. <i>Regulation of the Minister of Finance No.65/PMK.06/2017 on Depreciation of State Assets in the Form of Fixed Assets of Central Government Entities.</i>
20. Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.	20. <i>Regulation of the Minister of Finance No.111/PMK.06/2017 on Assessment of State Property.</i>
21. Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.	21. <i>Regulation of the Minister of Finance No.118/PMK.06/2017 on Guidelines for the Implementation of the Return of State Property.</i>
22. Keputusan Menteri Keuangan No.53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.	22. <i>Decree of the Minister of Finance No.53/KMK.06/2012 regarding Application of Depreciation of State Property in the Form of Fixed Assets at Central Government Entities.</i>
23. Keputusan Menteri Keuangan No.59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.	23. <i>Decree of the Minister of Finance No.59/KMK.06/2013 regarding Benefit Period Table.</i>
24. Keputusan Menteri Keuangan No.94/KMK.06/2013 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.145/KMK.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.	24. <i>Decree of the Minister of Finance No.94/KMK.06/2013 as amended by Decree of the Minister of Finance No.145/KMK.6/2014 on Amandement to Decree of the Minister of Finance No.94/KMK.06/2013 regarding Module of Depreciation of State Property in the form of Property Assets at Central Government Entity.</i>
25. Keputusan Menteri Keuangan No.620/KMK.06/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.	25. <i>Decree of the Minister of Finance No.620/KMK.06/2015 regarding on The Useful life Amortization of Satte Property in the form of Intangible Assets at Central Government Entities.</i>
26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.	26. <i>Regulation of Director General of Treasury No.PER-85/PB/2011 regarding Administration of Non-Tax State Revenue Receivable at unit work of State Ministry/Institution.</i>

A. UMUM-LANJUTAN	A. GENERAL-CONTINUED																											
1. DASAR HUKUM-LANJUTAN 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. 28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. 30. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-3383/PB/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Petunjuk teknis koreksi data revaluasi BMN dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2017. 31. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang petunjuk penggunaan satker konsolidasi.	1. REGULATION-CONTINUED 27. Regulation of Director General of Treasury No.PER-43/PB/2015 concerning Accounting Guidance for Allowance for Doubtful Accounts at State Ministry/Institution. 28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.KEP-187/PB/2017 tentang Account Segment Categorization On Standard Account Chart. 29. Regulation of the President of the Republic of Indonesia No.75 Year 2017 on the Re-Assessment of State/Local Property and Regulation of the Minister of Finance No.118/PMK.06/2017 on Guidelines for the Implementation of the Return Assessment of State Property. 30. Letter of Director General of Treasury No.S-3383/PB/2018 dated April 12, 2018 regarding Technical Guidance correction of State of Goods revaluation data in the preparation of LKKL Year 2017. 31. Letter of Director General of Treasury No.S-2228/PB/2017 dated February 28, 2017 concerning the use of the consolidated working unit.																											
2. PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2.1 Profil Umum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, 23F dan 23G, yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap ibu kota Provinsi. Secara kelembagaan, BPK diatur berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga negara dengan sembilan orang Anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Sembilan Anggota ini terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, dan tujuh orang Anggota. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.47/P Tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota BPK dan hasil Sidang Anggota BPK tanggal 21 April 2017, susunan Anggota BPK saat ini adalah sebagai berikut:	2. PROFILE OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 2.1 General Profile The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK) based on 1945 Constitution of Articles 23E, 23F and 23G, which is responsible for examining the management and responsibility of state finances independently. The Audit Board of the Republic of Indonesia is domiciled in the State Capital, and has representation in every Provincial Capital. Institutionally, BPK is governed by Law No.15 Year 2006 concerning the Supreme Audit Board. BPK is a state institution with nine Members whose membership is inaugurated by Presidential Decree. Nine Members consist of a Chairman and concurrently as Member, Vice Chairman concurrently as Member, and seven Member. Based on Presidential Decree No.47/P year 2017 on the Inauguration of Resignation With Respect and Appointment of Members of BPK and the results of the BPK Member Meeting on April 21, 2017, the current composition of BPK is as follows:																											
<table><tr><td>Ketua</td><td>Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA. CPA.</td></tr><tr><td>Wakil Ketua</td><td>Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.</td></tr><tr><td>Anggota I</td><td>Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.</td></tr><tr><td>Anggota II</td><td>Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.</td></tr><tr><td>Anggota III</td><td>Achsanul Qosasi</td></tr><tr><td>Anggota IV</td><td>Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.</td></tr><tr><td>Anggota V</td><td>Ir. Isma Yatun, M.T.</td></tr><tr><td>Anggota VI</td><td>Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.</td></tr><tr><td>Anggota VII</td><td>Prof.Dr.Eddy Mulyadi Soepardi, C.Fr.A., CA.</td></tr></table>	Ketua	Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA. CPA.	Wakil Ketua	Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.	Anggota I	Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.	Anggota II	Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.	Anggota III	Achsanul Qosasi	Anggota IV	Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.	Anggota V	Ir. Isma Yatun, M.T.	Anggota VI	Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.	Anggota VII	Prof.Dr.Eddy Mulyadi Soepardi, C.Fr.A., CA.	<table><tr><td>Chairman</td></tr><tr><td>Vice Chairman</td></tr><tr><td>Board Member I</td></tr><tr><td>Board Member II</td></tr><tr><td>Board Member III</td></tr><tr><td>Board Member IV</td></tr><tr><td>Board Member V</td></tr><tr><td>Board Member VI</td></tr><tr><td>Board Member VII</td></tr></table>	Chairman	Vice Chairman	Board Member I	Board Member II	Board Member III	Board Member IV	Board Member V	Board Member VI	Board Member VII
Ketua	Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA. CPA.																											
Wakil Ketua	Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.																											
Anggota I	Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.																											
Anggota II	Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.																											
Anggota III	Achsanul Qosasi																											
Anggota IV	Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.																											
Anggota V	Ir. Isma Yatun, M.T.																											
Anggota VI	Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.																											
Anggota VII	Prof.Dr.Eddy Mulyadi Soepardi, C.Fr.A., CA.																											
Chairman																												
Vice Chairman																												
Board Member I																												
Board Member II																												
Board Member III																												
Board Member IV																												
Board Member V																												
Board Member VI																												
Board Member VII																												

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

2. PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA-LANJUTAN

2.1 Profil Umum-Lanjutan

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK dibantu pelaksana BPK yang tersusun dalam struktur organisasi terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara
- c. Inspektorat Utama;
- d. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- f. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- g. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- h. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- i. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- j. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- k. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- l. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- m. Auditorat Utama Investigasi;
- n. BPK Perwakilan;
- o. Staf Ahli;
- p. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa; dan
- q. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.

Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

2.2 Rencana Strategis Tahun 2016-2020

Rencana strategis (Renstra) BPK Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Visi
"Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat".
2. Misi
 - a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
 - b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

2. PROFILE OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA-CONTINUED

2.1 General Profile-Continued

In performing its duties, BPK is assisted by BPK executors arranged in the organizational structure consisting of:

- a. Secretariat General;*
- b. Board of State Education and Training*
- c. Principal Inspectorate;*
- d. Principal Directorate of Planning, Evaluation and Development of State Financial Audit;*
- e. Principal Directorate of Mentoring and Development of Law in State Financial Audit;*
- f. Principal Auditorate of State Finance I;*
- g. Principal Auditorate of State Finance II;*
- h. Principal Auditorate of State Finance III;*
- i. Principal Auditorate of State Finance IV;*
- j. Principal Auditorate of State Finance V;*
- k. Principal Auditorate of State Finance VI;*
- l. Principal Auditorate of State Finance VII;*
- m. Main Auditorate of Investigation;*
- n. Representative Office of BPK RI;*
- o. Expert Staff;*
- p. Functional Position Group Audit; and*
- q. Other Functional Position Group.*

The scope of BPK's duty is responsible for evaluation of management and accountability of state finances conducted by the Central Government, Local Government, other State Institutions, Bank Indonesia, State-Owned Enterprises, Public Services Boards, Regional-Owned Enterprises, and other institutions or entities which manage state finances, BPK evaluation's scope follows financial audits, performance checks, evaluation with a specific purpose.

The Audit Result Report of BPK should be submitted to DPR, DPD, dan DPRD in accordance with its authority. For the purpose of follow-up, the BPK audit results also should be submitted to the President, Governor, Regent/Mayor in accordance with their authority.

2.2 Strategic Plan Year 2016-2020

The strategic plan of BPK 2016-2020 is as follows:

1. *Vision*
"Being a supporter of state financial management to achieve state's goal through quality and useful examination".
2. *Mission*
 - a. Examine the management and responsibility of state financial freely and independent;*
 - b. Execute organizational governance with integrity, independence and professionalis.*

A. UMUM-LANJUTAN	A. GENERAL-CONTINUED
2. PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA-LANJUTAN 2.2 Rencana Strategis Tahun 2016-2020-Lanjutan 3. Tujuan Strategis Untuk mencapai visi tersebut, BPK menetapkan dua Tujuan Strategis (TS) sebagai berikut: a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara (TS1); b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara (TS2). 4. Sasaran Strategis (SS) Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK menetapkan dua sasaran strategis sebagai berikut: a. Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan (SS1); b. Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu (SS2). 5. Indikator Kinerja Utama BPK Untuk mewujudkan visi dan misi BPK melalui tujuan strategis dan sasaran strategis, ditetapkan ukuran keberhasilan dalam jangka waktu lima tahun yaitu berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: a. Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan (IKU1.1.) dengan target indeks capaian 3,50-4,20; b. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (IKU1.2.) dengan target capaian 60%-80%; c. Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah (IKU2.1.) dengan target capaian 0%; d. Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> Atas Kinerja Pemeriksa BPK (IKU2.3.) dengan target capaian 3,60-4,00; e. Indeks Mutu Organisasi (IKU2.3.) dengan target capaian 3,50-3,90; f. Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi-QARB (IKU2.4.) dengan target capaian A-AA; g. Nilai Akuntabilitas Kinerja (IKU2.5.) dengan target capaian A-AA.	2. PROFILE OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA-CONTINUED 2.2 Strategic Plan Year 2016-2020-Continued 3. <i>Strategic Goals</i> <i>To achieve that vision, BPK sets out two Strategic Goals (SG) as follows:</i> a. <i>Increase the benefits of inspection results in order to encourage state financial management to achieve the state's goals (SG1);</i> b. <i>Improving quality checks in encouraging state financial management to achieve state's goals (SG2).</i> 4. <i>Strategic Target (ST)</i> <i>As a form of translation of strategic target, BPK establishes two strategic target as follows:</i> a. <i>Increased utilization of results by stakeholders (ST1).</i> b. <i>Increased of quality control system (ST2).</i> 5. <i>Key Performance Indicators BPK</i> <i>In order to realize BPK's vision and mission through strategic goals and strategic targets, a five-year success rate is defined as a Key Performance Indikator (KPI) as follows:</i> a. <i>Level of Relevance of Examination with Stakeholder Needs and Needs (KPI1.1.) with target achievement index 3,50-4,20;</i> b. <i>Percentage of Completion of Follow-up Examination Result (KPI1.2.) with target achievement of 60%-80%;</i> c. <i>Percentage of Definied LHP ad Defined Loyalty CPC (KPI2.1.) with target achievement of 0%;</i> d. <i>Audit Satisfaction Index of Performance of BPK Auditor (KPI2.3.) with target achievement 3,60-4,00;</i> e. <i>Organization Quality Index (KPI2.3.) with target achievement of 3,50-3,90;</i> f. <i>The Quality Assurance Value of Bureaucracy Reform-QARB (KPI2.4.) with A-AA targets;</i> g. <i>Performance Accountability Values (KPI2.5.) with target A-AA achievements.</i>

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

2. PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA-LANJUTAN

2.2 Rencana Strategis Tahun 2016-2020-Lanjutan

Matriks hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama yang digunakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2. PROFILE OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA-CONTINUED

2.2 Strategic Plan Year 2016-2020-Continued

The relationship matrix between strategic objectives, strategic target, and key performance indicators used, can be seen in the following table:

Tujuan Strategis/ Strategic Goals	Sasaran Strategis/ Strategic Target	Indikator Kinerja Utama/ Key Performance Indicators
Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara/ <i>Improving the benefits of inspection results in order to encourage the management of state financial to achieve state.</i>	Meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan/ <i>Increased utilization of inspection results by stakeholders.</i>	1. Tingkat Relevansi Pemeriksaan dengan Harapan dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan/ <i>Relevance Level of Examination with the Hope and Needs of Stakeholders.</i>
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ <i>Percentage of Completion of Follow-Up Results of Finding.</i>
Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara/ <i>Improving quality checks in encourage state financial management to achieve country goals.</i>	Meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Mutu/ <i>Increased quality of Quality Control System.</i>	3. Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Kalah/ <i>Percentage of Defined Audit Reports and BPK Labeled Lost.</i>
		4. Indeks Kepuasan Auditee Atas Kinerja Pemeriksa BPK/ <i>Auditee Satisfaction Indeks of Performance of BPK Auditor.</i>
		5. Indeks Organisasi/Organisasi Mutu/ <i>Organization Quality Index.</i>
		6. Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi-QARB/ <i>The Value of Quality Assurance of Bureaucratic Reform-QARB.</i>
		7. Nilai Akuntabilitas Kinerja/Performance/ <i>Accountability Values.</i>

2.3 Restrukturisasi Program dan Kegiatan BPK

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No.0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.

Surat Edaran dimaksud berisi Buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang digunakan oleh seluruh Kementrian/Lembaga (termasuk BPK) sebagai pedoman dalam upaya-upaya:

2.3 Restructuring Program And BPK Activities

State Minister for National Development Planning/Head of Bappenas and Minister of Finance has issued Circular Letter with State Minister of PPN/Head of Bappenas and Minister of Finance No.0142/M.PPN/06/2009 dated June 19, 2009 on guidelines for Planning and Budgeting Reform.

The Circular Letter contains the Planning and Budgeting Reform Manual used by all Ministries/Institutions (including BPK) as a guide in the efforts of:

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

2. PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA-LANJUTAN

2.3 Restrukturisasi Program dan Kegiatan BPK-Lanjutan

1. Penataan kembali program dan kegiatan (restrukturisasi program dan kegiatan) BPK yang disertai dengan kejelasan sasaran pembangunan, indikator kinerja, dan penanggungjawab program/kegiatan;
2. Penyediaan indikasi kebutuhan pendanaan jangka menengah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan prioritas BPK berdasarkan proyeksi ketersediaan anggaran (*resource envelope*) jangka menengah; dan
3. Pemantapan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara perencanaan dan penganggaran sejak penyusunan RPJM dan Renstra BPK hingga penyusunan RKP, Renja BPK, RKA BPK, dan DIPA yang didukung oleh sistem dan informasi (*database*) perencanaan dan penganggaran yang terpadu.

Dengan berpedoman pada surat edaran tersebut maka seluruh Kementerian Negara/Lembaga termasuk BPK diminta untuk melakukan restrukturisasi program dan kegiatan, berkoordinasi dengan mitra kerja terkait di Bappenas dan Departemen Keuangan c.q. DJA serta menyampaikan hasil restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

BPK telah berhasil menyusun Program dan Kegiatan BPK yang telah digunakan dalam Renja BPK Tahun 2017 dan penganggaran (RKAKL/DIPA) Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

2. PROFILE OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA-CONTINUED

2.3 Restructuring Program And BPK Activities-Continued

1. Reorganization of programs and activities (restructuring programs and activities) of BPK, accompanied by clarity of development targets, performance indicators, and program/activity responsibilities;
2. Provision of indications of medium term financing needs to implement priority policies of BPK based on resource envelope of medium term budget; and
3. Consolidating the planning and budgeting process until there is a close relationship between planning and budgeting since the preparation of Mid Term Development Plan and Strategic Plan BPK to the preparation of Government Plan, Long Term Plan of BPK, Work Plan Budget BPK and DIPA supported by integrated planning and budgeting system and information.

Based on circular letter, all State Ministries/Institutions including BPK are required to restructure programs and activities, coordinate with relevant partners in Bappenas and Ministry of Finance c.q. DJA and submit the results of the restructuring of programs and activities of Ministries/Institutions to the State Minister for National Development Planning/Head of Bappenas and the Minister of Finance.

BPK has successfully established the BPK Program and Activities that have been used in the Year 2017 BPK Work Plan and budgeting (RKAKL/DIPA) of Year 2017 with details as follows:

Kode/ Code	Program/Kegiatan/ Program/Activity
PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01)/ GENERIC PROGRAM (SUBMITTING ON THE SECRETARIAT GENERAL ORGANIZATION UNIT (004.01))	
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI/Management Support Program and Implementation of Other Technical Duties BPK RI
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama/Sekretarial Service, Public Relation and Cooperation
1033	Manajemen SDM/Human Resource Management
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara/Management and Accountability of State Finance
5644	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara/Education and Training State Finance Audit
PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01)/ GENERIC PROGRAM (SUBMITTING ON THE SECRETARIAT GENERAL ORGANIZATION UNIT (004.01))	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Aparatur BPK RI/Improvement Facilities and Infrastructure Apparatus BPK RI Program
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum/Management of Facilities and Infrastructure and Public Service

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

2. PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA-LANJUTAN
2.3 Restrukturisasi Program dan Kegiatan BPK-Lanjutan

2. PROFILE OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA-CONTINUED
2.3 Restructuring Program And BPK Activities-Continued

Kode/ Code	Program/Kegiatan Program/Activity
PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01)/ GENERIC PROGRAM (SUBMITTING ON THE SECRETARIAT GENERAL ORGANIZATION UNIT (004.01))	
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK RI/Management Support and Implementation of Other Technical Duties BPK RI Program
1036	Pengawasan oleh Inspektorat/Supervision by Inspectorate
PROGRAM TEKNIS (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI BPK PUSAT (004.02)/ TECHNICAL PROGRAMS (SUBMITTING IN THE BPK HEADQUARTERS ORGANIZATION UNIT (004.01))	
06	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah. Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksa Keuangan Negara/Registry/Loss Program of State/Local Disadvantages. Development and Legal Service in the State Audit Sector
1037	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah/Legal Consultation Service and Registrar of State/Regional Disadvantages
1038	Pelayanan Legalisasi, Analisis dan Bantuan Hukum/Legislation, Legal Analysis and Assistance Service
07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan/Institutional Quality Improvement, Apparatus and Audit of State Finance Program
1039	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja/Strategic Planning and Performance Management
1038	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan/Evaluation and Reporting of Inspection Result
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara/State Auditing Program
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/State Treasury Audits and State Debt Settlement Monitoring

Selanjutnya dari program-program tersebut dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan dengan pembagian Satuan Kerja (Satker) sebagai berikut:

Furthermore, the programs are translated into activities with the division of unit work as follows:

1. Satuan Kerja di Kantor Pusat

1. unit work at Head Office

PROGRAM GENERIK DI KANTOR PUSAT (DIPA SETJEN)

GENERIC PROGRAM IN HEAD OFFICE (DIPA SETJEN)

Unit Eselon I/Unit Eselon II/ Echeclon Unit I/Echeclon Unit II	Kode/Code	Program/Kegiatan/ Program/Activities
Sekretariat Jenderal/Sekretariat General	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK/Management Support and Implementation of Other Technical Duties of BPK Program
1. Biro Sekretariat Pimpinan/Section of the Leadership Secretariat	1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama/Sekretarial Service, Public Relations and Cooperation
2. Biro Humas dan Kerja Sama Internasional/Section of Public Relations and International Cooperation		
3. Biro Sumber Daya Manusia/Section of Human Resource	1033	Manajemen SDM/Human Resource Management
4. Biro Keuangan/Section of Financial	1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara/Management and Accountability of State Finance
Sekretariat Jenderal/Sekretariat General	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK/Improvement Facilities and Infrastructure Apparatus BPK RI Program
1. Biro Teknologi Informasi/Section of Information Technology	1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum/Management of Facilities and Infrastructure and Public Service
2. Biro Umum/Section of Public		

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

- 2. PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA-LANJUTAN**
2.3 Restrukturisasi Program dan Kegiatan BPK-Lanjutan PROGRAM TEKNIS DI KANTOR PUSAT (DIPA BPK PUSAT)

- 2. PROFILE OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA-CONTINUED**
2.3 Restructuring Program And BPK Activities-Continued TECHNICAL PROGRAM IN HEAD OFFICE (DIPA HEADQUARTERS BPK)

Unit Eselon I/Unit Eselon II/ Echelon Unit I/Echelon Unit II		Kode/Code	Program/Kegiatan/ Program/Activities
Inspektorat Utama/ <i>Principal Inspectorate</i>		03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK RI/ <i>Monitoring and Accounting Enhancement of BPK Apparatus Program</i>
1.	Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu/Pemeriksaan/ <i>Inspectorate of Quality Confidence Acquisition</i>	1036	Pengawasan oleh Inspektorat/ <i>Supervision by the Inspectorate</i>
2.	Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan/ <i>Inspection and Institutional Quality</i>		
3.	Inspektorat Penegak Integritas/ <i>Integrity Enforcement Inspectorate</i>		
Ditama Binbangkum/ <i>Ditama Binbangkum</i>		06	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di bidang Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Registry /Loss of State/Local Losses Development and Legal Service in the field of State Financial Audit Program</i>
1.	Direktorat KHKKN/D/ <i>Directorate of KHKKN/D</i>	1037	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Negara/Daerah/ <i>Legal Consultation Service and State's Secretariat Distric</i>
2.	Direktorat LPBH/ <i>Directorate of LPBH</i>	1038	Pelayanan Legislasi, Legal Analisis dan Bantuan Hukum/ <i>Legislation, Legal Analysis and Assistance Service</i>
Ditama Revbang/ <i>Ditama Revbang</i>		07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Institutional Quality Improvement, Apparatus and State Audit Program</i>
1.	Direktorat PSMK/ <i>Directorate of PSMK</i>	1039	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja/ <i>Strategic Planning and Performance Management</i>
2.	Direktorat EPP/ <i>Directorate of EPP</i>	1040	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan/ <i>Evaluation and Reporting of Inspection Result</i>
2.	Direktorat Litbang/ <i>Directorate of Litbang</i>	1041	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Research and Development of State Finance Audit</i>
AKN I s.d. VII/ <i>AKN I s.d. VII</i>		08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>State Auditing Program</i>
1.	Auditorat/ <i>Auditorate</i>	1043	Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>State Finance Audit</i>

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

- 2. PROFIL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA-LANJUTAN**
- 2.3 Restrukturisasi Program dan Kegiatan BPK-Lanjutan PROGRAM GENERIK DAN TEKNIS DI PERWAKILAN**
2. Satuan Kerja di Pusdiklat/Perwakilan
PROGRAM GENERIK DAN TEKNIS DI PUSDIKLAT

- 2. PROFILE OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA-CONTINUED**
- 2.3 Restructuring Program And BPK Activities-Continued GENERIC AND TECHNICAL PROGRAM IN REPRESENTATIVES**
2. unit work at Training Center/Representative
GENERIC AND TECHNICAL PROGRAM IN PUSDIKLAT

Kode/Code	Program/Kegiatan di Pusdiklat/ Program/Activity in Pusdiklat
PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01))/GENERIC PROGRAM (SUBMITTING ON THE SECRETARIAT GENERAL ORGANIZATION UNIT (004.01))	
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI/ <i>Management Support and Implementation of Other Technical Responsibilities Program of BPK RI.</i>
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama/ <i>Secretarial Service, Public Relations and Cooperation</i>
1033	Manajemen SDM/ <i>Human Resource Management</i>
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara/ <i>Management and Accountability of State Finance</i>
5644	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Education and Training of State Finance Audit</i>
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI/ <i>Improvement Facilities and Infrastructure Apparatus Program of BPK RI.</i>
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum/ <i>Management of Facilities and Infrastructure and Public Service</i>
PROGRAM GENERIK (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI SETJEN (004.01))/GENERIC PROGRAM (SUBMITTING ON THE SECRETARIAT GENERAL ORGANIZATION UNIT (004.01))	
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK RI/ <i>Management Support and Implementation of Other Technical Duties BPK RI Program</i>
1032	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama/ <i>Secretarial Service, Public Relations and Cooperation</i>
1033	Manajemen SDM/ <i>Human Resource Management</i>
1034	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara/ <i>Management and Accountability of State Finance</i>
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK RI/ <i>Improvement Facilities and Infrastructure Apparatus BPK RI Program</i>
1035	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum/ <i>Management of Facilities and Infrastructure and Public Service</i>
PROGRAM TEKNIS (MENGINDUK PADA UNIT ORGANISASI BPK PUSAT (004.02))/TECHNICAL (SUBMITTING IN THE BPK HEADQUARTERS ORGANIZATION CENTER PROGRAMS (004.02))	
07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Program of Institutional Quality Improvement, Apparatus and Audit of State Finance</i>
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>State Finance Audit</i>

- 3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**
Laporan Keuangan BPK Tahun 2017 ini merupakan laporan yang Penyusunan mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPK (Bagian Laporan Anggaran 004). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Keuangan Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

- 3. APPROACH TO DEVELOP FINANCIAL STATEMENTS**
Financial Report of BPK in 2017 is a report that covers all financial aspects managed by BPK (Budget Report Section 004). This Financial Statement is generated through Accounting Financial System Institution which is a series of manual and computerized procedures starting from data collection, recording and overview up to the reporting of financial position and financial operation at the State Ministry/Institution.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN-LANJUTAN

Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja (satker) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan, SIMAK-BMN merupakan sistem akuntansi pendukung yang menghasilkan informasi persediaan, aset tetap, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara.

Dalam penyusunan laporan keuangan tingkat lembaga, BPK sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) melakukan konsolidasi laporan keuangan seluruh satuan kerja (satker) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di lingkungan BPK. Satker-satker tersebut bertanggungjawab dan berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran yang diterimanya.

Satker UAKPA penyusun laporan keuangan di lingkungan BPK berjumlah 74 satker, yaitu terdiri dari:

3. APPROACH TO DEVELOP FINANCIAL STATEMENTS-CONTINUED

Institution Accounting System consists of Accounting System of Accrual Based Institution (SAIBA) and Management Information System and Accounting of State Property (SIMAK-State of Goods). SAIBA is designed to produce a unit financial report (unit works) consisting of Statements of Budget Realization, Balance Sheet, Statements Operations, and Statements of Change in Equity. Meanwhile, SIMAK-State of Goods is a supporting accounting system that produces inventory information, fixed assets, and other assets for the preparation of balance sheets and reports on state property.

In the preparation of the institution-level financial statements, BPK as the Budget User Accounting Unit consolidates the financial statements of all unit works (unit works) Unit of Accounting Authorization of Budget User in BPK. The unit work are responsible and obliged to prepare the financial statements for the implementation of the budget they receives.

The Accounting Authorization of Budget User working unit of BPK consists of 74 working unit, consist of:

No.	Nama Satker/Name of unit works	KP/KD	DIPA Eselon I/Echelon I DIPA		Jumlah Satker UAKPA/ Total UAKPA unit works
			Setjen/Sec Gen (01)	Pusat/Headquarter (02)	
1	Sekretariat Jenderal BPK/ <i>Secretariat General of BPK</i>	KP	1	-	1
2	BPK Pusat/ <i>BPK Headquarters</i>	KP	-	1	1
3	Pusdiklat*/ <i>Education and Training Center*</i>	KP	1	-	1
4	BPK Perwakilan Provinsi Aceh/ <i>BPK Representative of Aceh Province</i>	KD	1	1	2
5	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/ <i>BPK Representative of North Sumatera Province</i>	KD	1	1	2
6	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat/ <i>BPK Representative of West Sumatera Province</i>	KD	1	1	2
7	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/ <i>BPK Representative of South Sumatera Province</i>	KD	1	1	2
8	BPK Perwakilan Provinsi Riau/ <i>BPK Representative of Riau Province</i>	KD	1	1	2
9	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau/ <i>BPK Representative of Riau Islands Province</i>	KD	1	1	2
10	BPK Perwakilan Provinsi Jambi/ <i>BPK Representative of Jambi Province</i>	KD	1	1	2
11	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu/ <i>BPK Representative of Bengkulu Province</i>	KD	1	1	2
12	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/ <i>BPK Representative of Bangka Belitung Island Province</i>	KD	1	1	2
13	BPK Perwakilan Provinsi Lampung/ <i>BPK Representative of Lampung Province</i>	KD	1	1	2
14	BPK Perwakilan Provinsi Banten/ <i>BPK Representative of Banten Province</i>	KD	1	1	2
15	BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus ibu kota (DKI) Jakarta/ <i>BPK Representative of the Province of Jakarta Capital Special Region (DKI)</i>	KD	1	1	2
16	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat/ <i>BPK Representative of West Java Province</i>	KD	1	1	2
17	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/ <i>BPK Representative of Central Java Province</i>	KD	1	1	2

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN-LANJUTAN

3. APPROACH TO DEVELOP FINANCIAL STATEMENTS-CONTINUED

No.	Nama Satker/Name of unit works	KP/KD	DIPA Eselon I/Echelon I DIPA		Jumlah Satker UAKPA/ Total UAKPA unit works
			Setjen/Sec Gen (01)	Pusat/Headquarter (02)	
18	BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta/BPK Representative of Special Province (D.I.) Yogyakarta	KD	1	1	2
19	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/BPK Representative of East Java Province	KD	1	1	2
20	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/BPK Representative of South Kalimantan Province	KD	1	1	2
21	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur/BPK Representative of East Kalimantan Province	KD	1	1	2
22	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/BPK Representative of Central Kalimantan Province	KD	1	1	2
23	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat/BPK Representative of West Kalimantan Province	KD	1	1	2
24	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara/BPK Representative of North Kalimantan Province	KD	1	1	2
25	BPK Perwakilan Provinsi Bali/BPK Representative of Bali Province	KD	1	1	2
26	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)/BPK Representative of West Nusa Tenggara (NTB) Province	KD	1	1	2
27	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)/BPK Representative of East Nusa Tenggara (NTT) Province	KD	1	1	2
28	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara/BPK Representative of North Sulawesi Province	KD	1	1	2
29	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/BPK Representative of Central Sulawesi Province	KD	1	1	2
30	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat/BPK Representative of West Sulawesi Province	KD	1	1	2
31	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/BPK Representative of South Sulawesi Province	KD	1	1	2
32	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/BPK Representative of Southeast Sulawesi Province	KD	1	1	2
33	BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo/BPK Representative of Gorontalo Province	KD	1	1	2
34	BPK Perwakilan Provinsi Maluku/BPK Representative of Maluku Province	KD	1	1	2
35	BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara/BPK Representative of North Maluku Province	KD	1	1	2
36	BPK Perwakilan Provinsi Papua/BPK Representative Papua Province	KD	1	1	2
37	BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat/BPK Representative West Papua Province	KD	1	1	2
38	Balai Diklat Medan*/Medan Training Center*	KD	1	-	1
39	Balai Diklat D.I. Yogyakarta*/Yogyakarta Training Center*	KD	1	-	1
40	Balai Diklat Makassar*/Makassar Training Center*	KD	1	-	1
Jumlah/Total			39	35	74

Keterangan:

*Berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam SK BPK No.3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke empat SK BPK No.14/K/I-XIII.2/9/2017 terdapat perubahan Organisasi dan Tata Pelaksana yaitu:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Diklat PKN).

Notes:

*Based on the organizational structure stated in the BPK Decree No.3/K/I-XIII.2/7/2014 as amended by the fourth amendment of the Decree of the Supreme Audit Agency No.14/K/I-XIII.2/9/2017 there is a change Organization and Implementation that is:

1. The Center of Education and Training changed to the Board of State Education and Training.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN-LANJUTAN

2. Balai Diklat Medan, Yogyakarta, dan Makassar berubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Balai Diklat PKN) Medan, Yogyakarta, dan Makassar.

4. BASIS AKUNTANSI

Dalam menyusun laporan keuangan, BPK menerapkan basis akrual Akuntansi untuk penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan oleh BPK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPK Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPK adalah sebagai berikut:

3. APPROACH TO DEVELOP FINANCIAL STATEMENTS-CONTINUED

2. *The Training Center of Medan, Yogyakarta, and Makassar was changed to Balai Diklat PKN (Training Center for PKN) Medan, Yogyakarta and Makassar.*

4. ACCOUNTING BASIS

In preparing the financial statements, BPK applies the accrual basis of Accounting for the preparation and presentation of Balance Sheet, Statement of Operations, and Statement of Changes in Equity as well as cash basis for preparation and presentation of Statement of Budget Realization. The accrual basis is an accounting basis that recognizes the effect of transactions and other events at the time the transactions and events occur, regardless of when cash or cash equivalents are received or paid. While the cash basis is the basis of accounting that recognizes the effect of transactions or other events when cash or cash equivalents are received or paid. This is in accordance with Government Accounting Standards that has been established with Government Regulation No.71 Year 2010 on Government Accounting Standards.

5. BASIS OF MEASUREMENT

Measurement is the process of determining the value of money to recognize and include each post in the financial statements. The measurement basis applied by BPK in the preparation and presentation of the Financial Statement is by use historical value.

Assets are recorded at the expense/use of economic resources or at fair value of the benefits provided for acquiring the asset. Liabilities are recorded at the fair value of economic resources used by the government to meet the obligations concerned.

Measurement of financial statement items using Indonesia rupiah currency. Transactions using foreign currencies are converted and denominated into Indonesia rupiah.

6. ACCOUNTING POLICIES

Preparation and presentation of BPK Financial Statements Year 2017 have been referred to Government Accounting Standards. The accounting policies are the principles, basics, conventions, rules and specific practices chosen by a reporting entity in the preparation and presentation of financial statements. The accounting policies adopted in these financial statements are the policies established by BPK. In addition, in the preparation has been applied rules of good financial management in the government environment.

The significant accounting policies used in the preparation of the BPK Financial Statements are as follows:

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

1. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum LRA Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-Laporan Operasional (LO)

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e) Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (TP/TGR) diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

1. Revenues-Statement of Budget Realization

Revenue-Statement of Budget Realization is all General Statement of Budget Realization Cash Account receipts that add more Budget Balance within the relevant fiscal year period to which the government is entitled and is not required to be repaid by the government. Revenue-Statement of Budget Realization is recognized when the cash is received in the State Treasury. The revenue-SoBR is executed on the basis of gross principle, by recording gross receipts, and not recording the net amount (after being offset). Revenue-Statement of Budget Realization is presented according to the classification of revenue sources.

2. Revenues-Statement of Operational

Revenue-Statement of Operational is a recognized central government right as an equity enhancer within the period of the fiscal year concerned and does not need to be repaid. Revenues-Statement of Operational are recognized when the right to revenue and/or Revenue is realized, ie the inflow of economic resources. In particular the revenue-Statement of Operational recognition to BPK is as follows:

- a) Training Service Revenue is recognized after the training is completed;*
- b) Building Rent Revenue is recognized proportionally between the value and the rental period;*
- c) Fines Income is recognized at the time of issuance of fines or other equivalent documents;*
- d) Revenues from the alienation of State of Goods shall be recognized upon the issuance of a decree of abolition or other equivalent documents;*
- e) Revenue Reduction for Losses suffered by the State (Indemnification of Treasury/Claims Bills) is recognized upon the issuance of Indemnification of Treasury/Claims Bills decree or other equivalent documents.*

The accounting revenue-Statement of Operational is carried out on a gross basis, by posting gross receipts, and not recording the net amount (after being offset). Revenue is presented according to the classification of revenue sources.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

3. Expenditure

Expenditure is all spending from the State General Treasury Account which reduces the Budget Balance Over within the relevant fiscal year period that the government will not be repaid. Expenditures is recognized when a cash outflow is made from KUN. Specific expenditures through the expenditure treasurer, expenditure recognition occurs when the accountability of such expenditures is authorized by The Office of State Treasury Services. Expenditures are presented by economic classification/type of expenditure and subsequent classifications by organization and function shall be disclosed in the Notes to the Financial Statements.

4. Expenses

Expenses are the decline in economic benefits or potential services in the reporting period that decrease the equity, which may be the expenditure or consumption of assets or the incurrence of liabilities. Expenses are recognized when an obligation arises; asset consumption occurring; the decline in economic benefits or potential services. Expenses are presented under the economic classification/type of expenditure and subsequent classifications by organization and function are disclosed in the Notes to the Financial Statements.

5. Assets

Assets are economic resources that are controlled and/or owned by the government as a result of past events and from which future economic and/or social benefits are expected to be gained, either by the government or by society, and can be measured in units of money, including the non-financial resources necessary for the provision of services to the general public and resources maintained for historical and cultural reasons. In the sense of this asset does not include natural resources such as forests, wealth on the seabed, and mining content. Assets are recognized upon receipt or when ownership rights move.

Assets are classified into Current Assets, Fixed Assets, Long-Term Receivables, and Other Assets.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:

1) Kas

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:

a) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

b) Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

- Pendapatan yang Belum Disetor
Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK, gaji), jasa giro, penerimaan PNBP, dan lain-lain yang belum disetorkan.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

a. Current Assets

Current Assets include cash and cash equivalents that are expected immediately to be realized, used or owned for sale within 12 (twelve) months from the date of reporting. These current assets, including:

1) Cash

Cash is presented on the balance sheet using the nominal value. Cash in foreign currencies are presented on the balance sheet using the middle rate of BI at the balance sheet date. Cash consists of:

a) Cash in the Spending Treasurer is cash that is controlled, managed and under the responsibility of the Spending Treasurer derived from the Remnant Advance from The Office of State Treasury Service which has not been accounted or reimbursed to the State Treasury as of the balance sheet date. Cash in the Spending Treasurer covers all account balances of treasurer of expenditures, coins, notes, and other cash whose source comes from Advance from The Office of State Treasury Service which has not been paid back to the State Treasury as of the balance sheet date.

b) Other Cash and Cash Equivalents include Other Cash in the Spending Treasurer, which is cash which is under the responsibility of the treasurer of expenditures not originating from the Advance from the The Office of State Treasury Service, whether the account balance in the bank or cash balance.

Other Cash and Cash Equivalents come from:

- *Unpaid Revenues*
State income received by the Expenditure Treasurer in a budget period but at the end of the fiscal year has not been deposited to the State Treasury, there are of taxes, returns on official travel expenses and personnel expenses (salaries, TKPK, salaries), demand deposits, Non-Tax Income receipts, and others that have not been deposited.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

a. Aset Lancar-Lanjutan

1) Kas (Lanjutan)

Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No.S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Utang pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai, serta uang lainnya yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal Neraca.

Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

- Utang Jangka Pendek Lainnya
Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.

2) Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan.

Belanja dibayar di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

a. Current Assets-Continued

1) Cash (Continued)

Especially for the refund expenditures of the current year which has not been paid yet, pursuant to the letter of the Director General of Treasury No.S-2875/PB.6/2016 dated April 5, 2016 explains that the unpaid Refunds Expenditures are recognized as a deduction for the related Expenses in the same period.

- *Debt to Other Third Parties*
The third party's payable in the Spending Treasurer is in the form of honorarium, salary/TKPK, unpaid food allowance to the employee, and other unpaid money to other third parties at Balance Sheet period.

Accounting Treatment is on the Asset Current side there are Other Cash and Cash Equivalents in the Spending Treasurer, while in the Short Term Liability there is Debt to Other Third Parties.

- *Other Short-Term Debts*
Tax withheld by the spending Treasurer but not yet paid to the State Treasury up to the date of reporting. Accounting Treatment is on the Asset Current side there are Other Cash and Cash Equivalents in the Spending Treasurer, while in the Short-Term Liabilities there is Unpaid Treasury Payable.

2) Prepaid Expenditures

Prepaid Expenditures are derived from the actual expenditures of the reporting year, but goods/services/facilities from third parties have not been fully received/enjoyed by the unit work.

Prepaid expenditures are derived from the realization of goods expenditures for lease of buildings with the lease term exceeding the reporting year.

Prepaid expenditures for more than one year do not need to be separated as individual accounts with maturities of less than 1 (one) year or more than 1 (one) year entirely recorded as current assets.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

a. Aset Lancar-Lanjutan

2) Belanja Dibayar Dimuka (Lanjutan)

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNBP dengan kebijakan yaitu:

a) Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu:

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

a. Current Assets-Continued

2) Prepaid Expenditures (Continued)

The method of calculating Expenditures for Prepaid Goods is the rental value divided by the total number of days of the lease multiplied by the remaining amount of unused rental days.

3) Receivables are expressed in the balance sheet according to the value arising

Accounts receivable are expressed in the balance sheet according to the value arising under the rights issued by the billing or equivalent letters which are expected to be returned within 12 (twelve) months after the date of reporting.

Receivables are from Non Taxes Received from non-tax state revenues up to the balance sheet date.

Non Tax Account Accounts should be identified whether they classified into the Unearned Revenue category or Non-Tax Income Receivables with the following policies:

a) Unearned Revenue is the revenue of Non-Tax Income based on accounting calculation has become the right of the government but there is no right to collect because it is not yet time to be paid/collected.

The accounting policies for Unearned Revenue are:

- *The basis for recognition is accounting or not through determination.*
- *A journal is conducted at the beginning of the next period.*
- *Not calculated allowance for Uncollectible Receivable*

BPK does not have an Unearned Revenue account.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

a. Aset Lancar-Lanjutan

- b) Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

- a. Piutang PNBPN adalah pendapatan PNBPN tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya. Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBPN yaitu:

- Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
- Tidak Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNBPN berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- b. Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi misalnya:

- Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas, serta
- Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

a. Current Assets-Continued

- b) *Non-Tax Receivables are receivables arising from non-tax state revenues that have not been paid until the end of the financial statement period.*

- a. *Non-Tax Income Receivables are Non-Tax Income income for the current year that should have been paid by the obligatory payers and have been collected by the government (due dated) but have not yet received the payment. The accounting policies for Non-Tax Income Receivables are:*

- *The basis for recognition is the Bills/Letter of Establishment/Equalization.*
- *No reverse journal was performed at the beginning of the next period.*
- *The allowance for uncollectible accounts is calculated.*

Non-Tax Income receivables are derived from the Office/Home Office Revenue Receipt, Building Revenue, Buildings and Warehouse Unpaid by the obligation to pay up to the balance sheet date, Excess payment of capital expenditures due to late settlement of work (paid by guarantee/Bank Guarantee).

- b. *Other Receivables come from accounts receivable from non-taxable receivables and Current Portion of Claims on Compensation for example:*

- *The excess of official travel expenses that have been accounted for is completed, but at the balance sheet date has not been resolved by the official travel officer, as well as*
- *Advantages of salary payment/TKPK to employees.*

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

a. Aset Lancar-Lanjutan

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas Negara.
- Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No.S- 2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- 4) Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang/ <i>Quality of Receivables</i>	Uraian/ <i>Descriptions</i>	Penyisihan/ <i>Allowance</i>
Lancar/ <i>Current</i>	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo/ <i>Not to be repaid until the maturity date</i>	0,50%
Kurang Lancar/ <i>Non Current</i>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month commencing from the date of the First Billing Letter not being repaid</i>	10%
Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month from date of the Second Receipt Letter is not repaid</i>	50%
Macet/ <i>Loss</i>	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month commencing from the date of the Third Tax Return is not redeemed</i> 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN/ <i>Receivables have been submitted to the State Receivables Management Committee/DJKN</i>	100%

- 5) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

a. Current Assets-Continued

The accounting policies for Other Receivables are as follows:

- No reverse journal was made at the beginning of the next period but at the time of deposit to the State Treasury.
- The allowance for uncollectible accounts is calculated.

In accordance with the letter of Director General of Treasury No.S- 2875/PB.6/2016 dated April 5, 2016 explains that the unpaid refunds are recognized as a deduction for the related Expenses during the same period.

- 4) Receivables are presented in the Balance Sheet at a realizable value. This is realized by establishing an allowance for doubtful accounts. The allowance is based on the quality of receivables determined on the basis of maturity and collection efforts by the government. The allowance is as follows:

- 5) Indemnification of Treasury/Claims which will mature 12 (twelve) months after the balance sheet date is presented as Current Section of Indemnification of Treasury/Claims Bills.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

a. Aset Lancar-Lanjutan

6) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- a. Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan;
- c. Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun secara fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang Persediaan.

Saldo Persediaan pada Eselon I BPK Pusat tetap disajikan jika terdapat anggaran Belanja Persediaan dan Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) dan tempat yang mengelola Persediaan. Jika tidak terdapat UAPKPB dan tempat pengelola Persediaan, tetapi memiliki anggaran, maka dilakukan transfer ke Eselon I Sekretariat Jenderal BPK.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

a. Current Assets-Continued

6) Inventory is a current asset in the form of goods or equipment in good condition intended to support the government's operational activities, and goods intended to be delivered in service to the public. Inventory Value is recorded based on the result of physical calculation at balance sheet date multiplied by:

- a. The last purchase price, when acquired by purchase;
- b. The cost of production if obtained by producing itself. In calculating the cost of production, standard cost can be used in terms of real cost calculation is difficult;
- c. Fair price or estimated sales value if obtained by other means.

In accordance with the accounting policy, inventory expenses are only calculated for general inventories, excluding inventories derived from goods purchases to be delivered to the public. For general inventories, the current year's inventory expenses include the remaining inventories in the warehouse with damaged or obsolete conditions. Although physical inventory still exists not counted as inventory balance. If the balance of the ending inventory which prior to the physical opname is greater than that of the physical hospital shall be recorded as a deduction of Inventory.

Inventory Balance at Echelon I Headquarter BPK will still be presented if there is a Inventory Expenditure and Accounting Power Assistance Subscriber Accounting Unit (UAPKPB) and a place that manages Inventories. If there is no UAPKPB and place of Inventory manager, but has budget, then transfer to Echelon I Secretariat General of BPK.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.215/PMK.05/2016, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- 1) Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

b. Fixed Assets

Fixed assets include all tangible assets utilized by the government or for the benefit of the public with a useful life of more than one year. Fixed assets include land; equipment and machinery; properties and buliding; roads, irrigation, and networks; other fixed assets; as well as Construction in Progress. The value of Property and Equipment is presented at cost or fair value. The recognition of property, plant and equipment is based on the value of the minimum capitalization unit as follows:

- 1) Expenditures of unit of equipment and machinery and sports equipment equal to or more than Rp300,000 (three hundred thousand rupiah);*
- 2) Expenditures on Properties and Buliding equal to or more than Rp10,000,000 (ten million rupiah);*
- 3) Expenditures not covered by the minimum capitalization limits mentioned above are treated as expenses except land, road/irrigation/network expenditures and other fixed assets in the form of library and art-related collections.*

As a result of the implementation of the asset capitalization policy, as stated in Regulation of the Minister of Finance No.215/PMK.05/2016, State of Goods data is divided into two categories:

- 1) List of State of Goods Intracomptables, including State of Goods in the form of fixed assets that meet the capitalization criteria and all State of Goods acquired prior to the enactment of capitalization policies, and State of Goods obtained through Incoming/ Receipt Transfers from Exchange/Inbound Transfer as well as State of Goodss transferred from the List of State of Goods Ekstrakomptabel at the time of accumulated value the cost of acquisition and development value has reached the minimum limit of capitalization.*

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

b. Aset Tetap-Lanjutan

- 2) Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

- 1) Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK).
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Pusdiklat BPK);
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Pusdiklat BPK);

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

b. Fixed Assets-Continued

- 2) *List of State of Goods Extracomptables, including State of Goods in the form of fixed assets that do not meet the criteria of capitalization.*

Equipment and machinery acquired prior to January 1, 2002, obtained since January 1, 2002 with a minimum unit value of more than or equal to Rp300,000 and derived from the transfer are capitalized as property, plant and equipment. Tools and Machines of this category are recorded and reported in the State of Goods List and Intracomptable State of Goods Report. Equipment and Machinery obtained since January 1, 2002 but the unit value of less than Rp300,000 is not capitalized as fixed assets. Equipment and machines of this category are recorded in the State of Goods List and State of Goods Reports of Extracomptables.

Other Fixed Assets include fixed assets that can not be grouped into Land groups; Equipment and Machinery; Building and Properties; Roads, Irrigation and Networks, acquired and utilized for government operations and in ready-to-use conditions. Assets included in the category of Other Fixed Assets are collections of libraries/books and non books, art/culture, animal, fish and plants.

Included in the category of Other Fixed Assets is Fixed Assets Renovation. Renovations can be made to all property in the fixed asset group. In the case where the Renovated Fixed Asset meets the capitalization criteria and not the property of a working unit, the renovation is recorded as Renovate Fixed Assets.

Fixed Assets Renovations Account in BPK occur due to 3 things:

- 1) *Renovation of fixed assets belonging to other unit works in one K/L (BPK). unit works undertaking renovations (the Secretariat General working unit) do not record them as additions to the related fixed asset value due to the ownership of such fixed assets in other unit works (BPK Provincial Representative/Pusdiklat BPK); unit works undertaking renovations (the Secretariat General working unit) do not record them as additions to the related fixed asset value due to the ownership of such fixed assets in other unit works (BPK Provincial Representative/Pusdiklat BPK);*

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

b. Aset Tetap-Lanjutan

- 2) Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;

Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- 3) Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

b. Fixed Assets-Continued

- 2) *Renovation of fixed assets belonging to other K/L unit works.*

unit works undertaking renovations (BPK unit works) do not record them as additions to the related fixed asset value due to the ownership of such fixed assets in other working units of K/L;

In point 1) and 2) when the renovation has been completed before the reporting date it will be recorded as Other Fixed Assets-Renovations and Present Assets and presented on the balance sheet as Fixed Assets group. Up to the date of reporting the renovation is still under construction, or has been completed but not yet handed over (from contractor to BPK units works), it will be recorded as Construction In Progress.

- 3) *Renovations of fixed assets owned by other government agencies (Local Government) and Renovations of fixed assets owned by other parties other than the government (Private, BUMN/BUMD, Foundation, and others).*

unit works undertaking renovations (BPK unit works) do not record them as additions to the related fixed asset value due to the ownership of such fixed assets to others.

If the renovation has been completed prior to the reporting date it will be recorded as Other Fixed Assets-Renovations and Assets Renovated and presented on the balance sheet as a Group of Property Assets. Up to the date of reporting the renovation is still under construction, or has been completed but not yet handed over (from contractor to BPK), it will be recorded as Construction In Progress.

Fixed assets (including Renewal Assets) terminated from active use of the government do not meet the definition of fixed assets and must be transferred to Other Assets item at their carrying amount.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

b. Aset Tetap-Lanjutan

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

b. Fixed Assets-Continued

Fixed Assets Unused in government operations caused by, among others, worn out, out of date with the needs of the growing organization, severely damaged, inconsistent with the General Spatial Plan, or their useful life has ended up reclassified to Assets Others on Other Assets post.

Fixed assets that are permanently discontinued, are removed from the balance sheet at the time of any proposed removal from the entity in accordance with the provisions of legislation in the management of State of Goods.

c. Depreciation of Fixed Assets

Depreciation of property and equipment is a value adjustment in relation to the decrease in the capacity and benefits of a fixed asset. Depreciation policy of fixed assets is based on Regulation of the Minister of Finance No.65/PMK.06/2017 concerning Depreciation of State Property in the Form of Fixed Assets in Central Government Entities.

Depreciation of Fixed Assets is done for:

- a. *Present the value of the Property Equivalent Assets in accordance with the economic benefits of assets in the Central Government Financial Statements;*
- b. *Knowing the potential of State of Goods by reporting the remainder The expected benefits of a State of Goods can be obtained in the next few years;*
- c. *Provide a more systematic and logical approach to budgeting maintenance expenditures or capital expenditures to replace or add to existing fixed assets.*

Depreciation of fixed assets is not carried out against:

- a. *Land*
- b. *Construction in Progress*
- c. *Fixed Assets declared to be lost on the basis of valid source documents or in conditions of serious damage and/or obsolescence that have been proposed to the Goods Manager for removal;*

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

c. Penyusutan Aset Tetap (Lanjutan)

- d. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
- e. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- f. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan No.59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Taksiran Masa Manfaat/
Estimated Useful Live**

Peralatan dan Mesin
 Gedung dan Bangunan
 Jalan, Jaringan dan Irigasi
 Aset Tetap Lainnya
 (Alat Musik Modern)

2-20 tahun/years
 10-50 tahun/years
 5-40 tahun/years
 4 tahun/years

Equipment and Machine
 Buildings and Properties
 Roads, Network and Irrigation
 Other Fixed Assets
 (Modern Musical Instruments)

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

c. Depreciation of Fixed Assets (Continued)

- d. Fixed Assets in a heavily and/or obsolete condition that has been proposed to the Goods Manager or the Goods Users in accordance with their authority for alienation, destruction or removal;
- e. Fixed Assets Renovation of Land; and
- f. Fixed Assets Renovations that do not add to the Benefit Period. The calculation and recording of Depreciation of Fixed Assets shall be done at the end of each semester without taking into account the residual value.

Depreciation of Fixed Assets is done using the straight-line method by allocating depreciable value of fixed assets equally each semester during the Benefit Period.

The Useful Life of Fixed Assets is determined by referring to Decree of the Minister of Finance No.59/KMK.06/2013 concerning Table of Benefit Period in the Framework of Depreciation of State Property in the form of Fixed Assets in Central Government Entities. In general, the useful life table is as follows:

d. Long-Term Receivables

Long-term Receivables are receivable that will be due or will be realized more than 12 months from the date of reporting. Included in Long-term Receivables are Accounts Receivable Indemnification of Treasury/Claims Bills that are due for more than one year.

Treasury Demands shall be claims set by the State Audit Board to treasurers who due to negligence or unlawful acts result in losses of the State/region.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

d. Piutang Jangka Panjang (Lanjutan)

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya ini meliputi:

1. Aset Tak Berwujud meliputi *software* lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi yang terjadi pada Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud yang diperoleh tahun 2016 menjadi beban amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. Amortisasi yang terjadi pada Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2016 dilakukan dengan mengoreksi nilai Ekuitas tahun sebelumnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

d. Long-Term Receivables (Continued)

Indemnification Claims is a process done to a civil servant or not a treasurer of a treasurer in order to claim the replacement of a loss suffered by the state as a direct or indirect consequence of an act which is unlawful by the employee or the negligence in the execution the task.

Indemnification of Treasury/Claims receivables that have been submitted to the Ministry of Finance in this case DJKN, since the loss is recorded as Indemnification of Treasury/Claims bills.

e. Other Assets

Other Assets are government assets other than current assets, fixed assets, and long-term receivables. Other Assets include:

1. *Intangible assets include software, licenses, and other Intangible Assets. Intangible Assets are identifiable assets that have no physical form and are held for use in the production of goods or services or used for other purposes including intellectual property rights. Intangible Assets are stated at net carrying amount at cost less amortization.*

On Other Assets-Intangible Assets is amortized starting 2016 in accordance with Regulation of the Minister of Finance No.251/PMK.06/2015 on Amortization Procedures of State Property in the form of Intangible Assets of Government Entities. Amortization occurring on Other Assets-Intangible Assets acquired in 2016 becomes the amortization expense of Other Assets-the Intangible Assets concerned. Amortization occurring on Other Assets-Intangible Assets acquired prior to 2016 is effected by adjustment the value of the previous year's Equity.

The amortization of Intangible Assets with a limited useful life is performed on a straight-line method and residual value of nil. While on Intangible Assets with unlimited period of utilization is not made amortization.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

5. Aset-Lanjutan

e. Aset Lainnya (Lanjutan)

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No.620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Software Komputer	4 tahun/years	Computer Software
Franchise	5 tahun/years	Franchise
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun/years	License, Simple Patent, Brand, Industrial Design, Trade Secret, Layout Design of Integrated Circuit.
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun/years	Economic Rights of Broadcasting Institution, Common Patents, Crop Variety Protection Annual.
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25 tahun/years	Copyright of Applied Art Works, Annual Plant Variety Protection.
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram.	50 tahun/years	Copyright on Goal Creation.II, Economic Rights Performer Performance, Economic Rights Procedur Phonogram.
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun/years	Copyright on Gol Creation.I

2. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

- 1) Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:
 - Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

5. Assets-Continued

e. Other Assets (Continued)

The useful life of Intangible Assets is determined by referring to Decree of the Minister of Finance No.620/KMK.6/2015 on The Useful life for the Amortization of State Assets in the form of Intangible Assets in Government Entities. In general, the useful life table is as follows:

**Taksiran Masa Manfaat/
Estimated Useful Life**

4 tahun/years	Computer Software
5 tahun/years	Franchise
10 tahun/years	License, Simple Patent, Brand, Industrial Design, Trade Secret, Layout Design of Integrated Circuit.
20 tahun/years	Economic Rights of Broadcasting Institution, Common Patents, Crop Variety Protection Annual.
25 tahun/years	Copyright of Applied Art Works, Annual Plant Variety Protection.
50 tahun/years	Copyright on Goal Creation.II, Economic Rights Performer Performance, Economic Rights Procedur Phonogram.
70 tahun/years	Copyright on Gol Creation.I

2. Other Assets in the form of government fixed assets that are discontinued from the operational use of the entity and are presented at book value at cost less accumulated depreciation.

6. Liabilities

Liability is a debt arising from past events whose settlement resulted in a flow of government economic resources. Government liabilities are classified into short-term liabilities and long-term liabilities.

a. Short-Term Liabilities

An liabilities are classified as a short-term liability if expected to be paid or due within twelve months after the date of reporting. Short-term liabilities in BPK financial management consist of:

- 1) Payable to Third Parties from:
 - Accrued expenditures consisting of employee expenditures, goods expenditures, and capital expenditures.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

6. Kewajiban-Lanjutan

a. Kewajiban Jangka Pendek-Lanjutan

- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

2) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan diterima dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

6. Liabilities-Continued

a. Short-Term Liabilities-Continued

- Debt to Other Third Parties which is the contra-account counter from Other Cash in the Spending Treasurer.

This liabilities accrued because the right to goods/services has been received and enjoyed and/or the commitment agreement has been made by the state ministries/Institutions/government, but until the end of the reporting period has not been paid/settlement/realization of the rights/agreements/commitments. Specifically for the accrued capital expenditures does not affect the burden of the operational report, but simultaneously with the recognition of the accrued capital expenditure an asset is recognized. Thus, if any unearned assets are recognized as liabilities.

At the time of payment of expenditures accrued in the previous year, adjustments are made by debiting the accrued expense account and crediting the expense account on the same date. In the event that the adjustment can not be made on the date of the transaction, it must be calculated at the end of the year to determine the value of the adjusting entries.

2) Deferred Revenues

Revenue received in advance are tax revenues and/or non-tax revenues already received in the state treasury account but are not yet entirely entitled to the government because they are still inherent in the government's obligation to provide future goods/services to third parties or any excess payment by third parties but not been restored. Revenue received in advance at the BPK is in the form of Rental Income Received Upfront. Rental Income Accepted Advance for more than one year is not separated as a separate account whose terms of less than 1 (one) year or more than 1 (one) year are all recorded as short-term liabilities.

A. UMUM-LANJUTAN

A. GENERAL-CONTINUED

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI-LANJUTAN

6. Kewajiban-Lanjutan

a. Kewajiban Jangka Pendek-Lanjutan

Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.

3) Uang Muka dari KPPN

Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kontra akun Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari pajak yang sudah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Sampai saat ini BPK tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

6. ACCOUNTING POLICIES-CONTINUED

6. Liabilities-Continued

a. Short-Term Liabilities-Continued

The method of calculating the Rent Revenue received in advance is the amount of remaining days of rental period not used yet by the Third Party divided by the total number of days multiplied by the rent paid by the third party.

3) Advance from The Office of State Treasury Service

The Advance Payment Account of The Office of State Treasury Service is the amount of cash in the Spending Treasurer derived from the Inventory money and Additional Inventory Money used to pay personnel expenditures, goods expenditures and capital expenditures.

4) Other Short-Term Payable

Other Short Term payable contra-account is the counter of other Cash and Cash Equivalents account derived from taxes already withheld by the Spending Treasurer but not yet paid to the State Treasury up to the Balance Sheet date.

b. Long-Term Liabilities

Liabilities are classified as long-term liabilities if expected to be paid or matured more than twelve months after the date of reporting. Liabilities are recorded at nominal value, which is the value of the government's liabilities at the first transaction. To date, BPK has no Long-Term Liabilities.

7. Equity

Equity represents the difference between assets and liabilities in a period. Beginning Balance of Equity represents the Equity Value derived from the value of the Equity at the End of the previous year.

Further disclosures of equity are presented in the Statement of Changes in Equity.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION
--	---

1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode TA 2017, BPK telah melakukan revisi Daftar Isian Umum LRA Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari penetapan awalnya. Hal ini disebabkan adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan estimasi pendapatan dan anggaran belanja TA 2017 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

1. GENERAL STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION

During the period of FY 2017, BPK has revised the General Statement of Budget Realization List of Budget Implementation from its initial determination. This is due to the program of government spending savings and changes in activities in accordance with the needs and situations and conditions at the time of implementation. Changes in FY 2017 revenue and expenditure estimates based on source of income and type of expenditure are as follows:

No	Pendapatan dan Belanja/ Revenue and Expenditure	Estimasi dan Anggaran Awal/ Estimation and beginning budget	Estimasi dan Anggaran Setelah Revisi/ Estimation and Budget After Revision
1	Pendapatan/Revenues	3.645.975.000	3.645.975.000
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak/ Non-Tax Income	3.645.975.000	3.645.975.000
	- Hibah/Grants	-	-
2	Belanja/Expenditures	2.744.888.635.000	2.806.880.353.000
	- Belanja Pegawai/ Employee Expenditure	1.172.492.488.000	1.199.201.134.000
	- Belanja Barang/Goods Expenditure	1.446.141.864.000	1.459.072.200.000
	- Belanja Modal/Capital Expenditure	126.254.283.000	148.607.019.000

Estimasi/anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Estimates/budgets and realization of FY 2017 revenues and expenditures are as follows:

No	Pendapatan dan Belanja/ Revenues and Expenditure	Estimasi dan Anggaran/ Estimation and Budget	Realisasi (Netto)/ Realization (Neto)	% Realisasi/ % Realization
1	Pendapatan/Revenues	3.645.975.000	20.126.781.224	552,03%
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak/ Non-Tax Income	3.645.975.000	20.126.781.218	552,03%
	- Hibah/Grants	-	-	-
2	Belanja/Expenditures	2.806.880.353.000	2.670.558.146.116	95,14%
	- Belanja Pegawai/ Employee Expenditure	1.199.201.134.000	1.135.348.569.875	94,68%
	- Belanja Barang/Goods Expenditure	1.459.072.200.000	1.387.394.996.562	95,09%
	- Belanja Modal/Capital Expenditure	148.607.019.000	147.814.579.679	99,47%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
--	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan dan Hibah pada TA 2017 adalah sebesar Rp20.126.781.218 atau mencapai 552,03% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.645.975.000. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, Pendapatan Iuran dan Denda, dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan TA 2017 adalah sebagai berikut:

2. DESCRIPTIONS OF ACCOUNT STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION

2.1. Revenue

Actual Revenues and Grants in FY 2017 amounted Rp20,126,781,218 or 552.03% of the estimated revenue of Rp3,645,975,000. This income consists of Revenues from State of Goods Management, Service Revenue, Earnings and Fee Income, and Other Income.

The details of the estimated and realized revenues of FY 2017 are as follows:

No	Uraian Pendapatan dan Hibah/ Descriptions Revenues and Grants	Estimasi Pendapatan/ Estimation Revenues	Realisasi Pendapatan/ Realization Revenues	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi (42311)/Production Revenue (42311)	14.625.000	-	-
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42312)/Revenue from Transfer to BMN (42312)	355.000.000	2.100.245.872	591,62%
3	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42314)/Revenue from BMN Utilization (42314)	658.200.000	1.453.658.343	220,85%
4	Pendapatan Jasa I (42321)/Service Revenues I (42321)	2.618.150.000	4.047.490.000	154,59%
5	Pendapatan Jasa II (42322)/Service Revenues II (42322)	-	229.205	-
6	Pendapatan Jasa Lainnya (42329)/Other Service Revenues (42329)	-	3.512.112.086	-
7	Pendapatan Denda (42375)/Fine Revenues (42375)	-	176.620.816	-
8	Pendapatan Pelunasan Piutang (42392)/Receivable Repayment Revenues (42392)	-	468.131.123	-
9	Penerimaan Kembali Belanja TAYL II (42395)/Revenues Back Expenditure Budget FY Year Ago II (42395)	-	8.335.917.181	-
10	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiun (42397)/Payable Residual Revenues from Pension (42397)	-	300.000	-
11	Pendapatan Lain-Lain (42399)/Others Revenues (42399)	-	32.076.592	-
Jumlah/Total		3.645.975.000	20.126.781.218	552,03%

Realisasi Pendapatan TA 2017 melampaui estimasi pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN yang berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (423122) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (423129);
2. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (423141);

Realization FY 2017 revenues exceeded the estimated earnings consisting of:

1. Revenues from the Alienation of State of Goods arising from Revenue from Equipment and Machinery Sales (423122) Revenue from the Transfer of Other State of Goods (423129);
2. Revenue from State of Goods Utilization comes from Land Rental, Building and Properties (423141);

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
--	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

2.1. Pendapatan-Lanjutan

3. Pendapatan Jasa I berasal dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (423216);
4. Pendapatan Jasa II berasal dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro (423221);
5. Pendapatan Jasa Lainnya yang berasal dari Pendapatan Jasa Lainnya (423291);
6. Pendapatan Denda berasal dari Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (423752);
7. Pendapatan Pelunasan Piutang berasal dari Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara (423921) dan Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (423922);
8. Penerimaan Kembali Belanja TAYL II berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (423951), Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (423952) dan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (423953);
9. Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan berasal dari Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (423971); dan
10. Pendapatan Lain-lain berasal dari Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka gaji (423991) dan Pendapatan Anggaran Lain- lain (423999).

Realisasi pendapatan TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp8.421.507.395 atau sebesar 29,50% dari realisasi pendapatan TA 2016 sebesar Rp28.548.288.613 dengan rincian sebagai berikut:

2. DESCRIPTIONS OF ACCOUNT STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED

2.1. Revenue-Continued

3. Service Revenue I comes from Revenue Service, Employment, Information, Training and Technology Services in accordance with the Tasks and Functions of each State Ministry/Institution (423216);
4. Service Revenue II comes from the Financial Services Service/Interest Income Revenue (423221);
5. Other Services Income derived from Other Services Revenues (423291);
6. Fines Income is derived from Fines Income of Delay in Government Work Completion (423752);
7. Receivable Amount Receivable is derived from Non-Treasurer's Solve of Indemnification Claim Income (423921) and Indemnification of Treasury Income (423922);
8. FYTA II Revenue Back Expenditure from FYTA Employee Return Recovery (423951), FYTA Goods Return Recovery (423952) and FYTA Capital Expenditure (423953);
9. Remittance Revenue from Pensioners is derived from the Deposit Revenue from Non-Indemnification of Treasury/Claims Bills Pension of civil servants (423971); and
10. Other Revenues come from the Acceptance of Advance/Advance payroll (423991) and Other Budget Revenue (423999).

Realization of FY 2017 revenues decreased by Rp8,421,507,395 or 29.50% of total revenue of FY 2016 amounting to Rp28,548,288,613. Comparison of realization of FY 2017 dan 2016 the details are as follows:

No	Uraian Pendapatan & Hibah/ Descriptions Revenues & Grants	TA 2017/ FY 2017	TA 2016/ FY 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
				Rp	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42312)/Revenues from Transfer to BMN (42312)	2.100.245.872	3.771.922.352	(1.671.676.480)	-44,32%
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42314)/Revenue from BMN Utilization (42314)	1.453.658.343	1.450.712.917	2.945.426	0,20%
3	Pendapatan Jasa I (42321)/Service Revenue I (42321)	4.047.490.000	4.876.300.000	(828.810.000)	-17,00%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN **B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED**

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

2. DESCRIPTIONS OF ACCOUNT STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED

2.1. Pendapatan-Lanjutan

2.1. Revenue-Continued

No	Uraian Pendapatan & Hibah/ Descriptions Revenues & Grants	TA 2017/ FY 2017	TA 2016/ FY 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
				Rp	%
4	Pendapatan Jasa II (42322)/Service Revenue II (42322)	229.205	383.203	(153.998)	-40,19%
5	Pendapatan Jasa Lainnya (42329)/Other Service Revenue (42329)	3.512.112.086	26.800.000	3.485.312.086	13004,90%
6	Pendapatan Denda (42375)/Fine Revenues (42375)	176.620.816	534.200.078	(357.579.262)	-66,94%
7	Pendapatan Pelunasan Piutang (42392)/Receivable Repayment Revenues (42392)	468.131.123	673.980.036	(205.848.913)	-30,54%
8	Penerimaan Kembali Belanja TAYL II (42395)/Revenues Expenditure FY Year Ago II (42395)	8.335.917.181	17.211.231.355	(8.875.314.174)	-51,57%
9	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiun (42397)/Payable Residual Revenues from Pension (42397)	300.000	-	300.000	-
10	Pendapatan Lain-Lain (42399)/Others Revenues (42399)	32.076.592	2.758.672	29.317.920	1062,75%
Jumlah/Total		20.126.781.218	28.548.288.613	(8.421.507.395)	-29,50%

Penurunan realisasi pendapatan TA 2017 dibanding realisasi pendapatan TA 2016 antara lain disebabkan:

The decrease in the realization of FY 2017 revenues compared to the realization of FY 2016 revenue is due, among others:

1. Penurunan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN yang berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (423129);
2. Penurunan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (423141);
3. Penurunan Pendapatan Jasa I yang berasal dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (423216);
4. Penurunan Pendapatan Jasa II yang berasal dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (423221);
5. Penurunan Pendapatan Denda yang berasal dari Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (423752);

1. Decrease of Revenues from the alienation of State of Goods arising from Revenues from the alienation of Other State of Goods (423129);
2. Decrease of Revenues from Utilization of State of Goods is derived from Land Rental Revenues, Properties and Buliding (423141);
3. Decreased Service Revenue I derived from Revenue Service, Employment, Information, Training and Technology Services in accordance with the Tasks and Functions of each State Ministry/Institution (423216);
4. Decrease in Service Revenue II derived from Financial Institution Revenue (Interest Income) (423221);
5. Decrease of Fines Income derived from Fines Income of Delay in Completion of Government Work (423752);

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
---	---

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

2.1. Pendapatan-Lanjutan

6. Penurunan Pendapatan Pelunasan Piutang yang berasal dari Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara (423921);
7. Penurunan Penerimaan Kembali Belanja TAYL II yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (423952) dan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (423953);

2.2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp2.670.558.146.116 atau 95,14% dari anggaran belanja sebesar Rp2.806.880.353.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja serta pengembalian Belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

2. DESCRIPTIONS OF ACCOUNT STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED

2.1. Revenue-Continued

6. Decrease in Revenue from Receivables arising from Non-Treasurer's Indicent Indemnity Income (423921);
7. Decrease of FYTA II Revenue Back Expenditure from FYTA Goods Return (423952) and FYTA Capital Expenditures Back (423953);

2.2. Expenditure

Expenditures realization in FY 2017 amounted Rp2,670,558,146,116 or 95.14% of the budget of Rp2,806,880,353,000.

The details of budget and expenditure realization and refund of Expenditure FY 2017 are as follows:

Kode/ Code	Uraian/ Descriptions	TA 2017/FY 2017		
		Anggaran/Budget	Realisasi/Realization	%
1	Belanja Pegawai/ Employee Expenditure	1.199.201.134.000	1.145.890.242.093	95,55%
2	Belanja Barang/ Goods Expenditure	1.459.072.200.000	1.399.364.905.901	95,91%
3	Belanja Modal/ Capital Expenditure	148.607.019.000	147.814.579.679	99,47%
	Jumlah Belanja Bruto/ Total Bruto Expenditure	2.806.880.353.000	2.693.069.727.673	95,95%
	Pengembalian Belanja/ Return Expenditure	-	22.511.581.557	-
	Jumlah Belanja Netto/ Total Net Expenditure	2.806.880.353.000	2.670.558.146.116	95,14%

Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The details of budget and expenditure realization by program type can be seen in the following table:

Kode/ Code	Uraian/ Descriptions	TA 2017/FY 2017		
		Anggaran/Budget	Realisasi/Realization	%
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK/ Management Support Program and Implementation of Other Technical Duties of BPK	1.639.762.537.000	1.561.611.181.682	95,23%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK/ Program Improvement of Facilities and Infrastructure Apparatus of BPK	434.706.348.000	425.763.560.685	97,94%
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK/ BPK Apparatus Supervision and Improvement Program	14.085.314.000	13.034.751.022	92,54%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN **B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED**

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

2. DESCRIPTIONS OF ACCOUNT STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED

2.2. Belanja-Lanjutan

2.2. Expenditure-Continued

Kode/ Code	Uraian/ Descriptions	TA 2017/FY 2017		
		Anggaran/Budget	Realisasi/Realization	%
06	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Konsultasi Hukum di Bidang Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah/Registrar's Program of State/Local Loss, Development and Legal Consultation Service in the Field of Legal Consultation Service and Registrar of State/Territory Losses	10.780.830.000	10.645.360.729	98,74%
07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Program of Institutional Quality Improvement, Apparatus and Audit of State Finance	21.779.098.000	21.407.122.160	98,29%
08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara/State Finance Audit Program	685.766.226.000	638.096.169.838	93,05%
Jumlah/Total		2.806.880.353.000	2.670.558.146.116	95,14%

Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp429.502.585.115 atau 13,85% dari realisasi belanja TA 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Realized Expenditures for FY 2017 decreased by Rp429,502,585,115 or 13.85% of actual expenditure of FY 2016 with details as follows:

No	Uraian Pendapatan & Hibah/ Descriptions Revenues & Grants	TA 2017/ FY 2017	TA 2016/ FY 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
				Rp	%
51	Belanja Pegawai/ Employee Expenditure	1.135.348.569.875	1.062.986.731.819	72.361.838.056	6,81%
52	Belanja Barang/ Goods Expenditure	1.387.394.996.562	1.406.583.077.734	(19.188.081.172)	-1,36%
53	Belanja Modal/ Capital Expenditure	147.814.579.679	630.490.921.678	(482.676.341.999)	-76,56%
Jumlah/Total		2.670.558.146.116	3.100.060.731.231	(429.502.585.115)	-13,85%

Kenaikan/penurunan realisasi belanja TA 2017 dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2016 antar lain disebabkan:

The increase/decrease of expenditure realization of FY 2017 as compared to the realization of FY 2016 expenditure among others due to:

1. Kenaikan realisasi belanja pegawai, khususnya belanja gaji dan tunjangan pegawai.
2. Penurunan realisasi belanja barang khususnya belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
3. Penurunan realisasi belanja modal terjadi karena adanya penurunan dari rencana awal penganggaran atas belanja modal.

1. *The increased realization of employee expenditures, in particular salary expenditure and employee benefits.*
2. *The decrease in realization of goods expenditures, especially non-operational goods expenditure, service spending, maintenance expenditures, domestic and overseas travel expenditures.*
3. *The decrease in capital expenditure realization occurred due to a decrease from the initial plan of budgeting on capital expenditure.*

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
--	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

2.2. Belanja-Lanjutan

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2017 adalah sebesar Rp1.135.348.569.875 atau 94,68% dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.199.201.134.000. Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 ini mengalami kenaikan sebesar Rp72.361.838.056 atau 6,81% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2016 sebesar Rp1.062.986.731.819.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Penambahan jumlah pegawai penunjang dan pemeriksa BPK baik pada satker perwakilan maupun kantor pusat.
- b. Tunjangan kinerja pegawai yang mengalami peningkatan.
- c. Peningkatan uang lembur pegawai.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

2. DESCRIPTIONS OF ACCOUNT STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED

2.2. Expenditure-Continued

1. Employee Expenditure

Realization of Employee Expenditures in FY 2017 amounted Rp1,135,348,569,875 or 94.68% of the Employee Expenditure budget of Rp1,199,201,134,000. Realization of Employees Expenditures FY 2017 increased by Rp72,361,838,056 or 6.81% of the realization of FY 2016 Employees Expenditure amounting to Rp1,062,986,731,819.

This is due to among others by:

- a. Additional number of supporting and supervisory staff of BPK both at representative unit work and head office.
- b. Employee performance benefits that are improving.
- c. Increased employee overtime pay.

Details of comparison of Employee Expenditure realization of FY 2017 dan 2016 are as follows:

No	Uraian/Descriptions	TA 2017/ FY 2017	TA 2016/ FY 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
				Rp	%
5111	Belanja Gaji & Tunjangan PNS/Salary Expenditures & Civil Servant Allowance	376.266.584.246	374.312.571.982	1.954.012.264	0,52%
5113	Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara/Salary Expenditures & Allowance of State Officials	3.904.278.771	3.676.149.738	228.129.033	6,21%
5122	Belanja Lembur/ Overtime Expenditure	7.289.251.237	7.173.826.000	115.425.237	1,61%
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito/Expenditures special Allowance & Expenditure of Transito Officers	758.430.127.839	688.160.190.424	70.269.937.415	10,21%
Realisasi Belanja Bruto/ Realization Gross Expenditure		1.145.890.242.093	1.073.322.738.144	72.567.503.949	6,76%
Pengembalian Belanja/ Return Expenditure		10.541.672.218	10.336.006.325	205.665.893	1,99%
Realisasi Belanja Netto/ Realization Net Expenditure		1.135.348.569.875	1.062.986.731.819	72.361.838.056	6,81%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
--	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

2.2. Belanja-Lanjutan

2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada TA 2017 adalah sebesar Rp1.387.394.996.562 atau 95,09% dari anggaran Belanja Barang Rp1.387.395 sebesar Rp1.459.072.200.000. Realisasi Belanja Barang TA 2017 ini mengalami penurunan sebesar Rp19.188.081.172 atau 1,36% dari realisasi Belanja Barang TA 2016 sebesar Rp1.406.583.077.734. Hal ini disebabkan antara lain efisiensi proses pengadaan barang dan jasa.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

2. DESCRIPTIONS OF ACCOUNT STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED

2.2. Expenditure-Continued

2. Goods Expenditures

Realization of Goods expenditures in FY 2017 amounted Rp1,387,394,996,562 or 95.09% of the Goods Expenditure budget of Rp1,387,395 for Rp1,459,072,200,000. Realization of Goods Expenditures for FY 2017 has decreased by Rp19,188,081,172 or 1.36% from actual Expenditure of FY 2016 for Rp1,406,583,077,734. This is caused among others efficiency of procurement process of goods and services.

Details of the comparison of expenditures for Goods FY 2017 dan 2016 are follows:

No	Uraian/Descriptions	TA 2017/ FY 2017	TA 2016/ FY 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
				Rp	%
5211	Belanja Barang Operasional/ <i>Expenditures Operational Goods</i>	179.663.927.504	172.020.030.883	7.643.896.621	4,44%
5212	Belanja Barang Non Operasional/ <i>Expenditures Non Operational Goods</i>	215.788.816.939	212.769.908.325	3.018.908.614	1,42%
5218	Belanja Barang Persediaan/ <i>Expenditures Inventory Goods</i>	42.203.433.663	44.117.749.417	(1.914.315.754)	-4,34%
5221	Belanja Jasa/ <i>Service Expenditures</i>	121.603.544.231	126.238.607.699	(4.635.063.468)	-3,67%
5231	Belanja Pemeliharaan/ <i>Maintenance Expenditures</i>	120.642.042.633	111.574.027.666	9.068.014.967	8,13%
5241	Belanja Perjalanan/ <i>Travel Expenditures</i>	681.973.155.434	715.566.003.055	(33.592.847.621)	-4,69%
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri/ <i>Travel Overseas Expenditures</i>	37.489.985.497	48.429.956.635	(10.939.971.138)	-22,59%
Realisasi Belanja Bruto/ Realization Gross Expenditure		1.399.364.905.901	1.430.716.283.680	(31.351.377.779)	-2,19%
Pengembalian Belanja/ <i>Return Expenditure</i>		11.969.909.339	24.133.205.946	(12.163.296.607)	-50,40%
Realisasi Belanja Netto/ Realization Net Expenditure		1.387.394.996.562	1.406.583.077.734	(19.188.081.172)	-1,36%

Realisasi Belanja Barang (52) TA 2017 yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp2.489.014.633 dengan rincian sebagai berikut:

Realized Goods expenditures (52) FY 2017 which is capitalized into property and equipment is Rp2,489,014,633 with details as follows:

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
--	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

2.2. Belanja-Lanjutan

2. Belanja Barang-Lanjutan

No	Uraian	Rp	Description
1.	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	729.087.309	Capitalization of Equipment and Machines
2.	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	1.630.726.324	Capitalization of Building and Properties
3.	Kapitalisasi pada Jalan dan Jembatan	65.626.000	Capitalization of Roads and Bridge
4.	Kapitalisasi pada Jaringan	36.575.000	Capitalization of Network
5.	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	27.000.000	Capitalization of Other Fixed Assets
Jumlah		2.489.014.633	Total

3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 adalah sebesar Rp147.814.579.679 atau 99,47% dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp148.607.019.000. Realisasi Belanja Modal TA 2017 ini mengalami penurunan sebesar Rp482.676.341.999 atau 76,56% dari realisasi Belanja Modal TA 2016 sebesar Rp630.490.921.678. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran belanja modal BPK pada tahun 2017.

Realisasi perbandingan Belanja Modal pada TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

3. Capital Expenditures

Realization of Capital Expenditure in FY 2017 amounted Rp147,814,579,679 or 99.47% of the Capital Expenditure budget of Rp148,607,019,000. The actual capital expenditure of FY 2017 has decreased by Rp482,676,341,999 or 76.56% from the actual expenditure of Capital Expenditure FY 2016 amounting to Rp630,490,921,678. This is due to the decrease of the capital budget ceiling of BPK by 2017.

The realization of comparison of Capital Expenditure in FY 2017 dan 2016 is as follows:

No	Uraian/Descriptions	TA 2017/ FY 2017	TA 2016/ FY 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
				Rp	%
5311	Belanja Modal Tanah/Land Capital Expenditures	-	78.289.325.000	(78.289.325.000)	-100,00%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Equipment and Machine Capital Expenditures	97.211.346.745	369.799.641.994	(272.588.295.249)	-73,71%
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan/Building and Properties Capital Expenditures	41.483.835.707	139.014.131.751	(97.530.296.044)	-70,16%
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan/Road, Irrigation, and Network Capital Expenditures	-	323.730.100	(323.730.100)	-100,00%
5361	Belanja Modal Lainnya/Other Capital Expenditures	9.119.397.227	43.064.092.833	(33.944.695.606)	-78,82%
Realisasi Belanja Bruto/ Realization Gross Expenditure		147.814.579.679	630.490.921.678	(482.676.341.999)	-76,56%
Pengembalian Belanja/ Return Expenditure		-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto/ Realization Net Expenditure		147.814.579.679	630.490.921.678	(482.676.341.999)	-76,56%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
---	---

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

2.2. Belanja-Lanjutan

3. Belanja Modal-Lanjutan

1. Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2017. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 ini mengalami penurunan sebesar Rp78.289.325.000 atau 100,00% dari realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 sebesar Rp78.289.325.000. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya rencana pembelian tanah untuk gedung kantor, rumah dinas dan mess pegawai BPK di tahun 2017.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian/Descriptions	TA 2017/ FY 2017	TA 2016/ FY 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
			Rp	%
Belanja Modal Tanah/Land Capital Expenditures	-	78.289.325.000	(78.289.325.000)	-100,00%
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah/Backfill Capital Expenditures and Land Ripening	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto/Realization Gross Expenditure	-	78.289.325.000	(78.289.325.000)	-100,00%
Pengembalian Belanja/Return Expenditure	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto/Realization Net Expenditure	-	78.289.325.000	(78.289.325.000)	-100,00%

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2017 adalah sebesar Rp97.211.346.745 atau 99,63% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp97.575.783.000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 ini mengalami penurunan sebesar Rp272.588.295.249 atau 73,71% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 sebesar Rp369.799.641.994. Hal ini disebabkan oleh efisiensi belanja modal dimana dari awal perencanaan, anggaran belanja modal peralatan dan mesin turun secara signifikan.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

2. DESCRIPTIONS OF ACCOUNT STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED

2.2. Expenditure-Continued

3. Capital Expenditures-Continued

1. Land Capital Expenditure

There is no budget and realization of Land Capital Expenditure in FY 2017. The realization of the FY 2017 Land Capital Expenditure decreased by Rp78,289,325,000 or 100.00% from the realization of the FY 2016 Capital Expenditure amounting to Rp78,289,325,000. This is due to the absence of a land purchase plan for office buildings, official houses and mess BPK employees in 2017.

Details of the comparison of realized capital expenditures of FY 2017 and 2016 are as follows:

2. Equipment and Machine Capital Expenditure

Realization of Equipment and Machinery Capital Expenditures in FY 2017 amounted Rp97,211,346,745 or 99.63% of the Rp97,575,783,000 Capital Expenditure Budget for Equipment and Machinery Capital. Realization of Equipment and Equipment Capital Expenditure of FY 2017 decreased by Rp272,588,295,249 or 73,71% from Capital Expenditure realization Equipment and Machines FY 2016 is Rp369,799,641,994. This is due to the efficiency of capital expenditure where from the beginning of planning, capital expenditures of equipment and machinery decreased significantly.

Details of the comparison of the Equipment and Machinery Expenditures for FY 2017 and 2016 are as follows:

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
--	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN
- 2.2. Belanja-Lanjutan
3. Belanja Modal-Lanjutan
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Lanjutan

2. DESCRIPTIONS OF ACCOUNT STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
- 2.2. Expenditure-Continued
3. Capital Expenditures-Continued
2. Equipment and Machine Capital Expenditure-Continued

Uraian/Descriptions	TA 2017/ FY 2017	TA 2016/ FY 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin/ <i>Equipment and Machine Capital Expenditures</i>	90.791.810.345	360.723.163.094	(269.931.352.749)	-74,83%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin/ <i>Value Added Equipment and Machine Expenditures</i>	6.419.536.400	9.076.478.900	(2.656.942.500)	-29,27%
Realisasi Belanja Bruto/<i>Realization Gross Expenditure</i>	97.211.346.745	369.799.641.994	(272.588.295.249)	-73,71%
Pengembalian Belanja/ <i>Return Expenditure</i>	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto/<i>Realization Net Expenditure</i>	97.211.346.745	369.799.641.994	(272.588.295.249)	-73,71%

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2017 sebesar Rp97.211.346.745 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

Realization of Equipment and Machinery Capital Expenditures in FY 2017 amounting to Rp97,211,346,745 is capitalized on the following assets:

No	Uraian	Rp	Description
1.	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	94.820.181.573	<i>Capitalization of Equipment and Machines</i>
2.	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	215.946.782	<i>Capitalization of Building and Properties</i>
3.	Kapitalisasi pada Irigasi	113.150.000	<i>Capitalization of Irrigation</i>
4.	Kapitalisasi pada Jaringan	1.783.294.600	<i>Capitalization of Network</i>
5.	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	20.320.000	<i>Capitalization of Other Fixed Assets</i>
6.	Kapitalisasi pada Aset Tetap Renovasi	241.730.200	<i>Capitalization of Renovation Fixed Assets</i>
7.	Kapitalisasi Gedung dan Bangunan Ekstrakomptable	2.200.000	<i>Capitalization of Building and Properties Extracomptable</i>
8.	Kapitalisasi Peralatan dan Mesin Ekstrakomptable	7.923.590	<i>Capitalization of Equipment and Machines Extracomptable</i>
9.	Tidak dikapitalisasi	6.600.000	<i>Not-Capitalization</i>
Jumlah		97.211.346.745	Total

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
--	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

2.2. Belanja-Lanjutan

3. Belanja Modal-Lanjutan

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2017 adalah sebesar Rp41.483.835.707 atau 99,23% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.805.878.000. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 ini mengalami penurunan sebesar Rp97.530.296.044 atau 70,16% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 sebesar Rp139.014.131.751. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pembangunan fisik atas Gedung dan Bangunan pada BPK dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian/Descriptions	TA 2017/ FY 2017	TA 2016/ FY 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
			Rp	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan/ <i>Building and Properties Capital Expenditures</i>	1.214.577.247	79.483.669.593	(78.269.092.346)	-98,47%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan/ <i>Value Added Building and Properties Expenditures</i>	40.269.258.460	59.530.462.158	(19.261.203.698)	-32,36%
Realisasi Belanja Bruto/ Realization Gross Expenditure	41.483.835.707	139.014.131.751	(97.530.296.044)	-70,16%
Pengembalian Belanja/ <i>Return Expenditure</i>	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto/Realization Net Expenditure	41.483.835.707	139.014.131.751	(97.530.296.044)	-70,16%

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2017 sebesar Rp41.483.835.707 dikapitalisasi pada aset sebagai berikut:

Realization of Building and Properties Capital Expenditures in FY 2017 amounting to Rp41,483,835,707 is capitalized on the following assets:

No	Uraian	Rp	Description
1.	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	222.271.800	<i>Capitalization of Equipment and Machines</i>
2.	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	9.124.657.440	<i>Capitalization of Building and Properties</i>
3.	Kapitalisasi pada Jalan dan Jembatan	104.927.300	<i>Capitalization of Roads and Bridge</i>
4.	Kapitalisasi pada Irigasi	277.848.000	<i>Capitalization of Irrigation</i>
5.	Kapitalisasi pada Aset Tetap Renovasi	5.184.828.800	<i>Capitalization of Other Fixed Assets</i>
6.	Kapitalisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	26.444.630.247	<i>Capitalization of Construction in Progress</i>
7.	Kapitalisasi Gedung dan Bangunan Ekstrakomptable	98.774.800	<i>Capitalization of Building and Properties Extracomptable</i>
8.	Tidak dikapitalisasi	25.897.320	<i>Not-Capitalization</i>
Jumlah		41.483.835.707	Total

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
--	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

2.2. Belanja-Lanjutan

3. Belanja Modal-Lanjutan

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2017. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2017 ini mengalami penurunan sebesar Rp323.730.100 atau 100,00% dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 sebesar Rp323.730.100. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya rencana pembelian atau pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada BPK di tahun 2017.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian/Descriptions	TA 2017/ FY 2017	TA 2016/ FY 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
			Rp	%
Belanja Modal Jaringan/Network Capital Expenditures	-	323.730.100	(323.730.100)	-100,00%
Realisasi Belanja Bruto/ Realization Gross Expenditure	-	323.730.100	(323.730.100)	-100,00%
Pengembalian Belanja/ Return Expenditure	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto/Realization Net Expenditure	-	323.730.100	(323.730.100)	-100,00%

3.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2017 adalah sebesar Rp9.119.397.227 atau 98,85% dari anggaran Belanja Modal Lainnya sebesar Rp9.225.358.000. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 ini mengalami penurunan sebesar Rp33.944.695.606 atau 78,82% dari realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 sebesar Rp43.064.092.833. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya perencanaan pembelian *software* bila dibandingkan tahun sebelumnya.

2. DESCRIPTIONS OF ACCOUNT STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED

2.2. Expenditure-Continued

3. Capital Expenditures-Continued

4. Roads, Irrigation, and Network Capital Expenditures

There is no budget and realization of Capital Expenditure on Roads, Irrigation and Networks in FY 2017. The realization of the 2017 Road, Irrigation and Network Expenditures for FY 2017 has decreased by Rp323,730,100 or 100.00% from the realization of Capital Expenditure on Road, Irrigation, and FY Network 2016 for Rp323,730,100. This is due to the absence of a planned purchase or construction of Roads, Irrigation and Networks at BPK in 2017.

Details of the comparison of the Capital Expenditures for Roads, Irrigation and FY networks 2017 and 2016 are as follows:

3.5. Others Capital Expenditures

The realization of Other Capital Expenditures in FY 2017 amounted Rp9,119,397,227 or 98.85% of the Other Capital Expenditure budget of Rp9,225,358,000. Other Actual Capital Expenditures of FY 2017 decreased by Rp33,944,695,606 or 78.82% from the realization of Other Capital Expenditures of FY 2016 amounting to Rp43,064,092,833. This is due to a decrease in software purchase planning compared to the previous year.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
--	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

2.2. Belanja-Lanjutan

3. Belanja Modal-Lanjutan

3.5. Belanja Modal Lainnya-Lanjutan

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

2. DESCRIPTIONS OF ACCOUNT STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED

2.2. Expenditure-Continued

3. Capital Expenditures-Continued

3.5. Others Capital Expenditures-Continued

Details of comparison of other Expenditures for Capital Expenditures of FY 2017 and 2016 are as follows:

Uraian/ Descriptions	TA 2017/ FY 2017	TA 2016/ FY 2016	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)	
			Rp	%
Belanja Modal Lainnya/ Others Capital Expenditures	2.791.169.227	38.315.082.933	(35.523.913.706)	-92,72%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya/Expenditures of Additions of Other Fixed Assets/Other Assets	6.328.228.000	4.749.009.900	1.579.218.100	33,25%
Realisasi Belanja Bruto/ Realization Gross Expenditures	9.119.397.227	43.064.092.833	(33.944.695.606)	-78,82%
Pengembalian Belanja/ Return Expenditure	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto/ Realization Nett Expenditures	9.119.397.227	43.064.092.833	(33.944.695.606)	-78,82%

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2017 sebesar Rp9.119.397.227 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

Realization of Other Capital Expenditures in FY 2017 amounting to Rp9,119,397,227 are capitalized on the following assets:

No	Uraian	Rp	Description
1.	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	19.128.775	Capitalization of Equipment and Machines
2.	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	729.737.602	Capitalization of Other Fixed Assets
3.	Kapitalisasi pada Software	2.801.054.750	Capitalization of Software
4.	Kapitalisasi pada Lisensi	5.569.476.100	Capitalization of Licence
Jumlah		9.119.397.227	Total

3. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1. Terdapat Akun Pendapatan Jasa Lainnya (423291)

Pada Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah satuan kerja Sekretariat Jenderal BPK dan Pusdiklat, terdapat Pendapatan Jasa Lainnya (423291) sebesar Rp3.512.112.086 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan *Audit Fee* dari International Atomic Energy Agency (IAEA) pada Sekretariat Jenderal BPK sebesar Rp3.446.902.086, terdiri dari:
 - a) Penyetoran *Audit Fee* atas Laporan Keuangan IAEA untuk periode tahun buku 2016 dan 2017 dalam valuta Euro ke Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia dengan No.rekening 6005.0299.1980, sebagai berikut:

3. OTHERS IMPORTANT NOTES TO STATEMENT OF BUDGET REALIZATION

3.1. There is an Other Service Revenue Account (423291)

In the State Revenue Realization Report and Grant Unit of the Secretariat General of BPK and Pusdiklat, there are Other Services (423291) of Rp3,512,112,086 with details as follows:

1. Acceptance of *Audit Fee* from the International Atomic Energy Agency (IAEA) to the Secretariat General of BPK amounting to Rp3,446,902,086, consisting of:
 - a) Deposit of *Fee Audit* on IAEA Financial Statements for the fiscal year 2016 and 2017 in Euro currency to the State General Treasury Account at Bank Indonesia with account No.6005.0299.1980, as follows:

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN	B. DESCRIPTION OF THE POSTS STATEMENTS OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED
---	---

3. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LANJUTAN

3.1. Terdapat Akun Pendapatan Jasa Lainnya (423291)-Lanjutan

No	Tanggal/ Date	Ekuivalen Rupiah (Rp)/ The Rupiah Equivalent (Rp)	Jumlah Uang (EUR)/ Total Money (EUR)	Keterangan/ Information
1	19-Jan-17	1.486.251.210	103.445	Surat Dirjen Perben No.S-2590/PB.3/2017 tgl 9 Maret 2017/Letter of Dirjen Perben No.S-2590/PB.3/2017 dated March 9, 2017
2	20-Jul-17	1.607.667.710	103.445	Surat Dirjen Perben No.7188/PB.3/2017 tgl 18 Agustus 2017/Letter of Dirjen Perben No.7188/PB.3/2017 dated August 18, 2017

b) Penerimaan *Audit Fee* atas pemeriksaan Laporan Keuangan 3 entitas IAEA tahun buku 2016 sebesar Rp352.983.166 atau 22.191,49 euro sesuai surat konfirmasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.S-8190/PB.3/2017 tanggal 20 September 2017.

2. Penerimaan sebesar Rp65.210.000 atas pendapatan Diklat Kewidyaswaran pada Satker Pusdiklat dalam substansi Diklat Kepemimpinan dan Diklat *Training of Facilitator* (TOF) Prajabatan.

3.2. Terdapat akun Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (423971)

Pada satuan kerja Sekretariat Jenderal BPK terdapat akun Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (423971) sebesar Rp300.000 yang merupakan setoran dari PT Taspen atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL, yang sampai dengan Triwulan III TA 2017 menggunakan akun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (423951). Dikarenakan terdapat *update* Aplikasi SAIBA, maka akun tersebut berubah menjadi Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (423971).

3.3. Terdapat Pendapatan Jasa Giro (423221)

Pada satuan kerja Balai Diklat D.I. Yogyakarta terdapat Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro (423221) sebesar Rp229.205. Hal ini terjadi karena rekening atas nama Balai Diklat D.I. Yogyakarta di Bank Negara Indonesia Cabang D.I. Yogyakarta dengan Nomor Rekening 0505446702 belum terdaftar dalam Treasury National Pooling (TNP). Satker Balai Diklat telah melakukan koordinasi ke KPPN dan Bank BNI Cabang D.I. Yogyakarta dan sedang dalam proses penyelesaian.

3. OTHERS IMPORTANT NOTES TO STATEMENT OF BUDGET REALIZATION-CONTINUED

3.1. There is an Other Service Revenue Account (423291)-Continued

b) *Fee Audit Receipt* of the audited Financial Statement of 3 IAEA entities fiscal year 2016 amounting to Rp352,983,166 or 22,191.49 euro according to the confirmation letter from Directorate General of Treasury No.S-8190/PB.3/2017 dated September 20, 2017.

2. Revenue of Rp65,210,000 on Kewidyaswaran Training at Pusdiklat Satker in substance of Leadership Training and Training of Facilitator (TOF) Proposition.

3.2. There is an Earnings Revenue account of Non-Indemnification of Treasury/Claims Bills Pension of Retired civil servants (423971)

In the unit work of the Secretariat General of BPK, there is a Deposit Revenue account of Non-Indemnification of Treasury/Claims Bills Pension of Civil Servants (423971) amounting to Rp300,000, which is a deposit of PT Taspen on FY Ago Employee Return Recovery, up to the third Quarter of FY 2017 using the account Reception of FY Ago Employee Expenditures (423951). Due to the update of SAIBA Application, the account is changed to Deposit Revenue from Non-Treasury/Claims Bills Pension of Civil Servants (423971).

3.3. There is Revenue Service Giro (423221)

In the unit work of Special Region of Yogyakarta Training Center there is Service Revenue Financial Institution/Service Giro (423221) for Rp229,205. This happens because the account on behalf of the Yogyakarta Training Center at Bank Negara Indonesia Branch Special Region of Yogyakarta Branch with Account Number 0505446702 has not been listed in Treasury National Pooling (TNP). Training Center Unit Work and Education has coordinated to The Office of State Treasury Service and BNI Bank Special Region of Yogyakarta Branch and is in the process of completion.

C. PENJELASAN UMUM NERACA

C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET

1. PENJELASAN UMUM NERACA

Perbandingan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian/ Description	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	%
Aset/Assets	4.687.810.249.262	4.774.117.370.735	-1,81%
Kewajiban/Liabilities	62.155.774.730	126.230.311.149	-50,76%
Ekuitas/Equity	4.625.654.474.532	4.647.887.059.586	-0,48%

Jumlah Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.687.810.249.262 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp24.072.911.819, Aset Tetap sebesar Rp4.568.525.966.643, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp384.939.481, serta Aset Lainnya sebesar Rp94.826.431.319.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp62.155.774.730 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.625.654.474.532.

2. PENJELASAN PER POS NERACA

2.1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp24.072.911.819 dan Rp31.330.860.143.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada BPK per 31 Desember 2017 dan 2016 yaitu:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	4.198.123.779
Belanja Dibayar Dimuka	357.453.807
Piutang Bukan Pajak	3.626.968.686
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang	(25.439.867)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	41.446.296
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(13.595.148)
Persediaan	15.887.954.266
Jumlah	24.072.911.819

1. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET

Comparison of Balance Sheets as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Total Assets as of December 31, 2017 amounting to Rp4,687,810,249,262 consists of Current Assets of Rp24,072,911,819, Fixed Assets of Rp4,568,525,966,643, Long-term Receivables of Rp384,939,481 and Other Assets amounting to Rp94,826,431,319.

Total Liabilities as of December 31, 2017 amounting to Rp62,155,774,730 which are all short-term liabilities.

Total Equity as of December 31, 2017 amounting to Rp4,625,654,474,532.

2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET

2.1. Current Assets

Current Assets Balance as of December 31, 2017 and 2016 each of them amounting to Rp24,072,911,819 and Rp31,330,860,143.

The Current Assets are assets that are expected immediately to be realized or held for use within 12 (twelve) months from the date of reporting.

The details of Current Assets in BPK as of December 31, 2017 and 2016 are:

31 Desember 2016/ December 31, 2016	
9.134.522.524	Cash in Disbursing Treasurer
5.135.328.301	Other Cash and Cash Equivalent
361.852.280	Prepaid Expenditure
1.394.900.083	Non Taxable Receivable
(6.974.501)	Allowance for Doubtful- Receivable
	Current Portion of Indemnification
	Treasury/Claims
66.446.296	Bills-Net
	Allowance for Doubtful- Current-Portion of Indemnification
	Treasury/Claims
(2.901.630)	Bills-Net
15.247.686.790	Inventory
31.330.860.143	Total

C. PENJELASAN UMUM NERACA-LANJUTAN		C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED	
2. PENJELASAN PER POS NERACA-LANJUTAN		2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED	
2.1. Aset Lancar-Lanjutan		2.1. Current Assets-Continued	
1. Kas di Bendahara Pengeluaran		1. Cash in the Expenditure Treasurer	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Sekretaris			Secretariat
Jenderal	-	3.380.231.174	General
BPK Pusat	-	5.754.291.350	BPK Headquarters
Jumlah	-	9.134.522.524	Total
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp9.134.522.524, terjadi penurunan sebesar Rp9.134.522.524 atau 100,00%.		Cash Balance at Expenditure Treasurer as of December 31, 2017 and 2016 each of them amounting to Rp0 and Rp9,134,522,524, decreased by Rp9,134,522,524 or 100.00%.	
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.		Cash in the Expenditure Treasurer is cash controlled, managed, and under the responsibility of the Expenditure Treasurer derived from the remaining UP/TUP which has not been accounted or reimbursed to the Treasury Fund as of the balance sheet date.	
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp9.134.522.524 telah disetorkan pada Tahun 2017.		Cash Balance at Expenditure Treasurer as of December 31, 2016 amounting to Rp9,134,522,524 has been deposited in Year 2017.	
2. Kas Lainnya dan Setara Kas		2. Other Cash and Cash Equivalents	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Pendapatan yang belum disetor			Unpaid revenue to State Treasury
Ke Kas Negara	4.072.407.788	4.285.473.681	
Utang kepada pihak ketiga lainnya	81.779.050	681.587.220	Account payable to other third parties
Utang jangka pendek lainnya	43.936.941	168.267.400	Other short-term payables
Jumlah	4.198.123.779	5.135.328.301	Total
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.198.123.779 dan Rp5.135.328.301 terjadi penurunan sebesar Rp937.204.522 atau 18,25%.		Other Cash and Cash Equivalents as of December 31, 2017 and 2016 each of them amounting to Rp4,198,123,779 and Rp5,135,328,301, decreased by Rp937,204,522 or 18.25%.	
Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.		Other Cash and Cash Equivalents are cash which are under the responsibility of the expenditure treasurer that are not derived from the UP/TUP, whether bank account balances or cash.	

C. PENJELASAN UMUM NERACA-LANJUTAN		C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED	
2. PENJELASAN PER POS NERACA-LANJUTAN		2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED	
2.1. Aset Lancar-Lanjutan		2.1. Current Assets-Continued	
3. Belanja Dibayar Dimuka		3. Prepaid Expenditure	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016
Sekretaris			Secretariat
Jenderal	357.453.807	361.852.280	General
BPK Pusat	-	-	BPK Headquarters
Jumlah	357.453.807	361.852.280	Total
Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp357.453.807 dan Rp361.852.280, terjadi penurunan sebesar Rp4.398.473 atau 1,22%.		Prepaid Expenditure as of December 31, 2017 and 2016 each of them amounting to Rp357,453,807 and Rp361,852,280, decreased by Rp4,398,473 or 1.22%.	
Belanja Dibayar di muka berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.		Prepaid Expenditures are derived from the actual expenditure of the reporting year, but goods/services/facilities from third parties have not been fully received/used by the working unit.	
Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 seluruhnya berasal dari Belanja Barang yang Dibayar di Muka yaitu:		Balance of Prepaid Expenditure as of December 31, 2017 comes entirely from Prepaid Goods Expenditure that is:	
1. Sewa rumah dinas yang belum digunakan per 31 Desember 2017 yang berasal dari transaksi tahun 2016 sebesar Rp356.291.798 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal BPK.		1. Unused office rental as of December 31, 2017 from the 2016 transaction amounting to Rp356,291,798 in the unit work of the Secretariat General of BPK.	
2. Sewa Frekuensi HT yang belum digunakan per 31 Desember 2017 yang berasal dari transaksi tahun 2016 sebesar Rp1.162.009 pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.		2. Unused Lease of Frequency HT as of December 31, 2017 from 2016 transaction amounting to Rp1,162,009 to BPK Riau Islands Province Representative.	
4. Piutang Bukan Pajak		4. Receivable Not Tax	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016
Sekretaris			Secretariat
Jenderal	3.502.282.695	1.170.942.435	General
BPK Pusat	124.685.991	223.957.648	BPK Headquarters
Jumlah	3.626.968.686	1.394.900.083	Total
Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.626.968.686 dan Rp1.394.900.083, terjadi kenaikan sebesar Rp2.232.068.603 atau 160,02%.		Non-Tax Accounts Receivable as of December 31, 2017 and 2016 amounted Rp3,626,968,686 and Rp1,394,900,083 respectively, increased of Rp2,232,068,603 or 160.02%.	
Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.		Non-tax receivables are receivables arising from non-tax state revenues outstanding until the end of the financial statements period.	
Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 adalah piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.273.141.213 dan piutang lainnya sebesar Rp353.827.473.		Details of Non Tax Receivables as of December 31, 2017 are Non-Tax State Revenue receivable amounted Rp3,273,141,213 and other receivable amounted Rp353,827,473.	

C. PENJELASAN UMUM NERACA-LANJUTAN **C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED**

2. PENJELASAN PER POS NERACA-LANJUTAN

2.1. Aset Lancar-Lanjutan

4. Piutang Bukan Pajak-Lanjutan

Piutang PNBPN berasal dari seluruh penerimaan pemerintahan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah, misalnya Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, kontrak pekerjaan dimana pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, namun pekerjaan telah dibayar 100%.

Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang PNBPN, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Piutang lainnya berasal dari kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas serta kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Sekretaris	
Jenderal	(24.816.438)
BPK Pusat	(623.429)
Jumlah	(25.439.867)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp25.439.867 dan Rp6.974.501, terjadi kenaikan sebesar Rp18.465.366 atau 264,76%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besarnya tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED

2.1. Current Assets-Continued

4. Receivable Non Tax-Continued

Non-Tax Income receivables are derived from all central government revenues that are not derived from taxation and grant receipts, for example Accounts Receivable Lease Revenue of Official Residence/Home Affairs, Rental Building Revenue, Buildings and Warehouses that have not been paid by the obligatory to pay up to the balance sheet date, employment contract where the implementation of work can not be completed 100% until December 31, 2017, but the work has been paid 100%.

Other Receivables are from receivables arising from non-current receivables from Non-Tax Income, Current Portion of Claims on Installments of Installments, and Current Section of Compensation Claims. Other receivables come from the excess of official travel expenditures that have been accounted, but at balance sheet date still not completed by the official travel officer as well as the overpayment of salary/TKPK to the employee.

5. Allowance for Doubtful Accounts-Non Taxes Accounts

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
	(4.302.574)	Secretariat
	(2.671.927)	General
	(6.974.501)	BPK Headquarters
		Total

Allowance for Doubtful Accounts Receivable-Non-Tax Receivables as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp25,439,867 and Rp6,974,501 respectively, an increase of Rp18,465,366 or 264.76%.

Allowance for Doubtful Accounts Receivables is reserves that must be established for a certain percentage of accounts receivable based on the classification of receivable qualities. The classification of the quality of receivables is one of the basis for determining the amount of allowance for receivables. Assessment of receivables quality is done by considering the maturity and development of collection efforts conducted by the government.

The quality of receivables is based on the condition of each receivable at the date of reporting in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No.69/PMK.06/2014 regarding Quality Determination of Receivables and the Establishment of Doubtful Allowance at State Ministries/Agencies and State Treasurers.

C. PENJELASAN UMUM NERACA-LANJUTAN		C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED	
2. PENJELASAN PER POS NERACA-LANJUTAN		2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED	
2.1. Aset Lancar-Lanjutan		2.1. Current Assets-Continued	
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak-Lanjutan		5. Allowance for Doubtful Accounts Receivable-Non-Taxes Accounts Receivable-Continued	
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak adalah penyisihan piutang tidak tertagih-piutang PNPB sebesar Rp16.365.705 dan penyisihan piutang tidak tertagih-piutang lainnya sebesar Rp9.074.162.		Details of Allowance for Doubtful Accounts-Non-Tax Debts are allowance for doubtful accounts-non-tax income receivable amounted Rp16,365,705 and allowance for doubtful accounts-other receivable amounted Rp9,074,162.	
6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)		6. Current Portion Indemnification of Treasury/ Claims Bills-Net	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016
Bagian Lancar			Current Portion
Tagihan Tuntutan			Indemnification of
Perbendaharaan	14.400.000	14.400.000	Treasury Bill
Bagian Lancar			Current Portion
Tagihan Tuntutan			Indemnification of
Ganti Rugi	27.046.296	52.046.296	Claims Bill
Jumlah	41.446.296	66.446.296	Total
Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp41.446.296 dan Rp66.446.296 terjadi penurunan sebesar Rp25.000.000 atau 37,62%.		Current Balance of Indemnification of Treasury/Claims Bills as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp41,446,296 and Rp66,446,296 respectively, a decrease of Rp25,000,000 or 37.62%.	
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.		Current Section Indemnification of Treasury/Claims Bills is an outstanding Indemnification of Treasury/Claims Bills on the balance sheet date due in 12 months or less.	
Mutasi tambah sebesar Rp14.400.000 berasal dari adanya reklasifikasi masuk dari Tagihan TP ke Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tanggal 31 Desember 2017 yang berasal dari piutang TP 1 (satu) orang pegawai karena kelalaian dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan sebesar Rp14.400.000. Sesuai Surat Pernyataan tanggal 22 Juli 2016 perihal kesanggupan pembayaran ganti rugi kepada Kas Negara sebesar Rp419.273.850, pegawai yang bersangkutan akan mengganti melalui pemotongan gaji/ penghasilan sebesar Rp1.200.000 per bulan sejak tanggal penandatanganan SKTJM.		The added contribution of Rp14,400,000 from the reclassification of the entry of Treasury Bills to Current Portion Indemnification of Treasury/Claims Bills Claims on December 31, 2017 stemming from receivables of Treasury Bills 1 (one) employee due to negligence in performing treasury duties of Rp14,400,000. In accordance with the Letter of Declaration dated July 22, 2016, concerning the ability to pay compensation to State Treasury amounting to Rp419,273,850, the employees concerned should be reimburse through salary/income deductions of Rp1,200,000 of month from the date of signature of SKTJM.	

C. PENJELASAN UMUM NERACA-LANJUTAN **C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED**

2. PENJELASAN PER POS NERACA-LANJUTAN

2.1. Aset Lancar-Lanjutan

7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Bagian Lancar	
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	(72.000)
Bagian Lancar	
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(13.523.148)
Jumlah	(13.595.148)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp13.595.148 dan Rp2.901.630, terjadi penurunan sebesar Rp10.693.518 atau 368,53%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertahiran Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Dari saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersebut terdapat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sebesar Rp10.693.518 karena koreksi antar beban dari Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang- TP/TGR ke Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP sebesar Rp72.000 berasal dari Bagian Lancar Tagihan TP seorang pegawai sebesar Rp14.400.000 yang dikategorikan dalam kualitas lancar, sehingga Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP sebesar Rp14.400.000x5% = Rp72.000.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TGR sebesar Rp13.523.148 berasal dari Bagian Lancar Tagihan TGR seorang pegawai sebesar Rp27.046.296 yang dikategorikan dalam kualitas diragukan, sehingga Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TGR sebesar Rp27.046.296x50% = Rp13.523.148.

2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED

2.1. Current Assets-Continued

7. Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims Bill

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
		Current Portion
	(72.000)	Indemnification of
		Treasury Bill
		Current Portion
	(2.829.630)	Indemnification of
		Claims Bill
	(2.901.630)	Total

Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Treasury/Indemnification Claims Bill as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp13,595,148 and Rp2,901,630, respectively decreased by Rp10,693,518 or 368.53%.

Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims Bill is an estimate of the Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims determined by the quality of each receivable.

From the balance of Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims are Allowance for Doubtful Accounts Expenses-Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims of Rp10,693,518 due to adjustment between expenses from Allowance for Long-Term Doubtful Accounts Expenses-Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims to Allowance for Doubtful Accounts Expenses-Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims Bill.

Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Indemnification of Treasury Bill amounting to Rp72,000 comes from Current portion of Indemnification of Treasury an employee's bill of Rp14,400,000 categorized in current quality, so Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Indemnification of Treasury Bill amounting to Rp14,400,000x5% = Rp72,000.

Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Indemnification Claims Bill balance amounting to Rp13,523,148 comes from Current Portion of Indemnification Claims Bill an employee's amounting to Rp27,046,296 categorized in current quality, so Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Indemnification Claims Bill amounting to Rp27,046,296x50% = Rp13,523,148.

C. PENJELASAN UMUM NERACA-LANJUTAN **C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED**

2. PENJELASAN PER POS NERACA-LANJUTAN

2.1. Aset Lancar-Lanjutan

8. Persediaan

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Barang Konsumsi	12.520.965.231
Bahan untuk	
Pemeliharaan	1.032.999.250
Suku Cadang	366.249.896
Pita, Cukai, Material	
dan Leges	5.418.000
Bahan Baku	-
Persediaan Lainnya	1.962.321.889
Jumlah	15.887.954.266

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp15.887.954.266 dan Rp15.247.686.790, terjadi kenaikan sebesar Rp640.267.476 atau 4,20%. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan digunakan untuk kegiatan operasional Satuan Kerja dalam kondisi baik. Tidak ada perbedaan nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca, LBKP maupun Laporan Persediaan.

Adapun persediaan dalam kondisi usang/rusak yaitu:

Persediaan rusak sebesar Rp4.561.620 terjadi pada satker:

1. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp1.012.500.
2. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp3.463.020.
3. BPK Perwakilan Provinsi Papua sebesar Rp86.100.

Persediaan usang sebesar Rp22.260.960 terjadi pada satker:

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp18.696.456.
2. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp210.000.
3. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp9.460.
4. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebesar Rp14.000.
5. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sebesar Rp3.331.044.

2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED

2.1. Current Assets-Continued

8. Inventory

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
	11.458.237.639	Consumer Goods
		Materials for
		Maintenance
	1.096.298.114	
	354.803.629	Spare Parts
		Pita, Taxes, Material
	8.156.300	and Leges
	459.782.240	Raw Materials
	1.870.408.868	Others Inventory
	15.247.686.790	Total

Balance of Inventories as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp15,887,954,266 and Rp15,247,686,790, respectively, increased by Rp640,267,476 or 4,20%. Inventory is a type of asset in the form of goods or supplies at the balance sheet date obtained for the purpose of supporting operational activities and to be submitted for public service.

The above inventory is used for operating activities of the unit work in good condition. There is no difference in the value of inventory presented in the Balance Sheet, LBKP or Inventory Report.

The inventory in the condition of obsolete/damaged namely:

Damaged of inventories of Rp4,561,620 occurred at the satker:

- 1 BPK Representative of East Nusa Tenggara Province amounting to Rp1,012,500.
- 2 BPK Representative of Southeast Sulawesi Province amounting to Rp3,463,020.
- 3 BPK Representative of Papua Province amounting to Rp86,100.

Obsolete of inventory of Rp22,260,960 occurred at the working unit:

- 1 BPK Representative of West Kalimantan Province Rp18,696,456.
- 2 BPK Representative of Central Sulawesi Province amounting to Rp210,000.
- 3 BPK Representative of North Sulawesi Province amounting to Rp9,460.
- 4 BPK Representative of Gorontalo Province Rp14,000.
- 5 BPK Representative of West Papua Province Rp3,331,044.

C. PENJELASAN UMUM NERACA-LANJUTAN					C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED
2. PENJELASAN PER POS NERACA-LANJUTAN					2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED
2.2 Aset Tetap					2.2 Fixed Assets
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.568.525.966.643 dan Rp4.642.866.745.272 dengan rincian sebagai berikut:					The Value of Fixed Assets as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp4,568,525,966,643 and Rp4,642,866,745,272, is as follows:
31 December 2017/December 31, 2017					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	1.771.760.496.768	4.056.747.600.996	3.970.543.550.681	1.857.964.547.083	Land
Peralatan dan Mesin	1.870.744.454.733	231.702.483.696	140.499.310.149	1.961.947.628.280	Equipment and Machine
Gedung dan Bangunan	2.268.269.681.712	723.108.597.127	665.743.150.857	2.325.635.127.982	Building and Properties
Jalan, Irigasi dan Jaringan	341.620.494.978	61.058.461.953	50.468.911.279	352.210.045.652	Road, Irrigation and Network
Aset Tetap Lainnya	82.079.788.844	61.958.443.690	120.167.651.927	23.870.580.607	Other Fixed Assets
Konstruksi dalam Pengerjaan	19.506.469.353	26.444.630.247	28.622.677.000	17.328.422.600	Construction in Progress
Jumlah	6.353.981.386.388	5.161.020.217.709	4.976.045.251.893	6.538.956.352.204	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulation Depreciation
Peralatan dan Mesin	1.307.600.130.357	217.580.303.839	22.667.997.174	1.502.512.437.022	Equipment and Machine
Gedung dan Bangunan	215.738.104.473	293.810.379.419	245.363.086.651	264.185.397.241	Building and Properties
Jalan, Irigasi dan Jaringan	187.410.056.319	43.643.190.251	27.723.214.427	203.330.032.143	Road, Irrigation and Network
Aset Tetap Lainnya	366.349.967	36.169.188	-	402.519.155	Other Fixed Assets
Jumlah	1.711.114.641.116	555.070.042.697	295.754.298.252	1.970.430.385.561	Total
Nilai Buku	4.642.866.745.272	4.605.950.175.012	4.680.290.953.641	4.568.525.966.643	Book Value
31 December 2016/December 31, 2016					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Tanah	1.683.898.357.020	182.224.507.294	94.362.367.546	1.771.760.496.768	Land
Peralatan dan Mesin	1.533.853.855.269	451.511.022.066	114.620.422.602	1.870.744.454.733	Equipment and Machine
Gedung dan Bangunan	2.051.349.458.670	502.504.205.401	285.583.982.359	2.268.269.681.712	Building and Properties
Jalan, Irigasi dan Jaringan	295.508.390.757	52.928.758.684	6.816.654.463	341.620.494.978	Road, Irrigation and Network
Aset Tetap Lainnya	60.921.615.023	94.520.088.253	73.361.914.432	82.079.788.844	Other Fixed Assets
Konstruksi dalam Pengerjaan	189.913.722.175	123.630.878.425	294.038.131.247	19.506.469.353	Construction in Progress
Jumlah	5.815.445.398.914	1.407.319.460.123	868.783.472.649	6.353.981.386.388	Total

C. PENJELASAN UMUM NERACA-LANJUTAN					C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED				
2. PENJELASAN PER POS NERACA-LANJUTAN					2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED				
2.2 Aset Tetap-Lanjutan					2.2 Fixed Assets-Continued				
31 December 2016/December 31, 2016									
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Saldo Akhir/ Ending Balance					
Akumulasi					Accumulation				
Penyusutan					Depreciation				
Peralatan dan					Equipment and				
Mesin	1.113.910.621.431	227.195.256.993	33.505.748.067	1.307.600.130.357	Machine				
Gedung dan					Building and				
Bangunan	208.774.828.436	48.566.042.425	41.602.766.388	215.738.104.473	Properties				
Jalan, Irigasi					Road, Irrigation				
dan					and				
Jaringan	160.128.779.201	27.281.277.118	-	187.410.056.319	Network				
Aset Tetap					Other Fixed				
Lainnya	312.875.843	490.118.107	436.643.983	366.349.967	Assets				
Jumlah	1.483.127.104.911	303.532.694.643	75.545.158.438	1.711.114.641.116	Total				
Nilai Buku	4.332.318.294.003	1.103.786.765.480	793.238.314.211	4.642.866.745.272	Book Value				

Terjadi beberapa kali longsor atas tanah dan bangunan yang ada di Perwakilan Provinsi Papua akibat gempa bumi yang mengakibatkan terkisisnya tanah tempat bangunan tersebut berdiri. Luas tanah tersebut sebelum terjadi longsor sebesar 5.370 m², setelah terjadi longsor berkurang seluas kurang lebih 357,385 m², sehingga luas tanah yang tersisa adalah 5.012,615 m². Setelah terjadi longsor tersebut, telah dibangun pagar pembatas yang baru dengan jarak 6,89 m dari gedung Kantor.

Terdapat selisih sebesar Rp3.854.717.211.598 antara SAIBA dan SIMAK karena Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan Peraturan Presiden No.75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Pada BPK revaluasi BMN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Tahun 2017 terhadap Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.974.748.052.924.

Hasil revaluasi BMN tersebut tidak disajikan dalam *face* Laporan Keuangan BPK Tahun 2017 karena belum menyajikan secara menyeluruh untuk satu kelompok aset disebabkan belum semua Satker di lingkungan BPK asetnya dilakukan revaluasi.

Several landslide occurred on the land and buildings in Representative Papua Province due to the earthquake that resulted in the scattering of the land where the building was standing. The land area before the landslide is 5,370 m², after the landslide is reduced by approximately 357.385 m², so that the remaining land area is 5,012.615 m². After the landslide, a new guardrail has been built with a distance of 6.89 m from the Office building.

There is a difference of Rp3,854,717,211,598 between SAIBA and SIMAK because the Government revalued State Property (State of Goods) in the form of Land, Building and Properties, Road, Irrigation and Network obtained until December 31, 2015 based on Presidential Regulation No. 75 Year 2017 on the revaluation of State/Local Property and Regulation of the Minister of Finance No.118/PMK.06/2017 on Guidelines for the Implementation of the Return Assessment of State Property. In BPK State of Goods revaluation implemented by Directorate General of State Assets (DJKN) in Year 2017 to Land, Building and Properties, Road, Irrigation and Network of Rp3,974,748,052,924.

The State of Goods revaluation result is not presented in the *face* of BPK's Financial Report of 2017 because it has not presented thoroughly for one asset group because not all Satkers in BPK's assets have been revalued.

C. PENJELASAN UMUM NERACA-LANJUTAN **C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED**

2. PENJELASAN PER POS NERACA-LANJUTAN

2.3. Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp384.939.481 dan Rp399.267.481 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Piutang	
Tagihan	
TP/TGR	2.908.215.990
Penyisihan Piutang	
Tidak Tertagih-	
Tagihan	
TP/TGR	(2.523.276.509)
Jumlah	384.939.481

Piutang Jangka Panjang merupakan piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR sebesar Rp2.523.276.509 terdiri dari:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Awal	2.502.662.332
Penambahan	56.078.525
Pemulihan	(35.464.348)
Penyisihan piutang tidak tertagih-tagihan TP/TGR	2.523.276.509

Dari saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan TP/TGR tersebut terdapat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-TP/TGR sebesar Rp20.614.177.

2.4. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp94.826.431.319 dan Rp99.520.497.839 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Aset Tak Berwujud	186.848.003.424
Aset Lain-lain	21.421.653.287
Amortisasi	(113.443.225.392)
Jumlah	94.826.431.319

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED

2.3. Long-Term Receivable

The balance of Long Term Receivables as of December 31, 2017 and 2016 amounted Rp384,939,481 and Rp399,267,481, the details are as follows:

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
		Receivables of
		Indemnification of
		Treasury/Claims Bills
		Allowance for Doubtful
		Accounts-
		Indemnification of
		Treasury/Claims Bills
		Total
	2.901.929.813	
	(2.502.662.332)	
	399.267.481	

Long Term Receivables represent receivables that will mature or will be realized more than 12 months from the date of reporting.

Allowance for Doubtful Accounts-Indemnification of Treasury/Claims Bills amounting to Rp2,523,276,509 consisting of:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
		Beginning
		Added
		Recovery
		Allowance for doubtful accounts-indemnification of treasury/claims Bills
	2.502.662.332	
	56.078.525	
	(35.464.348)	
	2.523.276.509	

From the balance of Allowance for Doubtful Accounts-Indemnification of Treasury/Claims Bills receivables are Provision for Non-Collectable Long-Term Receivables-Indemnification of Treasury/Claims Bills of Rp20,614,177.

2.4. Other Assets

The Value of Other Assets as of December 31, 2017 and 2016 amounted Rp94,826,431,319 and Rp99,520,497,839 the details are as follows:

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
		Intangible Assets
		Other Assets
		Amortization
		Total
	180.714.189.782	
	16.081.207.880	
	(97.274.899.823)	
	99.520.497.839	

Other Assets are assets that can not be grouped either into Current Assets or Fixed Assets.

C. PENJELASAN UMUM NERACA-LANJUTAN **C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED**

2. PENJELASAN PER POS NERACA-LANJUTAN

2.5 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp62.155.774.730 dan Rp126.230.311.149 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Utang Kepada Pihak Ketiga	60.986.545.027
Utang Kelebihan	
Pembayaran	
Pendapatan	50.000.000
Pendapatan Diterima	
Dimuka	1.075.292.762
Uang Muka dari KPPN	-
Utang Jangka Pendek	
Lainnya	43.936.941
Jumlah	62.155.774.730

Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Utang kelebihan pembayaran pendapatan terjadi ketika jumlah pendapatan yang disetorkan lebih besar dari yang seharusnya. Oleh karena sampai akhir periode pelaporan pengembalian kelebihan pendapatan belum dapat direalisasikan maka satuan kerja mencatat sebagai utang kelebihan pembayaran.

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2017 tersebut seluruhnya berasal dari Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya.

Utang kelebihan pembayaran berasal dari satker Sekretariat Jenderal merupakan kelebihan penyetoran atas hasil lelang BMN kendaraan roda empat sebesar Rp50.000.000 yang disetorkan ke Kas Negara sebanyak dua kali yaitu oleh Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta III tanggal 22 Desember 2017 dan oleh pembeli lelang kendaraan dinas pada tanggal 29 Desember 2017.

Penyetoran ke Kas Negara oleh pembeli lelang menggunakan Kode Akun 423999 dan telah dilakukan ralat dengan Kode Akun 423129 pada saat pelaksanaan rekon melalui surat Kuasa Pengguna Anggaran BPK kepada Kepala KPPN Jakarta VII Nomor 5/S/X.4/01/2018 tanggal 10 Januari 2018.

Kelebihan penyetoran sebesar Rp50.000.000 tersebut telah dicatat di Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sesuai dengan hasil e-Rekon dengan KPPN.

2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED

2.5 Short-Term Liabilities

The Balance of Short-term Liabilities as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp62,155,774,730 and Rp126,230,311,149 the details are as follows:

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
	115.460.146.102	<i>Payable to Third Party</i>
		<i>Excess Payment</i>
		<i>Receivable</i>
	-	<i>Payable</i>
		<i>Prepaid</i>
	1.467.375.123	<i>Receivable</i>
	9.134.522.524	<i>Advance from KPPN</i>
		<i>Other Short</i>
	168.267.400	<i>Time Payable</i>
	126.230.311.149	Total

Short-term Liabilities constitute a group of liabilities that are expected to be completed in less than 12 (twelve) months after the date of reporting.

Debt to Third Parties is an accrued expense and an obligation that must be settled immediately to other third parties in less than 12 (twelve) months.

Debt overpayment of income occurs when the amount of income that is deposited is greater than it should be. Because of until the end of the reporting period the return of excess income has not been realized then the working unit record as overpayment debt.

Balance of Debt Overpayment of Income as December 31, 2017 is entirely derived from Debt Overpayment of Revenue Other Non-Tax.

Debt overpayment comes from the Secretariat General of working unit is the excess of deposits on the results of State of Goods auction of four-wheeled vehicles amounting to Rp50,000,000 which is deposited into the Treasury Fund twice by the Treasurer of KPKNL Jakarta III on December 22, 2017 and by the buyer of the auction of official vehicles on December 29, 2017.

Deposit to the Treasury Fund by the buyer of the auction using the Account Code 423999 and has been performed with Account Code Code 423129 at the time of reconstruction through letter of Attorney of Budget User of BPK to Head of The Office of State Treasury Service Jakarta VII Number 5/S/X.4/01/2018 dated January 10, 2018.

The overpayment of Rp50,000,000 has been recorded in the Budget Realization Report for the period ended December 31, 2017 in accordance with the results of e-Rekon with The Office of State Treasury Service.

C. PENJELASAN UMUM NERACA-LANJUTAN	C. GENERAL DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED
2. PENJELASAN PER POS NERACA-LANJUTAN 2.5 Kewajiban Jangka Pendek-Lanjutan Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.075.292.762 berasal dari jurnal balik per 2 Januari 2017 atas nilai sewa penempatan ATM BNI, sewa kantin, sewa koperasi, <i>vending machine</i>, perangkat BTS GSM, dan menara Telkom yang belum digunakan per 31 Desember 2016. Uang Muka Dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan potongan pajak yang dipotong Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2017. 2.6. Ekuitas Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.625.654.474.532 dan Rp4.647.887.059.586. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.	2. ACCOUNT DESCRIPTION OF BALANCE SHEET-CONTINUED 2.5 Short-Term Liabilities-Continued <i>Unearned income is income already paid to the Treasury Fund, but the Goods/Services have not been delivered to third parties in the framework of Non-Tax Income.</i> <i>Unearned income amounting to Rp1,075,292,762 are derived from the reverse journal as of January 2, 2017 on the rental value of BNI ATM placement, canteen rental, cooperative rental, vending machine, GSM BTS device and Telkom tower that not used yet used as of December 31, 2016.</i> <i>Advance From The Office of State Treasury Service is a money supply (UP) or additional money supply (TUP) is granted by The Office of State Treasury Service as advances of work still in or controlled by the Expenditure Treasurer at the date of reporting.</i> <i>Other Short-Term Liability are tax deductions withheld by the Expenditure Treasurer and have not been deposited to the Treasury Fund as of December 31, 2017.</i> 2.6. Equity <i>Equity Balance as of December 31, 2017 and 2016 each of them amounting to Rp4,625,654,474,532 and Rp4,647,887,059,586.</i> <i>Equity is the net worth of an entity which is the difference between assets and liabilities. More details on equity are presented in the Statement of Changes in Equity.</i>

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D. DESCRIPTION OF POST POST OPERATIONAL REPORT

1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian/ Description	TA 2017/ PY 2017	TA 2016/ PY 2016	%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional/ <i>Surplus (Deficit) of Operational Activities</i>	(2.812.887.965.372)	(2.849.700.673.353)	-1,29%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional/ <i>Surplus (Deficit) from Non-Operational Activities</i>	1.382.893.359	5.044.728.916	-72,59%
Surplus (Defisit) LO/ Surplus (Deficit) LO	(2.811.505.072.013)	(2.844.655.944.437)	-1,17%

Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 terjadi defisit sebesar Rp2.812.887.965.372, terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp9.601.183.174 dan Beban Operasional sebesar Rp2.822.489.148.546.

Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 terjadi surplus sebesar Rp1.382.893.359, terdiri dari surplus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp166.730.126 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.216.163.233.

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

2.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp9.601.183.174 dan Rp6.649.556.688, terjadi kenaikan sebesar Rp2.951.626.486 atau 44,39%. Keseluruhan Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.

1. GENERAL DESCRIPTION OF OPERATIONAL REPORT

The composition of the Operating Statements for the periods ended December 31, 2017 and 2016 is as follows:

Operational Activities for the period ended December 31, 2017 there was a deficit of Rp2,812,887,965,372, consisting of Operating Income amounting to Rp9,601,183,174 and Operating Expenses of Rp2,822,489,148,546.

Non-Operational Activities for the period ended December 31, 2017 was a surplus of Rp1,382,893,359, consisting of surplus Non-Current Assets Release of Rp166,730,126 and Surplus of Other Non-Operating Activities of Rp1,216,163,233.

2. DESCRIPTION OF THE POST OF THE OPERATIONAL REPORT

2.1 Operational Revenues

Operating Revenue for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounted Rp9,601,183,174 and Rp6,649,556,688 respectively, increased by Rp2,951,626,486 or 44.39%. Overall Operating Income is Non-Tax State Revenue.

Non-Tax State Revenue for the period ended December 31, 2017 and 2016 is entirely derived from Other Non-Tax State Revenues.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN	D. DESCRIPTION OF POST POST OPERATIONAL REPORT-CONTINUED
--	---

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN

2.1 Pendapatan Operasional-Lanjutan

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara yang bukan merupakan pendapatan dari pajak ataupun pendapatan hibah dan bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.819.486.356
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	4.047.490.000
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	349.807
Pendapatan Jasa Lainnya	3.525.159.603
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	176.620.816
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	31.911.142
Pendapatan Anggaran Lain-lain	165.450
Jumlah	9.601.183.174

2.2 Beban Operasional

Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.822.489.148.546 dan Rp2.856.350.230.041, terjadi penurunan sebesar Rp33.861.081.495 atau 1,19%.

Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari:

2. DESCRIPTION OF THE POST OF THE OPERATIONAL REPORT-CONTINUED

2.1 Operational Revenues-Continued

Non-Tax State Revenues Others are state revenues that are not derived from taxes or grant revenues and are not part of revenues arising from the utilization of natural resources or the government's share of earnings.

Other Non-Tax State Revenue Details for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
	1.196.169.596	Rental Land, Properties, and Building Revenue
	4.876.300.000	Service, Employment, Information, Training and Technology Revenue
	245.078	Financial Institution Service Revenues
	39.883.264	(Current Account) Other Services Revenue
	534.200.078	Income of Fines
	2.758.603	Delayed Completion of Government Reception Persekot/ Advance Salary
	69	Other Budget Revenues
Total	6.649.556.688	

2.2 Operational Expenses

The balance of Operating Expenses for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounted Rp2,822,489,148,546 and Rp2,856,350,230,041, decrease by of Rp33,861,081,495 or 1,19 %.

Operating Expenses for the periods ended December 31, 2017 and 2016 consist of:

No	Uraian/ Description	TA 2017/ PY 2017	TA 2016/ PY 2016	%
1	Beban Pegawai/Employee Expense	1.135.903.888.607	1.121.435.370.348	1,29
2	Beban Persediaan/Inventory Expense	44.885.161.713	47.112.707.700	(4,73)
3	Beban Barang dan Jasa/Good & Service Expense	524.631.025.527	525.438.000.501	(0,15)
4	Beban Pemeliharaan/Maintenance Expense	115.905.136.665	109.325.103.286	6,02
5	Beban Perjalanan Dinas/Office Travel Expense	707.025.084.677	737.109.201.489	(4,08)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi/ Depreciation and Amortization Expense	294.089.078.296	316.017.374.057	(6,94)
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih/ Allowance for Doubtful Accounts	49.773.061,00	(87.527.340)	(156,87)
	Jumlah/Total	2.822.489.148.546	2.856.350.230.041	(1,19)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN	D. DESCRIPTION OF POST POST OPERATIONAL REPORT-CONTINUED
---	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN

2.2 Beban Operasional-Lanjutan

1. Beban Pegawai

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>
Beban Gaji	274.943.868.091
Beban Tunjangan-tunjangan	103.977.881.628
Beban Lembur	7.289.251.237
Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito	<u>749.692.887.651</u>
Jumlah	<u>1.135.903.888.607</u>

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.135.903.888.607 dan Rp1.121.435.370.348 terjadi kenaikan sebesar Rp14.468.518.259 atau 1,29%.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Beban Persediaan

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>
Beban Persediaan Konsumsi	39.040.049.040
Beban Persediaan Pita Cukai Materai dan Leges	85.051.000
Beban Persediaan Bahan Baku	-
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga	-
Beban Persediaan Lainnya	<u>5.760.061.673</u>
Jumlah	<u>44.885.161.713</u>

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp44.885.161.713 dan Rp47.112.707.700, terjadi penurunan sebesar Rp2.227.545.987 atau 4,73%.

2. DESCRIPTION OF THE POST OF THE OPERATIONAL REPORT-CONTINUED

2.2 Operational Expenses-Continued

1. Employee Expenses

Details of Employee Expenses for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
	273.980.722.626	Salary Expense
		Expenses
	104.014.041.135	Benefits
	7.173.603.800	Overtime Loans
		Special Benefit
		Expenses & Employee
	<u>736.267.002.787</u>	Expenses Transito
Jumlah	<u>1.121.435.370.348</u>	Total

Total Employee Expenses for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounted Rp1,135,903,888,607 and Rp1,121,435,370,348 respectively, increased of Rp14,468,518,259 or 1.29%.

Employee Expenses are the burden of compensation, in the form of money or goods stipulated under the laws and regulations granted to state officials, Civil Servants, and employees employed by the government who have not the status of civil servants in return for work that has been implemented except work related to capital formation.

2. Inventory Expenses

The details of Inventories Expense for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
	37.972.018.927	Consumption
		Expense
		Inventory Duty
		Ribbon and Leges
	77.631.740	Expenses
		Raw Material
	3.516.051.553	Inventory Expense
		Inventory
		Expense for
		Strategy/Watchful
	118.826.615	Purpose
		Other Inventory
	<u>5.428.178.865</u>	Expenses
Jumlah	<u>47.112.707.700</u>	Total

Total Inventories Expense for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp44,885,161,713 and Rp47,112,707,700, respectively, decreased by Rp2,227,545,987 or 4.73%.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN		D. DESCRIPTION OF POST POST OPERATIONAL REPORT-CONTINUED	
2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN		2. DESCRIPTION OF THE POST OF THE OPERATIONAL REPORT-CONTINUED	
2.2 Beban Operasional-Lanjutan		2.2 Operational Expenses-Continued	
2. Beban Persediaan-Lanjutan		2. Inventory Expenses-Continued	
Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.		Inventory Expense is a burden to record consumption of consumables, including both marketed and unmarketed goods.	
3. Beban Barang dan Jasa		3. Good and Service Expenses	
Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:		Details of Goods and Services Expenses for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:	
	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	<u>31 Desember 2016/ December 31, 2016</u>	
Beban Barang			Operational Goods
Beban Barang Operasional	178.003.581.466	169.974.293.044	Operational Goods Expense
Beban Barang Non Operasional	215.693.311.239	212.515.288.556	Non-Operational Goods Expense
Beban Jasa			Services Expenses
Beban Langganan			Power Subscription Charges and Services Expenses
Beban Jasa Pos dan Giro	59.265.624.823	57.346.362.497	Post and Interest Income Expenses
Beban Jasa Konsultan	65.138.883	50.040.815	Cost of Consulting Services Expenses
Beban Jasa Profesi	4.957.229.700	1.883.195.362	Professional Services Expenses
Beban Sewa	30.940.061.392	25.278.877.755	Rental expenses
Beban Jasa Lainnya	13.041.597.605	12.953.858.602	Other Service Expenses
Beban Aset	22.555.283.529	45.402.797.200	Asset Expenses
Extrakomtabel			Extracompatible
Beban Aset Extrakomtabel			Asset Expenses Extracompatible
Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin	8.222.090	33.286.670	Equipment and Machines
Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan	100.974.800	-	Asset Expenses Extracompatible Building and Properties
Jumlah	<u>524.631.025.527</u>	<u>525.438.000.501</u>	Total

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp524.631.025.527 dan Rp525.438.000.501, terjadi penurunan sebesar Rp806.974.974 atau 0,15%.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Total Goods and Services Expenses for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp524,631,025,527 and Rp525,438,000,501, respectively, decreased by Rp806,974,974 or 0.15%.

Goods and services expenses consists of goods and services expenses in the form of consumption of goods and/or services in the framework of the implementation of the activities of the entity and other expenses in the form of expenses arising from the use of capital expenditure allocations that do not produce fixed assets.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN	D. DESCRIPTION OF POST POST OPERATIONAL REPORT-CONTINUED
--	---

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN

2.2 Beban Operasional-Lanjutan

4. Beban Pemeliharaan

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	63.407.690.483
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.047.223.599
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.079.722.897
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.222.897.625
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.222.770.359
Beban Pemeliharaan Lainnya	415.040.000
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	3.763.237.693
Beban Persediaan Suku Cadang	746.554.009
Jumlah	115.905.136.665

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp115.905.136.665 dan Rp109.325.103.286, terjadi kenaikan sebesar Rp6.580.033.379 atau 6,02%.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D. 2. DESCRIPTION OF THE POST OF THE OPERATIONAL REPORT-CONTINUED

2.2 Operational Expenses-CONTINUED

4. Maintenance Expenses

The details of Maintenance Expenses for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
	59.438.450.862	<i>Building and Properties Maintenance Expenses</i>
	8.781.116.661	<i>Building and Other Buildings Maintenance Expenses</i>
	31.630.063.420	<i>Equipment and Machine Maintenance Expense</i>
	3.210.356.533	<i>Other Equipment and Machine Maintenance Expenses</i>
	1.085.862.160	<i>Network Maintenance Expense</i>
	478.650.000	<i>Other Maintenance Expenses</i>
	3.576.409.597	<i>Supplies Expense for Maintenance Spare Parts</i>
	1.124.194.053	<i>Supply Expenses</i>
	109.325.103.286	Total

Total Maintenance Expense for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp115,905,136,665 and Rp109,325,103,286 respectively, increased of Rp6,580,033,379 or 6.02%.

Maintenance Expense is an expense intended to maintain a fixed asset or other existing assets into normal condition.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN	D. DESCRIPTION OF POST POST OPERATIONAL REPORT-CONTINUED
--	---

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN

2.2 Beban Operasional-Lanjutan

5. Beban Perjalanan Dinas

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Beban Perjalanan Biasa	550.370.253.426
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.841.724.756
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	59.877.812.601
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.143.967.477
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	35.791.326.417
Jumlah	707.025.084.677

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp707.025.084.677 dan Rp737.109.201.489, terjadi penurunan sebesar Rp30.084.116.812 atau 4,08%.

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D. 2. DESCRIPTION OF THE POST OF THE OPERATIONAL REPORT-CONTINUED

2.2 Operational Expenses-CONTINUED

5. Official Travel Expenses

The details of the official travel expenses for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

31 Desember 2016/ December 31, 2016	
554.579.751.949	Ordinary Travel Expense
39.286.993.493	Travel Expenses of City Service
72.232.066.698	Travel Expenses Package Meeting In Town
25.411.406.884	Travel Expense of Overseas Meeting Package
45.598.982.465	Ordinary Travel Expenses-Overseas
737.109.201.489	Total

Total Official Travel Expenses for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp707,025,084,677 and Rp737,109,201,489, respectively, decreased by Rp30,084,116,812 or 4.08 %.

Office Travel Expenses is an expense occurred for official travel in the course of performing tasks, functions, and occupations.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN			D. DESCRIPTION OF POST POST OPERATIONAL REPORT-CONTINUED		
2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN			2. DESCRIPTION OF THE POST OF THE OPERATIONAL REPORT-CONTINUED		
2.2 Beban Operasional-Lanjutan			2.2 Operational Expenses-CONTINUED		
6. Beban Penyusutan dan Amortisasi			6. Depreciation and Amortization Expense		
	31 Desember 2017/ December 31, 2017			31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	217.419.190.816			227.212.373.535	Depreciation Equipment and Machinery Expense
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	48.701.466.196			48.566.042.425	Depreciation Building and Properties Expense
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	16.032.559.487			24.778.618.593	Road Depreciation, Irrigation, Network
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	36.169.188			53.474.125	Depreciation Other Fixed Assets Expense
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	190.238.920			490.118.107	Depreciation of Unused Fixed Assets in Government Operational Expense
Beban Amortisasi Software	6.578.422.771			9.425.455.292	Amortization Software Expense
Beban Amortisasi Lisensi	5.098.514.974			5.490.809.865	Amortization License Expense
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	32.515.944			482.115	Depreciation of Unused Intangible Assets in Government Operational Expense
Jumlah	294.089.078.296			316.017.374.057	Total

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp294.089.078.296 dan Rp316.017.374.057, terjadi penurunan sebesar Rp21.928.295.761 atau 6,94%.

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Total Depreciation and Amortization Expense for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp294,089,078,296 and Rp316,017,374,057 respectively, decreased by Rp21,928,295,761 or 6, 94%.

Depreciation and Amortization Expense is an expense to record the systematic allocation of the value of a depreciable assets over the life time. Meanwhile, Amortization Expense is used to record the allocation of the decrease of economic benefits for Intangible Assets.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN		D. DESCRIPTION OF POST POST OPERATIONAL REPORT-CONTINUED	
2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN		2. DESCRIPTION OF THE POST OF THE OPERATIONAL REPORT-CONTINUED	
2.2 Beban Operasional-Lanjutan		2.2 Operational Expenses-CONTINUED	
7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		7. Allowance for Doubtful Accounts	
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:		The Details of Allowance for Doubtful Accounts for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016
Beban Penyisihan			Allowance for Doubtfull
Piutang Tak			Account-
Tertagih-Piutang			Short Term
Jangka Pendek			Receivable
- Piutang Jangka Pendek	18.465.366	(23.299.124)	Short Term - Receivable
- Bagian Lancar TP/TGR	10.693.518	72.000	Current Position- Indemnification of Treasury/Claims Bills
Beban Penyisihan			Allowance for Doubtfull
Piutang Tak			Account-
Tertagih-Piutang			Long Term
Jangka Panjang	20.614.177	(64.300.216)	Receivable
Jumlah	49.773.061	(87.527.340)	Total
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp49.773.061 dan Rp87.527.340, terjadi kenaikan sebesar Rp137.300.401 atau 156,87%		Total Expenses for Doubtful Accounts for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounted Rp49,773,061 and Rp87,527,340, respectively an increase of Rp137,300,401 or 156.87%	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.		Allowance for Doubtful Accounts is an expense to record estimated unbanked accounts in a period.	
2.3 Kegiatan Non Operasional		2.3 Non-Operational Activities	
Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 surplus masing-masing sebesar Rp1.382.893.359 dan Rp5.044.728.916, terjadi penurunan sebesar Rp3.661.835.557 atau 72,59%.		Non-Operational Activities for the period ended December 31, 2017 and 2016 surplus amounting to Rp1,382,893,359 and Rp5,044,728,916 respectively, a decrease of Rp3,661,835,557 or 72.59%.	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.		Surplus/Deficit of Non-Operational Activities consists of income and expenses that are not routine and are not the main duties and functions of the entity.	

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN **D. DESCRIPTION OF POST POST OPERATIONAL REPORT-CONTINUED**

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN

2.3 Kegiatan Non Operasional-Lanjutan

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji pada tabel berikut ini:

2. DESCRIPTION OF THE POST OF THE OPERATIONAL REPORT-CONTINUED

2.3 Non-Operational Activities-Continued

Details of Non-Operational Surplus/Deficit for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are presented in the following table:

No	Uraian/ Description	TA 2017/ PY 2017	TA 2016/ PY 2016	%
1	Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar/Surplus (Deficit) Release of Non-Current Assets	166.730.126	2.536.682.075	-93,43%
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar/ Non-Current Assets Release Revenue	2.050.245.872	3.771.922.352	-45,64%
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar/ Non-Current Asset Release Expense	1.883.515.746	1.235.240.277	52,48%
2	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya/Surplus (Deficit) from Other Non-Operational	1.216.163.233	2.508.046.841	-51,51%
	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya/Revenues from Other Non-Operating	2.461.334.767	3.179.313.139	-22,58%
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya/Expenses from Other Non-Operational	1.245.171.534	671.266.298	85,50%
Jumlah/Total		1.382.893.359	5.044.728.916	-72,59%

1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp166.730.126 dan Rp2.536.682.075, terjadi penurunan sebesar Rp2.369.951.949 atau 93,43%.

Surplus atau Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan kegiatan pelepasan Aset yang meliputi pendapatan hasil lelang dikurangi beban yang ditimbulkan atas selisih kurang nilai lelang dari nilai buku Aset Non Lancar.

Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

1. Surplus/(Defisit) Non-Current Assets Release

Total of Surplus/(Deficit) Release of Non-Current Assets for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp166,730,126 and Rp2,536,682,075, respectively, decreased by Rp2,369,951,949 or 93.43%.

Surplus or Deficit from Non-Current Assets Disposal is an Asset disposal activity which includes the income of the auction results less the expenses incurred on the lesser auction value of the Non-Current Assets book value.

The Details of Surplus/(Deficit) Disposal of Non-Current Assets for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

31 Desember 2017/ December 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			Non-Current Assets Disposal
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		654.643.505	Revenue from Equipment and Machinery
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		1.395.602.367	Revenues from the Transfer of Other BMN
Jumlah	2.050.245.872	3.327.346.322	Total
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			Non-Current Assets Disposal Expenses
Beban Kerugian Pelepasan Aset		1.883.515.746	Loss Disposal Assets Expenses
Jumlah	1.883.515.746	1.235.240.277	Total
Surplus	166.730.126	2.536.682.075	Surplus

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN		D. DESCRIPTION OF POST POST OPERATIONAL REPORT-CONTINUED	
2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN		2. DESCRIPTION OF THE POST OF THE OPERATIONAL REPORT-CONTINUED	
2.3 Kegiatan Non Operasional-Lanjutan		2.3 Non-Operational Activities-Continued	
2. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2. Surplus/(Deficit) From Other Non-Operational Activities	
Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:		Details of the Surplus/(Deficit) of Other Non-Operating Activities for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:	
	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			Revenue from Other Non Operational Activities
Pendapatan			Revenue of
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	428.731.123	670.380.036	Completion Non-Treasury Compensation Claims
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	-	419.273.850	Revenue of Completion Treasury Demands
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	42.295.844	-	Revenue Foreign Exchange Which has not Realized
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	300.000	-	Deposit Revenue from Non Indemnification of Treasury/Claims Bills Residents Retired civil servants
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.990.007.800	2.089.659.253	Income adjustment value supplies
Jumlah	2.461.334.767	3.179.313.139	Total
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			Non-Current Assets Release Expenses
Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	6.975.297	Damaged Inventory Loss/worn Expense
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.223.561.867	664.291.001	Inventory Value Adjustment Expense
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	21.609.667	-	Expenses Loss on Foreign Exchange Differences Not yet Realized
Jumlah	1.245.171.534	671.266.298	Total
Surplus	1.216.163.233	2.508.046.841	Surplus

Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.216.163.233 dan Rp2.508.046.841, terjadi penurunan sebesar Rp1.291.883.608 atau 51,51%. Surplus atau Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan yang bukan pendapatan operasional dikurangi beban yang bukan beban operasional.

Total Surplus/(Deficit) of Other Non-Operating Activities for the period ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp1,216,163,233 and Rp2,508,046,841 respectively, a decrease of Rp1,291,883,608 or 51.51%. Surplus or Deficit from Other Non-Operating Activities is revenue derived from non-operating income less operating expenses.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN	D. DESCRIPTION OF POST POST OPERATIONAL REPORT-CONTINUED
---	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL-LANJUTAN

2.4 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat saldo Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016.
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

2. DESCRIPTION OF THE POST OF THE OPERATIONAL REPORT-CONTINUED

2.4 Extraordinary Post

There are no outstanding balance of Posts for the period ended December 31, 2017 and 2016.
Extraordinary items consist of revenue and expenses that are not often present, unpredictable and out of control of the entity.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	E. DESCRIPTION TO THE POSITIONS OF THE CHANGES IN EQUITY
--	--

1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL DESCRIPTION OF STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

The Details of the Statement of Changes in Equity for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Uraian/ Description	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	%
Ekuitas Awal/Beginning Balance of Equity	4.647.887.059.586	4.430.334.477.617	4,91%
Surplus/Defisit LO/ Surplus/Deficit LO	(2.811.505.072.013)	(2.844.655.944.437)	-1,17%
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar/Corrections that increase/decrease the Equity which among others come from the Cumulative Impact of Changes in Accounting Policy/Fundamental Errors	126.563.338.008	(28.913.327.178)	-537,73%
Transaksi Antara Entitas/ Transactions Between Entities	2.662.709.148.951	3.091.121.853.584	-13,86%
Kenaikan/Penurunan Ekuitas/ Increase/Decrease Equity	(22.232.585.054)	217.552.581.969	-110,22%
Ekuitas Akhir/Final Equity	4.625.654.474.532	4.647.887.059.586	-0,48%

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

2.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.647.887.059.586 dan Rp4.430.334.477.617.

Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas akhir tahun yang lalu.

2. DESCRIPTION OF THE POST REPORT CHANGES IN EQUITY

2.1. Beginning Balance of Equity

Beginning Balance of Equity as of January 1, 2017 and January 1, 2016 amounted Rp4,647,887,059,586 and Rp4,430,334,477,617, respectively.

Beginning Balance of Equity represents the Equity Value derived from the value of the Equity at the end of the previous year.

2.2. Surplus (Defisit) LO

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 terjadi defisit LO masing-masing sebesar (Rp2.811.505.072.013) dan (Rp2.844.655.944.437).

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

2.2. Surplus (Deficit) LO

For the periods ended December 31, 2017 and 2016, there were LO deficits of (Rp2,811,505,072,013) and (Rp2,844,655,944,437) respectively.

The LO deficit represents a lesser difference between surplus/deficit operational activities, surplus/deficit non-operational activities, and extraordinary items.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	E. DESCRIPTION TO THE POSITIONS OF THE CHANGES IN EQUITY
---	---

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-LANJUTAN

2.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar merupakan Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun lalu.

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp126.563.338.008 dan (Rp28.913.327.178).

Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji pada tabel berikut ini:

No	Uraian/ Description	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	%
01	Penyesuaian Nilai Aset/ Asset Value Adjustment	-	-	-
02	koreksi Nilai Persediaan/ Inventory Value correction	-	1.545.500	-100,00%
03	Selisih Revaluasi Aset Tetap/Fixed Asset Revaluation Increment	-	-	-
04	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Non-Revaluation Asset Value Correction	66.961.056.291	(32.207.576.314)	-307,90%
05	Lain-lain/etc	59.602.281.717	3.292.703.636	1710,13%
Jumlah/Total		126.563.338.008	(28.913.327.178)	-537,73%

1. Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan penyesuaian nilai aset yang terjadi pada periode berjalan untuk nilai aset tahun lalu akibat penerapan kebijakan.

2. DESCRIPTION OF THE POST REPORT CHANGES IN EQUITY-CONTINUED

2.3. Correction That Increase/Reduce Equity Among Other Derived From Cumulative Impact Changes in Accounting Policies/Fundamental Errors

Amendments that added/Reduced Equity, among others, from Cumulative Impact Changes in Accounting Policies/Fundamental Errors are Adjustment of Asset Value, Inventory Value Correction, Fixed Increment of Assets Revaluation, Amendment of Non Performing Assets and Other Amendments made in the current period against the value of equity from Asset accounts last year.

Amount of Amendment Increasing/Reducing the Equity, among others, from Cumulative Impact Changes in Accounting Policies/Fundamental Errors for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp126,563,338,008 and (Rp28,913,327,178).

Details of Corrections That Increase/Reduce the Equity, among others, from Cumulative Impact Changes in the Accounting Policies/Fundamental Errors for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are listed in the following table:

1. Asset Value Adjustment

There are no Asset Value Adjustment balances for the periods ending 31 December 2017 and 2016.

Asset Value Adjustment reflects an asset value adjustment that occurred in the current period for last year's asset value due to policy implementation.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	E. DESCRIPTION TO THE POSITIONS OF THE CHANGES IN EQUITY
---	---

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-LANJUTAN

2.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar - Lanjutan

2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.545.500, terjadi penurunan sebesar Rp1.545.500 atau 100%.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan <i>Type of Inventory</i>	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	%
01	Suku Cadang/ <i>Spare Parts</i>	-	1.545.500	-100,00%

3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tidak terdapat saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp66.961.056.291 dan (Rp32.207.576.314), terjadi kenaikan sebesar Rp99.168.632.605 atau 307,90%.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi aset.

2. DESCRIPTION OF THE POST REPORT CHANGES IN EQUITY-CONTINUED

2.3. Correction That Increase/Reduce Equity Among Other Derived From Cumulative Impact Changes in Accounting Policies/Fundamental Errors - Continued

2. Inventory Value Correction

The Inventory Value correction reflects a correction of the value of the inventory due to an error in the inventory valuation occurring in the previous period.

Inventory Value Correction for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp0 and Rp1,545,500, respectively, decreased by Rp1,545,500 or 100%.

The details of the Inventory Value Correction for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

3. Fixed Asset Revaluation Increment

No Revaluation Fixed Asset Revaluation balance for the period ended December 31, 2017 and 2016.

The difference between fixed asset revaluation represents the difference that arises during the revaluation of property and equipment. The revaluation increment of fixed assets is derived from the reassessment of land, Properties and Buliding and roads, irrigation and networks such as roads and bridges.

4. Non-Revaluation Asset Value Correction

Correction in the Value of Non-Revaluation Non Fixed Assets for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp66,961,056,291 and (Rp32,207,576,314) respectively, an increase of Rp99,168,632,605.00 or 307.90%.

Non Revaluation Asset Value Correction is derived from a correction of the value of fixed assets and other assets that is not not due to asset revaluation.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS **E. DESCRIPTION TO THE POSITIONS OF THE CHANGES IN EQUITY**

- 2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-LANJUTAN**
- 2.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar - Lanjutan**
- 4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi-Lanjutan**
Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

- 2. DESCRIPTION OF THE POST REPORT CHANGES IN EQUITY-CONTINUED**
- 2.3. Correction That Increase/Reduce Equity Among Other Derived From Cumulative Impact Changes in Accounting Policies/Fundamental Errors - Continued**
- 4. Non-Revaluation Asset Value Correction-Continued**
The details of Non-Revaluation Non Permanent Asset Value Correction for the periods ended December 31, 2017 and 2016 are as follows:

No	Uraian/ Description	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	%
Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi/Adjustment Non-Revaluation Asset Value		67.005.365.666	35.986.914.117	86,19%
01	Tanah/Land	74.083.051.022	49.000.000	151089,90%
02	Peralatan dan Mesin/ Equipment and Machines	21.907.238.439	32.965.707.611	-33,55%
03	Gedung dan Bangunan/ Building and Properties	(3.149.389.804)	(37.860.306.440)	-91,68%
04	Gedung dan Bangunan belum di register/Building and Properties not yet registered	76.115.720	-	-
05	Jalan dan Jembatan/ Roads and Bridges	2.061.906.400	2.077.779.647	-0,76%
06	Irigasi/Irrigation	(1.615.673.690)	(720.143.600)	124,35%
07	Jaringan/network	7.016.642.004	30.641.895.209	-77,10%
08	Aset Tetap Renovasi/ Fixed Assets Renovations	(70.484.980.839)	(43.630.272.270)	61,55%
09	Konstruksi Dalam Pekerjaan/ Construction In Progress	(3.254.703.000)	(827.490.247)	293,32%
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin/Accumulated Depreciation Equipment and Machines	(3.278.960.838)	(4.378.233.253)	-25,11%
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan/Accumulated Depreciation of Building and Properties	254.173.428	41.591.524.788	-99,39%
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan/Accumulated Depreciation of Roads and Bridges	(36.051.385)	(146.808.932)	-75,44%
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi/ Accumulated Depreciation of Irrigation	659.628.102	(53.810.245)	-1325,84%
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan/ Accumulated Depreciation Network	(510.993.054)	(2.302.039.348)	-77,80%
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya/Accumulated Depreciation of Other Fixed Assets	-	1	-100,00%
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional/Accumulated Depreciation of Fixed Assets not Used In Operations	-	(310.039.976)	-100,00%
17	Piutang PNPB/ PNBP Receivables	3.254.703.000	827.490.247	293,32%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS **E. DESCRIPTION TO THE POSITIONS OF THE CHANGES IN EQUITY**

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-LANJUTAN

2.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar - Lanjutan

4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi-Lanjutan

No	Uraian/ Description	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	%
18	Transfer Masuk/ Incoming Transfers	40.022.660.161	17.487.600.297	128,86%
19	Beban Kerugian Aset Tetap/ Fixed Asset Loss Expense	-	560.321.883	-100,00%
20	Transfer Keluar/ Transfer Out	-	14.738.745	-100,00%
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi/Adjustment Revaluation of Other Assets		(44.309.375)	(68.194.490.431)	-99,94%
01	Akumulasi Amortisasi Software/Accumulated Amortization Software	(44.309.375)	(57.631.983.240)	-99,92%
02	Akumulasi Amortisasi Lisensi/Accumulated Amortization of License	-	(11.489.055.066)	-100,00%
03	Akumulasi ATB yang tidak digunakan dalam operasional/ATB accumulation not used in operations	-	(31.061.250)	-100,00%
04	Transfer Masuk/ Incoming Transfers	-	957.609.125	-100,00%
Jumlah/Total		66.961.056.291	(32.207.576.314)	-307,90%

2. DESCRIPTION OF THE POST REPORT CHANGES IN EQUITY-CONTINUED

2.3. Correction That Increase/Reduce Equity Among Other Derived From Cumulative Impact Changes in Accounting Policies/Fundamental Errors - Continued

4. Non-Revaluation Asset Value Correction-Continued

5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp59.602.281.717 dan Rp3.292.703.636.

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

Rincian Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

5. Other Corrections

Other Corrections for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp59,602,281,717 and Rp3,292,703,636, respectively.

Other Correction is a correction other than those related to State Assets, such as correction on revenue, correction on expenses, corrections on grants, receivables, and payable.

The details of Other Corrections as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

No	Uraian/ Description	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	%
01	Koreksi Kas Lainnya di Bendahara/Other Cash Corrections in Treasurer	1.642.587.625	(229.581.435)	-815,47%
02	Koreksi Piutang/Receivable Correction	(104.639)	(7.177.536)	-98,54%
03	Koreksi Kewajiban/ Correction of Liability	(17.787.568)	(3.250.000)	447,31%
04	Koreksi Pendapatan/Revenue Correction	2.833.344.864	4.172.228.393	-32,09%
05	Koreksi Beban/Expenses Correction	55.144.241.435	(639.515.786)	-8722,81%
Jumlah/Total		59.602.281.717	3.292.703.636	1710,13%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	E. DESCRIPTION TO THE POSITIONS OF THE CHANGES IN EQUITY
2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-LANJUTAN 2.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar - Lanjutan 5. Koreksi Lain-lain-Lanjutan Koreksi Lain-Lain berasal dari akun Koreksi Lainnya yang berasal dari: 1. Koreksi atas Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.642.587.625 berasal dari koreksi atas kelebihan tunjangan TKPK TA 2016 yang belum disetor pada 31 Desember 2016 namun baru diperoleh pada Tahun 2017 dan koreksi ke Utang Pihak Ketiga Lainnya karena dikembalikan ke pegawai. 2. Koreksi atas Piutang Lainnya (Rp104.639). 3. Koreksi atas Kewajiban sebesar (Rp17.787.568) berasal dari: a. Koreksi atas Belanja Pegawai yang masih harus dibayar di Tahun 2017 sebesar (Rp9.037.568). b. Koreksi atas Belanja Barang yang masih harus dibayar di Tahun 2017 sebesar (Rp8.750.000). 4. Koreksi atas Pendapatan sebesar Rp2.833.344.864 berasal dari: a. Koreksi atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, yaitu sesuai SK penempatan rumah dinas di Perwakilan Yogyakarta Tahun 2016 sebesar (Rp1.379.513). b. Koreksi pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL di Tahun 2017 yang melebihi saldo pengembalian belum setor Tahun 2016 sebesar Rp853.100.362. c. Koreksi pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL di Tahun 2017 yang melebihi saldo pengembalian belum setor Tahun 2016 sebesar Rp1.981.624.015. 5. Koreksi atas beban sebesar Rp55.144.241.435 berasal dari: a. Koreksi beban atas pembayaran akun Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2016 di Tahun 2017 sebesar Rp55.130.187.726 terdiri dari: 1) Koreksi yang berasal dari penghapusan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2012;	2. DESCRIPTION OF THE POST REPORT CHANGES IN EQUITY-CONTINUED 2.3. Amendments That Increase/Reduce Equity Among Other Derived From Cumulative Impact Changes in Accounting Policies/Fundamental Errors - Continued 5. Other Corrections-Continued Other corrections are derived from other Correction accounts derived from: 1. Correction to Other Cash in the Expenditure Treasurer amounting to Rp1,642,587,625 derived from the correction of excess of TKPK FY 2016 allowance not paid yet on December 31, 2016 but newly acquired in 2017 and correction to Other Third Party Debts as returned to the employee. 2. Correction for Other Receivables (Rp104,639). 3. Correction to Liability (Rp17,787,568) is derived from: a. Correction for Employee Expenses accrued in Year 2017 amounting to (Rp9,037,568). b. Correction for Expenditures of Goods accrued in the Year 2017 amounting to (Rp8,750,000). 4. Correction to Revenue of Rp2,833,344,864 are from: a. Correction of Land Rental Revenue, Building and Properties, which is according to SK placement of official house in Yogyakarta Representative Year 2016 amounting to (Rp1,379,513). b. Correction of revenues on FY Ago Employee Return Recovery in 2017 that exceeds the outstanding balance of Rp853,100,362 in 2016. c. Revenue correction on FY Ago Goods Return Recovery in Year 2017 that exceeds the outstanding balance of Return of 2016 amounting to Rp1,981,624,015. 5. Correction for expenses of Rp55,144,241,435 comes from: a. The correction of expenses on the Accrued Expenditure for Personnel Expenses account as of December 31, 2016 in 2017 amounting to Rp55,130,187,726 consists of: 1 Correction arising from the write-off of personnel expenditures that are still payable in 2012;

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	E. DESCRIPTION TO THE POSITIONS OF THE CHANGES IN EQUITY
---	---

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-LANJUTAN

2.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar - Lanjutan

5. Koreksi Lain-lain-Lanjutan

- 2) Koreksi Internal atas pembayaran tunjangan kinerja pegawai TA 2016 yang belum diakui di Tahun 2016 dan di bayar di Tahun 2017;
- 3) Koreksi atas kelebihan catat kekurangan Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar per 31 Desember 2016 di tahun 2017.

- b. Koreksi beban atas pembayaran akun Keperluan Kantor, langganan listrik, telepon dan air per 31 Desember 2016 di Tahun 2017 sebesar Rp14.053.709.

2.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.662.709.148.951 dan Rp3.091.121.853.584. Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima dari Entitas Lain ditambah dengan selisih antara akun Transfer Keluar dan Transfer Masuk, serta ditambah dengan Pengesahan Hibah Langsung. Rincian Perbandingan Transaksi antar entitas adalah sebagai berikut:

No	Transaksi antar Entitas/ Transactions between Entities	31 Desember 2017/ December 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	%
01	Ditagihkan ke Entitas Lain/ Charged to Other Entities	2.670.558.146.116	3.100.060.731.231	-13,85%
02	Diterima Dari Entitas Lain/ Received From Other Entities	(20.126.781.218)	(28.548.288.613)	-29,50%
03	Transfer Keluar/Transfer Out	(479.706.514.473)	(190.166.650.287)	152,26%
04	Transfer Masuk/Incoming Transfers	479.706.514.473	187.234.012.870	156,21%
05	Pengesahan Hibah Langsung/ Validation of Direct Grants	12.277.784.053	22.542.048.383	-45,53%
Jumlah/Total		2.662.709.148.951	3.091.121.853.584	-13,86%

1. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.670.558.146.116 dan Rp3.100.060.731.231.

Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar (Rp20.126.781.218) dan (Rp28.548.288.613).

E. 2. DESCRIPTION OF THE POST REPORT CHANGES IN EQUITY-CONTINUED

2.3. Amendments That Increase/Reduce Equity Among Other Derived From Cumulative Impact Changes in Accounting Policies/Fundamental Errors - Continued

5. Other Corrections-Continued

- 2) Internal correction of unappreciated 2016 Employee Performance Benefit payments in 2016 and paid in 2017;
- 3) Correction of the understated of 2016 Accrued Employee Expenditures of December 31, 2016 in 2017.

- b. Correction of charges for Office account payments, electricity, phone and water subscriptions as of December 31, 2016 in 2017 amounting to Rp14,053,709.

2.4. Inter-Entity Transactions

The value of Inter-Entity Transactions for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounted Rp2,662,709,148,951 and Rp3,091,121,853,584. Inter-Entity Transactions represent the difference between accounts billed to other entities and received from other entities plus the difference between Transfer Out and Incoming Transfer accounts, plus the Validation of Direct Grants. Comparison Details Transactions between entities are as follows:

1. Received from Other Entities/Billed to Other Entities

Received from another entity and billed to another entity is an inter-entity transaction on revenue and expenditure on KL involving the state treasury (BUN).

Billed to Other Entities for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounted Rp2,670,558,146,116 and Rp3,100,060,731,231.

Received from other entities for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to (Rp20,126,781,218) and (Rp28,548,288,613).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	E. DESCRIPTION TO THE POSITIONS OF THE CHANGES IN EQUITY
--	--

2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-LANJUTAN

2.4. Transaksi Antar Entitas-Lanjutan

2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset dan atau kewajiban dari satu satker ke satker lain pada internal KL, antara KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Saldo Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar (Rp479.706.514.473) dan (Rp190.166.650.287).

Saldo Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp479.706.514.473 dan Rp187.234.012.870.

3. Pengesahan Hibah Langsung

Saldo Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp12.277.784.053 dan Rp22.542.048.383.

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah/ Grantee	Bentuk Hibah/ Grant Form	Nilai Pengesahan/ Validity Value
1.	BPK Pusat/ <i>Headquarters BPK</i>	Jasa/Services	9.208.587.053
2.	Setjen/ <i>General Secretariat</i>	Barang/Goods	3.069.197.000
Total Pengesahan/Total Validation			12.277.784.053
Pengesahan Pengembalian Hibah/Validation of Grant Refund			-
Jumlah/Total			12.277.784.053

Pengesahan Hibah Langsung di BPK pada Tahun 2017 berasal dari:

1. Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp1.295.250.000 berupa:
 - a. Tanah sebesar Rp1.279.250.000 pada satker Sekretariat Jenderal BPK.
 - b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.000.000 pada satker Sekretariat Jenderal BPK.
2. Ir. H. Andi Herry Iskandar sebesar Rp26.247.000 berupa Peralatan dan Mesin pada satker Sekretariat Jenderal BPK.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp1.747.700.000 berupa Tanah pada satker Sekretariat Jenderal BPK.

2. DESCRIPTION OF THE POST REPORT CHANGES IN EQUITY-CONTINUED

2.4. Inter-Entity Transactions-Continued

2. Transfer Entry/Transfer Out

Incoming and Outgoing Transfer is a transfer of assets and or liabilities from one satker to another unit work within the internal KL, between KL and between KL and BA-BUN.

Outgoing Transfer Balance for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounted (Rp479,706,514,473) and (Rp190,166,650,287).

Balance of Incoming Transfer for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp479,706,514,473 and Rp187,234,012,870.

3. Validation of Direct Grants

The balance of the End of Direct Grant Agreement for the periods ended December 31, 2017 and 2016 amounted Rp12,277,784,053 and Rp22,542,048,383.

Validation of Direct Grants is a transaction on the listing of KL direct grants in the form of cash, goods and services while the recording of grant income is made by BA-BUN.

The details of the Validation of Direct Grants for 2017 are as follows:

Validation of Direct Grants in BPK in 2017 comes from:

1. Aceh Provincial Government amounting to Rp1,295,250,000 in form of:
 - a. Land amounting to Rp1,279,250,000 at the Secretariat General Secretariat BPK.
 - b. Building and Properties amounting to Rp16,000,000 at the Secretariat General Secretariat BPK.
2. Ir. H. Andi Herry Iskandar Rp26,247,000 in the form of Equipment and Machinery at the Secretariat General Secretariat BPK.
3. Bandar Lampung City Government amounted Rp1,747,700,000 in the form of Land at the Secretariat General Secretariat BPK.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	E. DESCRIPTION TO THE POSITIONS OF THE CHANGES IN EQUITY
2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS-LANJUTAN 2.4. Transaksi Antar Entitas-Lanjutan 3. Pengesahan Hibah Langsung-Lanjutan 4. DFAT (Department of Foreign Affair and Trade) berupa Hibah Jasa sebesar Rp9.208.587.053 pada satker BPK Pusat. 2.5. Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.625.654.474.532 dan Rp4.647.887.059.586.	2. DESCRIPTION OF THE POST REPORT CHANGES IN EQUITY-CONTINUED 2.4. Inter-Entity Transactions-Continued 3. Validation of Direct Grants - Continued 4. DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) in the form of Service Grant amounting to Rp9,208,587,053 to the Central BPK unit work. 2.5. Ending Balance of Equity Ending Balance of Equity for the period ended December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp4,625,654,474,532 and Rp4,647,887,059,586, respectively.
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	F. OTHER IMPORTANT DISCLOSURES
1. Pengungkapan Lain-Lain Berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam SK BPK No.3/K/I- XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke empat SK BPK No.14/K/I-XIII.2/9/2017 terdapat perubahan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Unit Eselon II berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Unit Eselon I. Balai Diklat Unit Eselon III berubah menjadi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Unit Eselon III. 2. Rekening Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga diharuskan mengungkapkan rekening yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya. BPK memiliki 74 rekening bendahara pengeluaran dan satu rekening bendahara penerimaan. 3. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan KAP Sebagaimana diamanatkan UU No.15 Tahun 2004 dan PMK No.116/PMK.05/2007, Laporan Keuangan BPK RI telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik. Laporan Keuangan BPK Tahun 2016 telah diaudit oleh KAP Sriyadi, Elli dan Rekan dan koreksi atas angka pada laporan keuangan tersebut telah diakomodir dan menjadi saldo Audited yang menjadi saldo awal penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017. Secara rinci temuan dan tindak lanjut yang dilampirkan adalah Progress Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan Tahun 2016.	1. Other Disclosures Based on the organizational structure as stated in BPK Decree No.3/K/I-XIII.2/7/2014 as amended by the amendment to forth of BPK Decree No.14/K/I-XIII.2/9/2017 there are organizational changes and Working Procedures. Echelon II Training and Education Center was changed to the Echelon I Unit Echelon State Education and Training Board. The Echelon III Training Center was changed to the Education and Training Center of State Finance Audit Unit of Echelon III. 2. Government Accounts Based on Regulation of the Minister of Finance No.177/PMK.05/2015 as amended by Regulation of the Minister of Finance No.222/PMK.05/2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Finance No.177/PMK.05/2015 on Guidelines for the Preparation and Submission of Financial Statements of State Ministries/Institution is required to disclose accounts used in its operational activities. BPK has 74 accounts of the treasurer of expenditures and one account of the treasurer of receipts. 3. Follow Up Findings Examination By Public Accounting Firm As mandated by Law No. 15 Year 2004 and PMK No. 116/PMK.05/2007, Financial Statement of BPK RI has been reviewed by Public Accounting Firm. The Audited Financial Statement of 2016 has been audited by KAP Sriyadi, Elli and Rekan and the correction on the figures in the financial statements has been accommodated and become the Audited balance which became the beginning balance of the preparation of the Financial Statements of 2017. In detail the findings and the follow-up attached are the Follow-up Progress on KAP Investigation Findings Sriyadi Elly Sugeng and Associate of 2016.
G. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN	G. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS
Manajemen BPK RI bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Mei 2018.	The Management of BPK RI is responsible for the preparation of the financial statements that were completed on May 18, 2018.